

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 2019, SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya dapat menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) 5 (lima) tahunan secara mandiri yang sistematis selaras dengan Pedoman Penyusunan Rencana aksi;
- b. bahwa TPB atau SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yang perlu didukung oleh daerah melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimana tujuan, target dan indikatornya perlu disesuaikan dengan kondisi, kemampuan dan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu adanya Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

18. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
23. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi TPB dan RAD TPB, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
24. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB dan RAD TPB yang telah selesai.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Penyusunan RAD TPB;
- b. Penetapan RAD;
- c. Keterkaitan RAD TPB Dengan Dokumen Perencanaan;
- d. Prinsip Pelaksanaan dan Peran Para Pihak Dalam Pelaksanaan RAD TPB;
- e. Pembiayaan/Pendanaan;
- f. Pelaksanaan RAD TPB Tahun 2019-2024;
- g. Pemantauan dan evaluasi;
- h. Penutup.

Pasal 3

- (1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

- (2) TPB atau SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan 319 indikator yaitu :
- a. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan;
 - b. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan;
 - c. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
 - d. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas;
 - e. Tujuan 5 Kesetaraan Gender;
 - f. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak;
 - g. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau;
 - h. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
 - i. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
 - j. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan;
 - k. Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
 - l. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
 - m. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim;
 - n. Tujuan 14 Ekosistem Lautan;
 - o. Tujuan 15 Ekosistem Daratan;
 - p. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
 - q. Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon bertujuan untuk:
- a. melaksanakan Peta Jalan Nasional TPB;
 - b. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pelaksanaan sasaran prioritas kabupaten dalam Peta Jalan Nasional TPB melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral antara Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat;
 - c. meningkatkan peran dan komitmen Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam pencapaian pelaksanaan TPB; dan
 - d. menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mendukung dan melaksanakan target, tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Dalam penyusunan RAD TPB Kabupaten Cirebon disesuaikan dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan kabupaten yang meliputi 10 tujuan dan 177 indikator dan ketersediaan data yang ada yaitu:
- a. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan;
 - b. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan;
 - c. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
 - d. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas;
 - e. Tujuan 5 Kesetaraan Gender;
 - f. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak;
 - g. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
 - h. Sebagian Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan;
 - i. Sebagian Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
 - j. Sebagian Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.

BAB III PENETAPAN RAD TPB

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Aksi Daerah pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
- (2) RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Sistematika RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Keselarasan TPB Terhadap RPJMD
- 1.2. TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs
- 1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
- 1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
- 1.5. Pembiayaan TPB
- 1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB
- 1.7. Sistematika Rencana Aksi TPB

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB

- 2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun
- 2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
- 2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- 2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
- 2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- 2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 2.7. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
- 2.8. Mengurangi Kesenjangan
- 2.9. Kota dan Permukiman Berkelanjutan
- 2.10 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB

- 3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
- 3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
- 3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
- 3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender
- 3.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak;
- 3.7 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
- 3.8 Sebagian Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan;
- 3.9 Sebagian Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
- 3.10 Sebagian Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- 4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- 4.2 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah
Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah

- (4) RAD TPB kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dengan melibatkan akademisi, organisasi kemasyarakatan, filantropi, dan pelaku usaha.

Pasal 6

Maksud penetapan RAD TPB yaitu untuk menetapkan dokumen rencana kerja sebagai pedoman dalam :

- a. Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs di Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Peran seluruh pemangku kepentingan dalam Pencapaian TPB/SDGs mulai dari Perangkat Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya.
- c. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan di Daerah.

BAB IV

KETERKAITAN RAD TPB DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) TPB merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- (2) TPB menjadi salah satu acuan dalam pembangunan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengarusutamaan pencapaian TPB dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan dan indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya.

Pasal 8

- (1) Dokumen RAD TPB ini perlu ditindaklanjuti dan diakomodir ke dalam dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra), Renja dan RKA, DPA bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon terutama terkait program, kegiatan dan indikator yang terukur.
- (2) Dokumen RAD TPB ini perlu ditindaklanjuti dan diakomodir ke dalam dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran bagi Perusahaan/dunia usaha sebagai bentuk tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- (3) Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini perlu ditindaklanjuti dan diakomodir ke dalam dokumen perencanaan bagi akademisi, filantropi dan organisasi kemasyarakatan.

BAB V

PRINSIP PELAKSANAAN DAN PERAN PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN RAD TPB

Pasal 9

Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs yaitu :

- a. bersifat universal;
- b. bersifat inklusif;
- c. terintegrasi antar dimensi;
- d. *no one left behind* (tidak ada seorangpun yang tertinggal).

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian RAD TPB.
- (2) Organisasi kemasyarakatan berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi.
- (3) Media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan publikasi tentang TPB, menginformasikan program dan pelaksanaan TPB.
- (4) Pelaku usaha dan filantropi berperan memfasilitasi dan melaksanakan program TPB, meningkatkan kapasitas masyarakat, pemberdayaan masyarakat.
- (5) Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pencapaian TPB.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Sumber pendanaan dalam pelaksanaan TPB, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
 - d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang disisihkan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian TPB sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD TPB

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD TPB dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan pihak lain yang terkait.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Koordinasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Kabupaten Cirebon.
- (3) Pemantauan pelaksanaan RAD TPB merupakan kegiatan pengumpulan informasi di SKPD, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, filantropi, akademisi yang dilakukan secara berkala.
- (4) Pemantauan dimaksudkan untuk melihat dan mengidentifikasi permasalahan dan penyelesaiannya serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dari pelaksanaan RAD TPB di SKPD, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha dan filantropi.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan.

Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan RAD TPB bertujuan untuk memastikan apakah capaian RAD TPB di SKPD, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha dan filantropi telah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan mengatasi permasalahan yang ada dan/atau mengantisipasi permasalahan yang akan timbul.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 14

- (1) Terhadap RAD TPB dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB.
- (3) Bupati menetapkan perubahan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan oleh Bupati dan / atau Ketua Tim Koordinasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Februari 2019

Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI B

Lampiran I Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 4 Tahun 2019

Tanggal : 12 Februari 2019

Tentang : Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Keselarasan TPB/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap RPJMD

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu

- (1) Tanpa Kemiskinan;
- (2) Tanpa Kelaparan;
- (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
- (4) Pendidikan Berkualitas;
- (5) Kesetaraan Gender;
- (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak;
- (7) Energi Bersih dan Terjangkau;
- (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
- (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
- (10) Berkurangnya Kesenjangan;
- (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
- (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
- (13) Penanganan Perubahan Iklim;
- (14) Ekosistem Lautan;
- (15) Ekosistem Daratan;
- (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
- (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat kabupaten telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400

kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.

Rencana aksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan rencana aksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs.

TPB/SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Posisi SDGs dalam Perencanaan Pembangunan Daerah – dimasukkan dalam RPJMD. Jumlah total indikator TPB dalam Metadata TPB sebanyak **319 indikator**. **Jumlah indikator** RPJMD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebanyak **420 indikator** sedangkan jumlah irisan indikator yang ada dalam RPJMD dan TPB sebanyak **107 indikator**.

RPJMD sudah direvisi, target SDGs dimasukkan ke dalam. Tidak perlu membentuk kegiatan baru, tapi mengaitkan dengan sasaran SDGs. Semua SKPD yang terlibat (Renstra) mengacu pada pencapaian SDGs goal berapa. Semua kegiatan perencanaan larinya ke SDGs

Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMD 2014-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam gambar berikut.



Gambar 1. Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan

1.2. TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs

TPB/SDGs sebagai kesepakatan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global merupakan transformasi yang ambisius dari MDGs. Sebagai contoh, Tujuan 1 MDGs tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada TPB/SDGs diperluas menjadi Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan. Contoh lainnya Tujuan 7 MDGs tentang Pelestarian Lingkungan, pada TPB/SDGs menjadi sebanyak 6 Tujuan meliputi Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan.

Berbeda dengan MDGs yang menargetkan pengurangan separuh dari target Tujuan global, TPB/SDGs jauh lebih ambisius karena bertujuan menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030. Misalnya Tujuan "Tanpa Kemiskinan" dan "Tanpa Kelaparan", akan dituntaskan hingga tahun 2030 atau diistilahkan sebagai "Zero Goal". Sebagai contoh target kemiskinan ekstrim pada Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan pada tahun 2030 adalah Nol (*zero*). Begitu pula target kelaparan pada Tujuan 2 tentang Tanpa Kelaparan, pada tahun 2030 adalah Nol (*zero*).

TPB/SDGs juga memiliki 4 Tujuan baru apabila dibandingkan dengan MDGs, yaitu Tujuan 9 terkait dengan Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan; Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; dan Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Apabila ditinjau dari indikatornya, maka MDGs memiliki 67 indikator, sementara TPB/SDGs telah bertransformasi menjadi 241 Indikator.

Meski menghadapi tantangan sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, serta dengan budaya dan kondisi geografis beragam, Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil mencapai hampir semua indikator MDGs dibandingkan negara Asia Pasifik lainnya. 49 dari 67 indikator MDGs telah berhasil dicapai Indonesia pada akhir tahun 2015. Tujuh indikator utama yang telah dicapai dalam MDGs tersebut meliputi:

- 1) kemiskinan dengan ukuran USD 1,00/kapita per hari,
- 2) akses pendidikan dasar,
- 3) kesetaraan gender dalam pendidikan,
- 4) Angka Kematian Bayi dan Balita,
- 5) pengendalian penyakit tuberkulosis (TB) dan malaria,
- 6) akses terhadap air bersih dan sanitasi perkotaan, dan
- 7) permukiman kumuh perkotaan.

Sementara itu, terdapat enam indikator MDGs yang belum dapat dicapai pada akhir tahun 2015 yaitu:

- 1) kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional,
- 2) Angka Kematian Ibu,
- 3) prevalensi HIV dan AIDS,
- 4) tutupan lahan,
- 5) air minum layak perdesaan, dan
- 6) sanitasi layak perdesaan.

Pencapaian MDGs inilah yang diteruskan oleh Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan SDGs.

1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Indonesia tidak hanya berkomitmen melaksanakan, namun bertekad menjadi pelopor (*pioneer*) dan teladan (*role model*) dunia pelaksanaan TPB/SDGs dalam upaya transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan bebas dan aktif di

kancah dunia. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs tidak hanya sangat penting bagi rakyat Indonesia yang terefleksi dari sinergitas antara Nawacita dengan SDGs, namun juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global. Lebih lanjut, TPB/SDGs juga menjadi instrumen untuk peningkatan Kerja sama Selatan-Selatan dan *Triangular* sebagai perwujudan Indonesia yang telah termasuk dalam kategori *lower-middle income country* atau negara berpenghasilan menengah bawah.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tersebut menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memimpin sendiri pelaksanaan TPB/SDGs sebagai Ketua Dewan Pengarah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana.

Kementerian PPN/BAPPENAS akan mengkoordinasikan penyusunan Peta Jalan TPB/SDGs sebagai dokumen tahapan strategi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs untuk tahun 2016-2030, penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs yang merupakan dokumen lima tahunan dari pelaksanaan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, dan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan TPB/SDGs di tingkat daerah. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 memandatkan penyusunan Rencana Aksi Nasional diselesaikan dalam kurun waktu enam bulan semenjak Peraturan Presiden disahkan, dan penyusunan Rencana Aksi Daerah serta Peta Jalan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Kementerian PPN/BAPPENAS juga telah membuat regulasi pelaksanaannya dengan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bappeda Provinsi juga berkomitmen mendukung pencapaian TPB/SDGs dengan intensnya melakukan rapat pembahasan dengan SKPD provinsi dan Bappeda kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan yang lain untuk menyusun Rencana Aksi Daerah pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2023 yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bappelitbangda juga berkomitmen mendukung pencapaian TPB/SDGs dengan melakukan kajian akademis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals di Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah menetapkan keputusan Bupati Cirebon Nomor 050/Kep.137-Bappelitbangda/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bappelitbangda dan dibantu dengan INFID intens melakukan rapat pembahasan dengan SKPD teknis serta para pemangku kepentingan yang lain seperti Aisiyiah, Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis; Forum Warga Buruh Migran untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs

Beranjak dari pengalaman semua negara dalam melaksanakan pencapaian target-target MDGs yang belum optimal, disepakati perlunya penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi TPB/SDGs. TPB/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal, tidak hanya

dilaksanakan oleh negara kurang berkembang dan negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia.

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah *"No one left behind"* atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda.

Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan melaksanakan pengabdian masyarakat.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup tujuan dan target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu "gerakan bersama" dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAN TPB/SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin pada Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Nonpemerintah.

1.5. Pembiayaan SDGs

Sebagai negara yang berkomitmen kuat menjalankan SDGs, Indonesia juga mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan SDGs, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*).

Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari: Optimalisasi Penerimaan Negara. Penerimaan negara yang berasal dari pajak, cukai, pendapatan bukan pajak, hibah (grant), retribusi, dll akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu bahkan menjadi salah satu indikator TPB/SDGs pada Goal 17

untuk memastikan sarana pelaksanaan TPB/SDGs (means of implementation). Optimalisasi pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan karena Indonesia masuk kategori sebagai negara pendapatan menengah bawah (lower-middle income country), sehingga lebih sulit untuk mendapatkan bantuan luar negeri.

Sumber Pembiayaan Nonpemerintah dari Masyarakat. Kedermawanan masyarakat Indonesia sangatlah tinggi, bahkan survei Gallup (2016) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat kedua paling dermawan di dunia setelah Myanmar. Kegiatan filantropi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang ditunjukkan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan dan keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui Zakat, Infaq, Shadaqah, Perpuluhan, Kolekte dan Dana Punia, mempunyai potensi yang sangat besar. Dari Zakat saja diperkirakan potensinya sekitar Rp 213 triliun/tahun namun baru tergalang kurang dari 2 persen, belum bila ditambahkan yang lainnya.

Kedermawanan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) kini juga terus berkembang, diperkirakan tahun 2015 sudah mencapai lebih dari Rp 12 triliun per tahun. CSR ini juga akan makin berkembang dan terarah dengan adanya "ISO 26000 : Guidance Standard on Social Responsibility" yang menjadi standar pedoman bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial institusi, serta terkait dengan SDGs.

Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat. Pembiayaan inovatif kini juga dikembangkan untuk pembiayaan TPB/SDGs misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (mis: Kehati Index) dan pasar uang (green bond), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme debt swap to SDGs, mekanisme impact investing, crowd financing, serta pembiayaan inovatif melalui blended finance (Pemerintah, Swasta, Filantropi). Salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah adalah skema KPBU. Terdapat 19 sektor KPBU yang mendukung pencapaian TPB/SDGs khususnya untuk pencapaian 9 Tujuan TPB/SDGs.

1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka dalam waktu duabelas bulan sejak diundangkan pada tanggal 10 Juli 2017, dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs harus ditetapkan. Perpres dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah, lembaga dan juga merupakan acuan bagi pihak nonpemerintah, oleh karena itu peran setiap pihak dalam penyusunan dokumen RAD menjadi sangat penting.

Dengan koordinasi Bappelitbangda, setiap tahap penyusunan RAD TPB/SDGs melibatkan keempat platform partisipasi yang dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Sidang pleno untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs terbagi dalam dua kali sidang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana. Sidang pertama melibatkan seluruh SKPD yang terkait dengan isu TPB/SDGs. Sidang pleno kedua melibatkan pihak nonpemerintah yang terdiri dari filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi, serta media. Sidang pleno kedua ini menekankan keterlibatan aktif dari pihak nonpemerintah dalam penyusunan RAD serta turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam program dan kegiatan yang tertuang pada aksi-aksi untuk memastikan penerapan prinsip inklusif.
2. Tahap berikutnya adalah penyelenggaraan beberapa seri pertemuan di masing-masing pokja dan sub pokja setiap Tujuan untuk membahas pengisian matriks RAD. Matriks terdiri dari matriks bagian 1 yang merupakan matrik utama yang

berisi target tahunan setiap indikator, matriks bagian 2 yang berisi program dan kegiatan pemerintah, serta matriks bagian 3 yang merupakan program dan kegiatan nonpemerintah. Dalam proses penyusunan matriks nonpemerintah, beberapa diskusi intensif dan rapat antara BAPPELITBANGDA, selaku koordinator pelaksana TPB/SDGs, dengan pihak-pihak nonpemerintah dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan nonpemerintah yang sesuai untuk pencapaian suatu indikator.

3. Selanjutnya, masing-masing sub kelompok kerja (Pokja) setiap Tujuan juga melakukan pembahasan terkait analisa situasi, permasalahan, dan tantangan dari hasil yang sudah ada saat ini dengan didukung oleh data dasar (baseline) secara runtun waktu (series) selama sepuluh tahun atau sesuai dengan ketersediaan data.
4. Proses sangat penting lainnya yang menjadi bagian dari penerapan prinsip inklusif dan memastikan keterlibatan semua pihak adalah melalui sistem daring (online) lewat laman (website) dan surat elektronik (email). Melalui sistem ini, Tim Pelaksana TPB/SDGs mengajak secara resmi seluruh platform untuk berkontribusi dalam penyusunan RAD.

1.7. Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs kabupaten Cirebon terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

1. BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap RPJMD

Pada bagian ini diuraikan keselarasan dan sinergi dari TPB terhadap RPJMD.

1.2. SDGs Menyempurnakan MDGs

Pada bagian ini menjelaskan secara umum tentang MDGs dan capaiannya, serta menunjukkan bahwa TPB/SDGs menyempurnakan MDGs secara lebih luas, terintegrasi, komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Pada bagian ini menunjukkan komitmen dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan TPB/SDGs secara inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Pada bagian ini menjelaskan prinsip pelaksanaan TPB/SDGs yaitu universal, terintegrasi antar dimensi, inklusif dan no one left behind, serta mencakup sarana pelaksanaan.

1.5. Pembiayaan TPB/SDGs

Pada bagian ini menjelaskan pembiayaan TPB/SDGs yang berasal dari pemerintah, sumber pembiayaan dari masyarakat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs

Pada bagian ini menjelaskan tentang mekanisme dan tahapan proses penyusunan rencana aksi yang inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

1.7. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

Pada bagian ini menjelaskan sistematika penyusunan dokumen rencana aksi TPB/SDGs.

2. BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

Pada bagian ini diuraikan tentang status capaian, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 sesuai dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan kabupaten yang dituliskan secara terkonsolidasi.

3. BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

Pada bagian ini dijelaskan target dan arah kebijakan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 yang dilakukan dalam rangka pencapaian TPB. Dituliskan kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing Tujuan sebagai arah pelaksanaan kegiatan. Target setiap indikator ditampilkan sebagaimana dicontohkan dalam matriks (tabel 2 format matriks bagian 1)

BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pada bagian ini diuraikan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melihat capaian pelaksanaan Renaksi TPB/SDGs untuk masing-masing tujuan. Mekanisme pemantauan dan evaluasi Renaksi TPB/SDGs perlu menggambarkan:

1) Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Berisi uraian tentang cara dan tahapan pemantauan dan evaluasi tujuan, target dan indikator TPB/SDGs dan mekanisme umpan balik yang dilakukan oleh setiap tim pelaksana dan pokja masing-masing pilar.

2) Mekanisme Pelaporan

Berisi tentang sistematika pelaporan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat/daerah dengan uraian capaian tiap tujuan, target, indikator, upaya-upaya yang dilakukan, masalah dan tantangan yang dihadapi untuk setiap tujuan TPB/SDGs, serta kebijakan yang diusulkan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi.

Disamping itu, laporan ini juga akan berisikan uraian tentang program, kegiatan, anggaran yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lain, meliputi Organisasi Kemasyarakatan dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar, serta dipublikasikan agar bisa diakses oleh publik.

3) Waktu pelaksanaan.

Berisikan tentang jadwal waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pencapaian TPB/SDGs tahunan dan lima tahunan.

BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs, termasuk keterlibatan berbagai pihak dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Universal: Dilaksanakan oleh seluruh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang
2. Integration: Dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (saling terkait)
3. No-One Left Behind: Dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua terutama yang rentan. Prinsip-prinsip kemitraan TPB/SDGs antar pemangku kepentingan adalah sebagai berikut: Membangun kepercayaan (trust building); kemitraan yang setara; partisipasi; akuntabel; dan saling menguntungkan.

6. LAMPIRAN

Pada bagian ini terdiri atas dua lampiran yaitu:

1. Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah

Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, Output Kegiatan, Indikasi Anggaran, sumber pendanaan, dan instansi pelaksana yang dilaksanakan oleh pemerintah.

2. Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah

Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, Output Kegiatan, Indikasi Anggaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta lokasi yang menjelaskan tentang tempat kegiatan dilaksanakan (sesuai dengan wilayah administrasi pelaksanaan kegiatan misalnya nama Provinsi, Kabupaten, Kecamatan) yang dilaksanakan oleh organisasi non pemerintah.

BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs

2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi. Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan. Dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan nasional, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga mengalami penurunan dari 13,33% pada tahun 2010 menjadi 10,64% pada tahun 2017 (BPS, angka Maret). Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 31,02 juta penduduk pada tahun 2010 menjadi 27,7 juta penduduk yang berarti secara rata-rata, jumlah penduduk miskin menurun 600 ribu jiwa/tahun.

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia dihadapkan pada laju penurunan angka kemiskinan yang semakin melambat. Selama kurun waktu 2010-2017, rata-rata laju penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 0,44%. Laju penurunan angka kemiskinan tertinggi dicapai pada tahun 2011 dengan penurunan sebesar 0,84%, sementara laju penurunan terendah sebesar 0,03% terjadi pada tahun 2015. Laju penurunan angka kemiskinan di wilayah perdesaan cenderung lebih lambat dibandingkan dengan wilayah perkotaan pada periode 2015-2016.

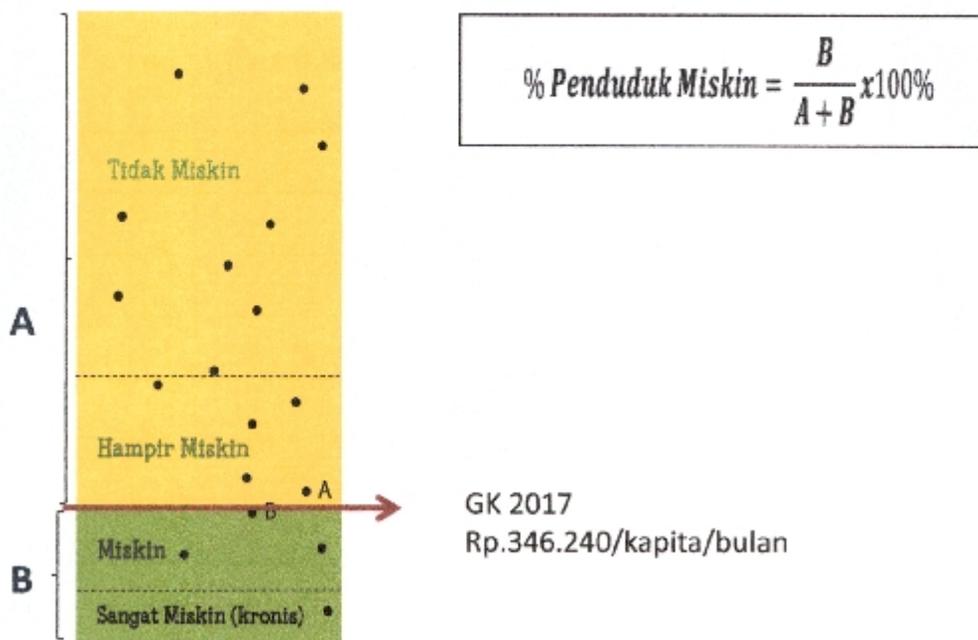
Garis Kemiskinan

Penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan dan dinyatakan dalam rupiah per bulan per kapita.

Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum

Pengertian hidup layak secara minimum diwakili oleh 20% kelompok terbawah penduduk tidak miskin yang disebut sebagai **kelompok acuan**.

Definisi Operasional Garis Kemiskinan adalah harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya



- ✓ Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (warna hijau pada gambar).
- ✓ Penduduk miskin Kabupaten Cirebon adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp 346.240,00 (kondisi 2017).
- ✓ Data jumlah penduduk miskin ini didapatkan dari pendataan **Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas)** yang dilakukan BPS setiap tahun. Karena data yang dikumpulkan merupakan **data sampel**, angka yang didapatkan dari pendataan ini merupakan **hasil estimasi**.

| No | Kab/Kota | Tahun 2015 | | | Tahun 2016 | | | Tahun 2017 | | |
|----|--------------|--------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------|
| | | Jml Penddk miskin (Jiwa) | % | Garis kemiskinan (Rp/Kap/bln) | Jml Penddk miskin (Jiwa) | % | Garis kemiskinan (Rp/Kap/bln) | Jml Penddk miskin (Jiwa) | % | Garis kemiskinan (Rp/Kap/bln) |
| 1 | Kota Cirebon | 31.740 | 10,36 | 358.654 | 30.150 | 9,73 | 373.866 | 30.190 | 9,66 | 392.725 |
| 2 | Kab Cirebon | 313.210 | 14,77 | 327.032 | 288.490 | 13,49 | 333.758 | 279.550 | 12,97 | 346.240 |
| 3 | Indramayu | 253.120 | 14,98 | 379.088 | 237.000 | 13,95 | 397.196 | 233.380 | 13,67 | 413.857 |
| 4 | Majalengka | 167.500 | 14,19 | 379.354 | 152.500 | 12,85 | 393.071 | 150.260 | 12,60 | 409.559 |
| 5 | Kuningan | 147.210 | 13,97 | 276.154 | 144.070 | 13,59 | 289.901 | 141.550 | 13,27 | 302.061 |

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan tingkat keparahan dari kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan

| Kabupaten/Kota | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| Kab. Kuningan | 1,91 | 1,91 | 2,20 | 2,32 | 2,20 | 2,00 |
| Kab. Cirebon | 2,15 | 2,15 | 2,22 | 2,42 | 2,21 | 2,13 |
| Kab. Majalengka | 2,51 | 2,52 | 1,98 | 2,34 | 2,06 | 1,93 |
| Kab. Indramayu | 2,12 | 2,12 | 1,96 | 2,37 | 1,69 | 2,34 |
| Kota. Cirebon | 1,65 | 1,65 | 1,07 | 1,28 | 1,86 | 1,56 |
| Jawa Barat | 1,62 | 1,62 | 1,39 | 1,63 | 1,49 | 1,45 |

Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin

Indeks Keparahan Kemiskinan

| Kabupaten/Kota | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| Kab. Kuningan | 0,47 | 0,48 | 0,53 | 0,62 | 0,59 | 0,44 |
| Kab. Cirebon | 0,51 | 0,51 | 0,56 | 0,57 | 0,5 | 0,5 |
| Kab. Majalengka | 0,69 | 0,69 | 0,48 | 0,6 | 0,52 | 0,45 |
| Kab. Indramayu | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,62 | 0,37 | 0,66 |
| Kota. Cirebon | 0,38 | 0,38 | 0,18 | 0,26 | 0,49 | 0,43 |
| Jawa Barat | 0,42 | 0,42 | 0,33 | 0,43 | 0,37 | 0,37 |

REKAP RUMAH TANGGA YANG TERMASUK DALAM DESIL 1 (Sangat Miskin), Desil 2 (Miskin) Desil 3 (Hampir Miskin) S.D DESIL 4+ (Rentan Miskin)

BASIS DATA TERPADU (BDT) 2017 KABUPATEN CIREBON

| No | Kecamatan | Desil 1 | Desil 2 | Desil 3 | Desil 4 | Desil 4+ | Jumlah |
|----|---------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|
| 1 | GEBANG | 3367 | 2555 | 1661 | 352 | 358 | 8,293 |
| 2 | WALED | 3187 | 2653 | 2031 | 515 | 779 | 9,165 |
| 3 | GREGED | 3170 | 2190 | 1165 | 250 | 292 | 7,067 |
| 4 | BABAKAN | 3095 | 3269 | 2347 | 380 | 299 | 9,390 |
| 5 | MUNDU | 2854 | 3448 | 2725 | 719 | 998 | 10,744 |
| 6 | WERU | 2583 | 2783 | 2252 | 727 | 931 | 9,276 |
| 7 | LOSARI | 2512 | 3170 | 2513 | 740 | 919 | 9,854 |
| 8 | DUKUPUNTANG | 2450 | 3794 | 3168 | 835 | 1165 | 11,412 |
| 9 | PABEDILAN | 2309 | 3344 | 2558 | 601 | 509 | 9,321 |
| 10 | GEGESIK | 2308 | 3915 | 3818 | 1086 | 1186 | 12,313 |
| 11 | SUMBER | 2225 | 2672 | 2388 | 803 | 1485 | 9,573 |
| 12 | KLANGENAN | 2207 | 2419 | 1850 | 460 | 614 | 7,550 |
| 13 | KAPETAKAN | 1946 | 1678 | 1004 | 187 | 162 | 4,977 |
| 14 | TALUN | 1867 | 2112 | 1744 | 603 | 873 | 7,199 |
| 15 | DEPOK | 1783 | 2689 | 2264 | 620 | 953 | 8,309 |
| 16 | ASTANAJAPURA | 1780 | 1800 | 1422 | 465 | 854 | 6,321 |
| 17 | BEBER | 1760 | 1536 | 1083 | 356 | 460 | 5,195 |
| 18 | ARJAWINANGUN | 1693 | 2363 | 1945 | 581 | 767 | 7,349 |
| 19 | PLUMBON | 1687 | 3021 | 3258 | 1141 | 2287 | 11,394 |
| 20 | SUSUKAN | 1654 | 2730 | 2570 | 749 | 563 | 8,266 |
| 21 | PALIMANAN | 1653 | 2213 | 1892 | 653 | 1067 | 7,478 |
| 22 | PANGENAN | 1589 | 1455 | 945 | 175 | 143 | 4,307 |
| 23 | PANGURAGAN | 1580 | 2139 | 1608 | 436 | 306 | 6,069 |
| 24 | SEDONG | 1573 | 2025 | 1481 | 342 | 244 | 5,665 |
| 25 | GEMPOL | 1531 | 1806 | 1542 | 461 | 808 | 6,148 |
| 26 | LEMAHABANG | 1518 | 1808 | 1367 | 477 | 780 | 5,950 |
| 27 | CILEDUG | 1489 | 2098 | 1893 | 544 | 945 | 6,969 |
| 28 | PLERED | 1472 | 1356 | 1098 | 329 | 502 | 4,757 |
| 29 | SURANENGGALA | 1437 | 1740 | 1361 | 358 | 371 | 5,267 |
| 30 | JAMBLANG | 1430 | 1360 | 1091 | 221 | 345 | 4,447 |
| 31 | KARANGSEMBUNG | 1396 | 2075 | 1771 | 514 | 569 | 6,325 |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 32 | KARANGWARENG | 1380 | 1874 | 1424 | 357 | 367 | 5,402 |
| 33 | KALIWEDI | 1312 | 2009 | 1872 | 526 | 652 | 6,371 |
| 34 | PABUARAN | 1218 | 1613 | 1367 | 365 | 402 | 4,965 |
| 35 | PASALEMAN | 1194 | 1685 | 1352 | 313 | 249 | 4,793 |
| 36 | SUSUKAN LEBAK | 1046 | 1416 | 1060 | 308 | 423 | 4,253 |
| 37 | TENGAHTANI | 901 | 798 | 595 | 165 | 288 | 2,747 |
| 38 | KEDAWUNG | 827 | 1354 | 1417 | 597 | 1416 | 5,611 |
| 39 | GUNUNGJATI | 688 | 823 | 720 | 211 | 488 | 2,930 |
| 40 | CIWARINGIN | 674 | 1108 | 1104 | 312 | 499 | 3,697 |
| JUMLAH | | 72,345 | 86,896 | 70,726 | 19,834 | 27,318 | 277,119 |

sumber : TNP2K

Isu lain terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan adalah terjadinya laju pertumbuhan pengeluaran kelompok menengah ke bawah yang lebih rendah dari pada rata-rata nasional. Secara umum, selama periode Maret 2016 terhadap Maret 2017, rata-rata pertumbuhan konsumsi masyarakat adalah 9,54%. Pertumbuhan konsumsi antarkelompok pengeluaran bervariasi yang diindikasikan dengan kelompok 10% teratas mengalami pertumbuhan terendah, yaitu sebesar 6,92%. Terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, yang perlu mendapat perhatian adalah rendahnya pertumbuhan konsumsi pada 20% kelompok pengeluaran terbawah. Rendahnya pertumbuhan konsumsi tersebut secara tidak langsung menghambat upaya penanggulangan kemiskinan dan menandakan perlunya upaya peningkatan pendapatan agar konsumsi kelompok 20% terbawah mengalami peningkatan.

Upaya pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menurunkan angka kemiskinan. Peningkatan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali, terutama pada komponen pembentuk garis kemiskinan memperlambat upaya penanggulangan kemiskinan nasional. Selama tiga periode publikasi angka kemiskinan nasional yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan garis kemiskinan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi secara umum. Bahkan pada periode September 2016 terhadap Maret 2017 menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi kelompok 10% terbawah lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan garis kemiskinan.

Upaya menurunkan angka kemiskinan dihadapkan pada tantangan dimensi lainnya, yaitu rendahnya intensitas program penanggulangan kemiskinan yang berbasis penciptaan pendapatan. Upaya terkait dengan meringankan beban pengeluaran telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program perlindungan sosial antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Sejahtera (Rastra), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Sehat (PIS). Namun, upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masih relatif rendah. Upaya yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini antara lain Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Upaya tersebut sejauh ini masih belum optimal yang tercermin dari masih rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok 40% terbawah dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Sistem Perlindungan Sosial Nasional. Sampai dengan Desember 2017, jumlah peserta JKN adalah 187,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92,4 juta jiwa (49,14%) peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN. Sementara, peserta PBI

JKN dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 20,3 juta jiwa (10,8%). Secara kumulatif, peserta JKN yang dibiayai oleh pemerintah sebagai penerima bantuan iuran (APBN dan APBD) mencapai 112,7 juta jiwa peserta atau hampir 60% dari total peserta. Sementara Pekerja Penerima Upah (PPU) JKN hanya mencapai 44,9 juta atau 23,8%. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan adalah rendahnya peserta yang termasuk dalam kategori mandiri, hanya sekitar 16% dari seluruh peserta aktif. Sementara itu masih terdapat 30% penduduk di Indonesia yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.

Jumlah peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada Desember 2017 sekitar 26,2 juta pekerja. Kepesertaan tersebut mengalami peningkatan sekitar 15,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, tingkat kepesertaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan relatif rendah yaitu sekitar 21,68% dari seluruh pekerja aktif di Indonesia. Tantangan bagi penyediaan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan adalah memperluas cakupan kepesertaan pada sektor informal yaitu dalam kelompok pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri.

Akses Terhadap Pelayanan Dasar untuk Penduduk Kelompok 40% Terbawah. Akses pelayanan kesehatan di Indonesia mengalami peningkatan pada beberapa aspek. Pada aspek aksesibilitas persalinan yang ditolong oleh fasilitas kesehatan, meningkat dari 79,82% pada tahun 2010 menjadi 74,89% pada tahun 2017. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB cenderung menurun, yaitu sebesar 69,94% pada tahun 2010 menjadi 59,7% pada tahun 2017. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Indonesia pada aspek pemenuhan hak reproduksi yang berdampak pada pertumbuhan penduduk, disamping adanya kesenjangan pencapaian aksesibilitas kesehatan antarwilayah.

Aksesibilitas penduduk terhadap kebutuhan dasar perumahan mengalami peningkatan. Pada aspek pemenuhan kebutuhan sumber air minum yang layak meningkat menjadi 62,75% pada tahun 2017. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 46,26%. Disisi lain, akses terhadap sanitasi layak juga mengalami peningkatan dari 35,06% pada tahun 2010 menjadi sebesar 53,81% pada tahun 2017. Ketiga indikator aksesibilitas kebutuhan perumahan yang memadai menunjukkan kecenderungan yang positif. Meskipun demikian, terdapat permasalahan jika ditinjau dari aspek kewilayahan, karena masih terjadi kesenjangan aksesibilitas kebutuhan dasar perumahan antarprovinsi dan antarwilayah perkotaan dan perdesaan. Indonesia sampai dengan saat ini masih dihadapkan pada pemenuhan pemerataan aksesibilitas perumahan yang layak antarwilayah. Selain itu, pemenuhan kebutuhan penerangan yang bersumber dari listrik PLN juga mengalami peningkatan menjadi 94,52% pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 90,23% pada tahun 2010.

Akses Pelayanan Pendidikan, telah terjadi peningkatan partisipasi pendidikan yang ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. Namun, pendidikan dasar setingkat SD/MI/Sederajat APM hanya mengalami sedikit peningkatan dibandingkan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 2,80%, atau meningkat menjadi 97,21% pada tahun 2017 dari sebelumnya 94,41% pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah bersekolah. Peningkatan APM cukup signifikan terlihat pada jenjang pendidikan menengah pertama atau SMP/MTs/Sederajat yaitu sebesar 13,04% dari sebelumnya 63,51% pada tahun 2010 yang meningkat menjadi 76,55% pada tahun 2017. Hal yang sama terjadi juga pada jenjang pendidikan menengah atas

yaitu SMA/SMK/MA/ sederajat yang ditunjukkan dengan APM pada tahun 2010 adalah 32,30%, pada tahun 2017 meningkat menjadi 52,21%.

Capaian Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni pada RPJMD Kab Cirebon 2014-2019

| Indikator Kinerja | Satuan | % Capaian Kinerja 2015 | | | % Capaian Kinerja 2016 | | | % Capaian Kinerja RPJMD | |
|-------------------|--------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Target 2015 | Realisasi 2015 | % Capaian Kinerja 2015 | Target 2016 | Realisasi 2016 | % Capaian Kinerja 2016 | Target akhir RPJMD | % Capaian Kinerja RPJMD |
| - APM SD/MI | % | 99.92 | 99.98 | 100.06 | 99.93 | 96.47 | 96.54 | 99.96 | 96.51 |
| - APM SMP/MTs | % | 89.7 | 78.97 | 88.04 | 89.9 | 78.05 | 86.82 | 90.5 | 86.24 |
| - APM SMA/MA | % | 60.84 | 85.31 | 140.22 | 61.32 | 37.39 | 60.98 | 62.76 | 59.58 |
| - APM SMK | % | 46.95 | 59.88 | 127.54 | 47.45 | 71.41 | 150.50 | 48.95 | 145.88 |

Masalah yang masih dihadapi Indonesia terkait dengan aksesibilitas pendidikan adalah disparitas antarwilayah, terutama untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan atas.

2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Menghilangkan Kelaparan. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari atau penduduk sangat rawan pangan, selama tahun 2011-2016 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012, proporsi tersebut adalah sebesar 19,54% dan terus menurun menjadi sebesar 12,69% pada tahun 2016 (Susenas). Pola yang sama terjadi pada seluruh kelompok pendapatan. Pada kelompok penduduk termiskin (kuintil 1), proporsi penduduk rawan pangan pada tahun 2011 adalah sebesar 37,3%, kemudian meningkat menjadi 41,8% (2012), dan selanjutnya menurun hingga menjadi 32,8% (2016). Selain itu, masih ditemukan penduduk dengan konsumsi kalori perkapita per hari <1400 kkal pada kelompok pendapatan tertinggi (kuintil 5).

Dari sisi kebutuhan pangan, masalah dan tantangan yang dihadapi antara lain: (1) permintaan pangan dalam hal: jumlah, keragaman, kualitas, kandungan gizi, serta keamanan pangan, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan rumah tangga, dan pengetahuan gizi masyarakat; (2) permintaan makanan jadi dan kebiasaan makan di luar rumah meningkat sejalan dengan urbanisasi dan meningkatnya proporsi perempuan bekerja; dan (3) akses pangan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil termasuk pulau-pulau kecil (akses fisik) dan bagi masyarakat berpendapatan rendah (akses ekonomi) masih terbatas.

Berdasarkan pendekatan angka kecukupan gizi sebesar 2.200 kkal/kap/hari, maka diketahui tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Cirebon digolongkan dalam tiga kelompok yakni tahan pangan, pangan rawan dan sangat rawan pangan. Perkembangan tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Cirebon sebagaimana tabel berikut.

Tabel Angka Kerawanan Pangan Kabupaten Cirebon

| No. | Tahun | < 70% AKG | 70% - 89,9% AKG | > 90% AKG |
|-----|-------|-----------|-----------------|-----------|
| 1 | 2013 | 13,15 | 35,00 | 51,85 |
| 2 | 2014 | 9,59 | 27,74 | 62,67 |
| 3 | 2015 | 11,37 | 21,55 | 67,08 |
| 4 | 2016 | 13,23 | 23,07 | 63,70 |

Sumber : BPS Kabupaten Cirebon dalam Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, 2016

Keterangan : AKG : Angka Kecukupan Gizi (2.200 kkal/kap/hari)

< 70% AKG : Sangat Rawan Pangan

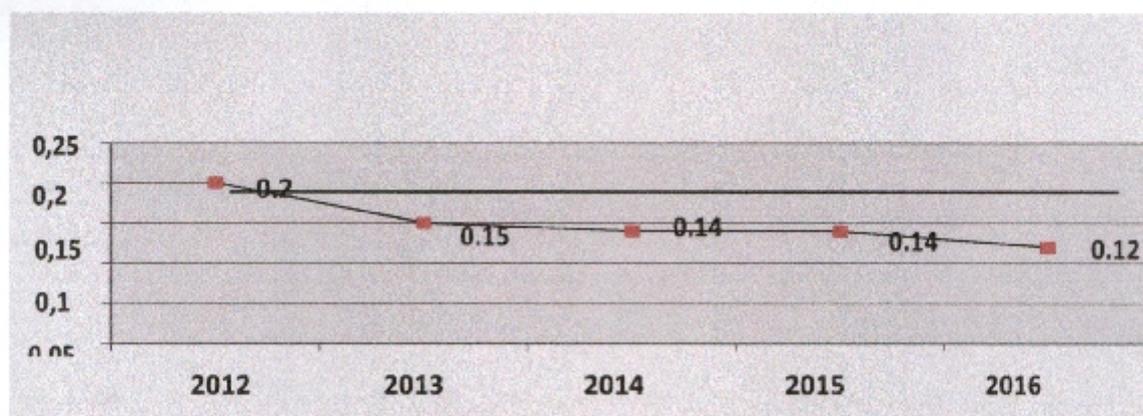
70% - 89,9% AKG : Rawan Pangan

> 90% AKG : Tahan Pangan

Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi. Prevalensi stunting pada anak bayi di bawah lima tahun (balita) dan bayi di bawah dua tahun (baduta) masih cukup tinggi, walaupun menunjukkan kecenderungan yang menurun selama periode 2010-2016. Pada tahun 2016 proporsi stunting pada anak balita adalah sebesar 33,6% (Sirkesnas) menurun dari angka 35,6% (Riskesdas, 2010). Sementara pada anak baduta, proporsi stunting adalah sebesar 26,1% (Sirkesnas, 2016) menurun dari 32,9% (Riskesdas, 2013). Sementara itu, prevalensi balita kurus menurun cukup signifikan dari 13,3% (Riskesdas, 2010) menjadi 9,8% (Sirkesnas, 2016).

Pengukuran status Gizi dilakukan pada saat Bulan Penimbangan Balita serentak pada bulan Agustus. Untuk menilai status gizi balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Variabel BB dan TB disajikan dalam bentuk tiga indikator antropometri, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) Kabupaten Cirebon tahun 2016 berdasarkan indikator BB/ TB (berat badan /tinggi badan) memberikan gambaran balita kurus sekali sebanyak 225 (0,12 %), balita kurus sebanyak 8551 (4,66 %), balita normal sebanyak 168.450 (91,73 %) dan balita gemuk sebanyak 6.403 (3,49 %). Sebagai pembandingan kondisi tahun 2015 yang mencapai 246 (0,14 %), balita kurus sebanyak 7.472 (4,14 % orang), balita normal sebanyak 167.012 (92,57%) dan balita gemuk sebanyak 5.710 (3,17%). Berikut adalah trend status gizi kurus sekali berdasarkan penghitungan berat badan dibagi tinggi badan pada balita di Kabupaten Cirebon.

Grafik Jumlah Balita dengan Status Gizi Kurus Sekali Berdasarkan Standar BB/TB di Kabupaten Cirebon Tahun 2012 - 2016



Sumber :Bulan Penimbangan Balita (BPB) tahun 2016 Ket :BB/TB =Berat Badan per Tinggi Badan

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan pada tahun 2013 Prevalensi status Gizi pada anak usia 5 – 12 tahun di Kabupaten Cirebon yaitu kategori sangat pendek 12,5 %, Pendek 14,5 % dan normal 73 %. Prevalensi status gizi pada anak remaja (1315 tahun), kategori sangat pendek 19,4 %, pendek 28,2 % dan normal 52,4 %.

Salah satu faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi status gizi balita adalah status gizi ibu hamil dan pola pemberian ASI eksklusif.

Status gizi pada ibu hamil sangat penting karena berhubungan secara tidak langsung dengan indikator kesehatan. Status gizi pada ibu hamil antara lain dilihat dari kadar Hemoglobin dan pengukuran lingkaran lengan atas untuk melihat apakah ibu hamil termasuk kategori KEK (Kurang Energi Kronik) atau bukan. Standar kadar Hemoglobin yang harus dicapai oleh ibu hamil adalah > 11 gr % jika kurang dari angka tersebut ibu hamil dinyatakan dalam kondisi anemia, sedangkan

standar lingkaran lengan sekurang-kurangnya 23,5 cm. Tahun 2016, menurut laporan puskesmas, Jumlah ibu hamil dengan Lingkaran Lengan (LILA) kurang dari 23,5 cm sebanyak 4.829 (8,99 %) mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang mencapai 3.774 (7,0%) dan tahun 2014 mencapai 3.229 (5,9%). Pada pemeriksaan kadar Haemoglobin tahun 2016 jumlah ibu hamil dengan kadar Hb kurang dari 11 gr % sebanyak 5.994 (11,16 %) mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang mencapai 5.691 (10,56 %), tahun 2014 mencapai 4.828 (8,95 %). Menurut hasil Riskesdas tahun 2013 prevalensi KEK pada ibu hamil di Kabupaten Cirebon 6,7 %.

Permasalahan kekurangan gizi pada anak erat kaitannya dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Rendahnya ketahanan pangan rumah tangga dapat menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas asupan gizi anak. Faktor lain yang mempengaruhi adalah buruknya pola asuh terutama pemberian makanan bayi dan balita yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orangtua, buruknya kondisi lingkungan seperti akses sanitasi dan air bersih, dan rendahnya akses pada fasilitas kesehatan.

Di sisi lain, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada prevalensi obesitas (kegemukan). Pada tahun 2013, 11,8% anak balita mengalami obesitas. Hal yang sama terjadi pada penduduk dewasa (usia lebih dari 18 tahun). Prevalensi obesitas pada kelompok ini meningkat dari 11,7% (Riskesdas, 2010) menjadi 15,4% (Riskesdas, 2013), dan meningkat kembali menjadi 20,7% (Sirkesnas, 2016). Dengan memperhatikan masalah gizi, saat ini Indonesia menghadapi beban ganda permasalahan gizi, yaitu permasalahan gizi kurang dan gizi lebih.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat diukur dengan skor Pola Pangan Harapan/PPH (Desirable Dietary Pattern). Skor PPH ideal adalah 100 yang menggambarkan komposisi kelompok pangan utama yang dapat memenuhi kebutuhan kalori dan zat gizi lainnya untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Selama periode 2009-2016 kualitas konsumsi pangan masyarakat berfluktuasi, dengan rata-rata sebesar 82,9% dan pada tahun 2016 skor PPH mencapai 86,0% (Badan Ketahanan Pangan). Pengetahuan pangan dan gizi masyarakat dalam pengembangan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang (B2SA) masih rendah. Hal inilah yang mempengaruhi pola permintaan pangan rumah tangga yang belum berkualitas.

Mengandalkan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan. Pada periode 2010-2016, produksi padi meningkat rata-rata per tahun sekitar 2,99% dan jagung 4,27%, sementara produksi kedelai cenderung menurun. Untuk bawang merah dan cabai (cabai besar dan cabai merah) rata-rata pertumbuhan cukup tinggi, yaitu 5,82% per tahun dan 8,81% per tahun.

Produksi sumber protein hewani asal ternak yaitu daging sapi, daging ayam, dan daging lainnya rata-rata setiap tahun meningkat sebesar 4,27% dan telur (ayam ras, ayam kampung, itik/bebek, dan puyuh) sebesar 6,35%. Produksi sumber protein hewani asal ikan pertumbuhannya meningkat pesat, yaitu untuk perikanan tangkap rata-rata per tahun sebesar 4,06% dan perikanan budidaya sekitar 18,30% (Pusat Data dan Statistik Pertanian, Kementan; dan Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP).

Dalam penyediaan pangan, tantangan dan masalah yang dihadapi antara lain: (1) konversi lahan pertanian pangan terus berlangsung sementara perluasan/pembukaan lahan pertanian terbatas; (2) degradasi kualitas sumber daya air dan perairan serta meningkatnya persaingan pemanfaatan air dengan penggunaan lain; (3) usaha pertanian pangan didominasi usaha tani skala kecil dengan rata-rata usia petani yang semakin tua (aging farmer) dan pendidikan formal yang relatif rendah, yang mengakibatkan akses pada sumber teknologi,

informasi, pasar, dan pembiayaan usaha terbatas; (4) frekuensi dan intensitas kejadian perubahan iklim ekstrim semakin tinggi; (5) proporsi kehilangan hasil dan pemborosan pangan (food losses and waste) masih besar; (6) prasarana logistik dan distribusi pangan belum merata terutama di wilayah timur Indonesia, menyebabkan kecukupan dan kontinuitas penyediaan pangan terbatas dan berdampak pada risiko rentan pangan di wilayah tersebut; dan (7) kemitraan yang setara antara usaha pertanian skala kecil dan besar masih sangat terbatas.

Dalam upaya mencapai pertanian berkelanjutan, pemerintah melepas varietas unggul tanaman pangan yang sesuai dengan agroekosistem dan mampu merespon perubahan lingkungan. Sejak pertengahan tahun 1970-an, Indonesia mulai mengembangkan berbagai varietas unggul baru (VUB) tanaman pangan bekerja sama dengan lembaga penelitian internasional. Sampai dengan tahun 2015, telah dilepas lebih dari 400 VUB padi inbrida hasil pemuliaan para peneliti (pemulia atau breeder) Indonesia dan 100 VUB padi hibrida yang dihasilkan peneliti Indonesia dan yang diintroduksi oleh perusahaan multinasional. Selama periode 2010-2016, pemerintah telah melepas 60 VUB padi, 31 VUB jagung, dan 11 VUB kedelai hasil para peneliti nasional (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian/Balitbangtan). Untuk tanaman padi, VUB dirancang untuk dimanfaatkan pada berbagai agroekosistem, yaitu 35 varietas di lahan irigasi, 10 varietas di lahan tadah hujan/kering, dan 6 varietas di lahan rawa. Untuk tanaman jagung, dari 31 VUB sebanyak 9 varietas berupa jenis VUB hibrida.

Untuk proporsi hewan ternak dan sejenisnya yang diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan, sejak 1998 Balitbangtan telah melakukan eksplorasi sumber daya genetik hewan ternak lokal rumpun ayam, itik, dan domba. Berdasarkan hasil eksplorasi dan identifikasi karakterisasi sifat-sifat produksi ternak, selanjutnya dilakukan serangkaian proses seleksi untuk mendapatkan rumpun atau galur ternak yang menghasilkan bibit unggul. Melalui proses pemuliaan ternak ini, pada tahun 2014-2016 telah dilepas satu bibit unggul ayam lokal petelur, satu bibit unggul ayam pedaging, dua itik unggul, dan satu ternak domba komposit Sumatera (komposisi genetik 50% domba lokal, 25% St. Croix, 25 Barbados Blackbelly).

2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI). Salah satu upaya kunci yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi AKI adalah memastikan setiap persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan. Menurut SDKI, persalinan di fasilitas kesehatan meningkat dari 46% (2007) menjadi 63,2% (2012). Selanjutnya, data Susenas menunjukkan peningkatan menjadi 77,6% (2015) dan 79,7% (2016). Proporsi kelahiran yang dibantu oleh tenaga medis profesional berdasarkan SDKI juga meningkat dari 73% (2007) menjadi 83% (2012). Pada akhir pelaksanaan MDGs (2015), AKI telah menurun dari 346 kematian (SP 2010) menjadi 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015), yang berarti penurunan sebesar 2,4% setiap tahun (Annual Reduction Rate/ARR). Target RPJMN pada tahun 2019 sebesar 306 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup telah tercapai. Dibutuhkan ARR sebesar 9,5% untuk mencapai target TPB/SDGs AKI yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Angka kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) menggambarkan besarnya risiko kematian ibu pada fase kehamilan, persalinan dan masa nifas di antara 100 ribu kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada kurun waktutertentu. Seperti Angka Kematian Bayi dan Balita, Angka kematian Ibu tidak dapat dihasilkan rutin setiap tahun dari pelaporan Fasilitas Kesehatan, tetapi merupakan

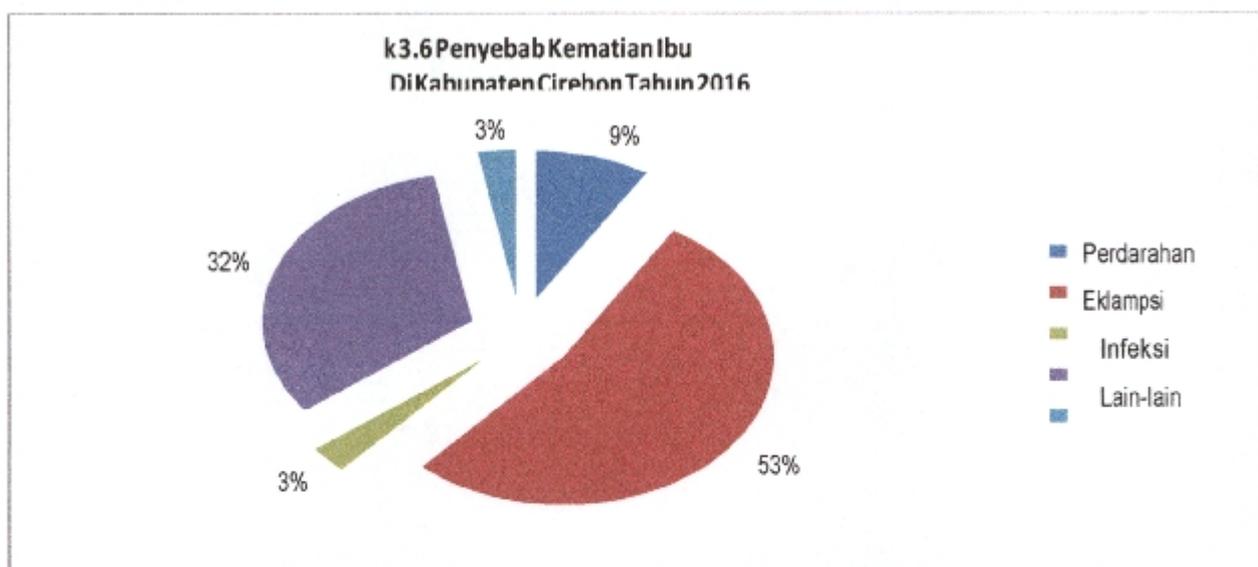
hasil Survey yang penghitungannya dihasilkan dari Survey oleh BPS Pusat. Selain itu AKI hasil Survey tidak menampilkan angka di level Kabupaten, hanya sampai dengan tingkat Provinsi. Angka Kematian Ibu Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil SKRT tahun 1992 adalah 425 per 100.000 kelahiran hidup, dari hasil survei tersebut diketahui jumlah kematian ibu terbesar terjadi pada saat melahirkan. Sedangkan berdasarkan SKRT Tahun 1995 AKI Nasional 373 per 100.000 Kelahiran Hidup. Menurut pemetaan AKI di Jawa Barat berdasarkan Survei AKI 2003 BPS Provinsi Jawa Barat menunjukkan AKI terbesar di wilayah Pantura dan Cirebon (Indramayu, Cirebon, Majalengka dan Kuningan) sebesar 366,80 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan yang terkecil di Bandung Raya dan Bodebek (Bogor, Depok dan Bekasi) yaitu 296,17 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKI Provinsi Jawa Barat 2003 sebesar 321,15 per 100.000 kelahiran hidup. Hasil SDKI tahun 2007 Angka Kematian Ibu di Jawa Barat sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Pada SDKI 2012 Angka Kematian Ibu Provinsi Jawa Barat 359 per 100.000 Kelahiran Hidup. (Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2012).

Berdasarkan pelaporan puskesmas jumlah kematian ibu maternal (ibu hamil, melahirkan dan ibu nifas) yang dilaporkan dapat dilihat pada table berikut. Tabel 3.2 Jumlah Kematian Ibu maternal dan Kelahiran Hidup di Kabupaten Cirebon Tahun 2012-2016

| Jumlah | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Thn 2016 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Kematian Ibu | 65 | 56 | 49 | 53 | 48 |
| Kelahiran hidup | 47.040 | 46.657 | 47.732 | 47.533 | 47.115 |

Dari 40 kecamatan terdapat jumlah kematian ibu paling besar di Kecamatan Gegecik 5 orang dan Kecamatan Palimanan 4 orang disusul Kecamatan Babakan dan Kamarang masing-masing 3 orang. Kecamatan-kecamatan lain jumlah kematian ibu dibawah 3 orang.

Proporsi penyebab kematian ibu di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada grafik berikut



Sumber : Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 2016

Penyebab kematian lain-lain paling banyak, ini merupakan kumpulan dari beberapa macam jenis penyebab kematian seperti penyakit jantung, emboli dan penyebab lain yang jumlahnya tidak dominan. Perdarahan dan Eklamsia selalu merupakan penyebab tertinggi setiap tahunnya.

Berdasarkan fasenya kematian ibu maternal yaitu kematian pada ibu hamil sebanyak 13 (27,1 %) dan ibu bersalin 9 (18,8%) dan ibu nifas 26 (54,16 %). Proporsi paling besar terjadi kematian pada fase nifas yang mencapai 54,16 %. Dengan kondisi seperti ini maka petugas seharusnya lebih meningkatkan kegiatan kunjungan pada ibu nifas atau Post Natal Care (PNC) secara kuantitas maupun kualitasnya.

Kematian ibu berdasarkan tingkat pendidikan ibu, adalah Tamat SD sebanyak 20 orang (41,67 %), Tamat SMP sebanyak 14 orang (29,16 %), SMA = 13 orang (27,8 %), Perguruan tinggi 1 orang (2,08 %). Berdasarkan kelompok umur ibu, < 20 tahun sebanyak 4 orang (8,33 %), umur ibu 20-35 tahun sebanyak 38 (79,16 %). Dan umur ibu > 35 tahun sebanyak 6 (12,5 %). Kematian ibu terbanyak pada ibu tamat SD 41,67 %, hal ini dapat dimungkinkan bahwa paling banyak dari pendidikan ibu (bumil, bulin dan bufas) adalah tamat SD sehingga kematian juga didominasi yang hanya tamat SD.

Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKBa) terus menurun, walaupun melambat sejak tahun 2002. Sementara itu, Angka Kematian Neonatal (AKN) mengalami stagnasi sejak tahun 2007, dengan ARR sebesar 0,5% per tahun. Dibutuhkan ARR sebesar 3% untuk mencapai target TPB/SDGs sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup pada 2030.

Berdasarkan laporan rutin dari fasilitas kesehatan (Service Based) jumlah kematian bayi di Kabupaten Cirebon 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

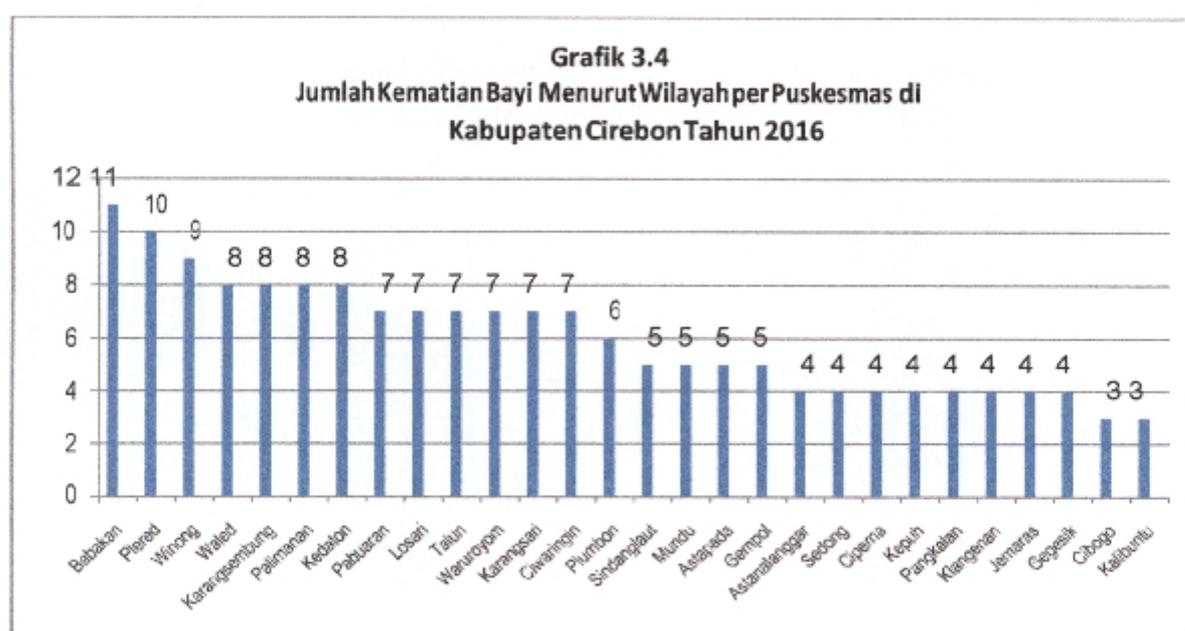
Tabel 3.1

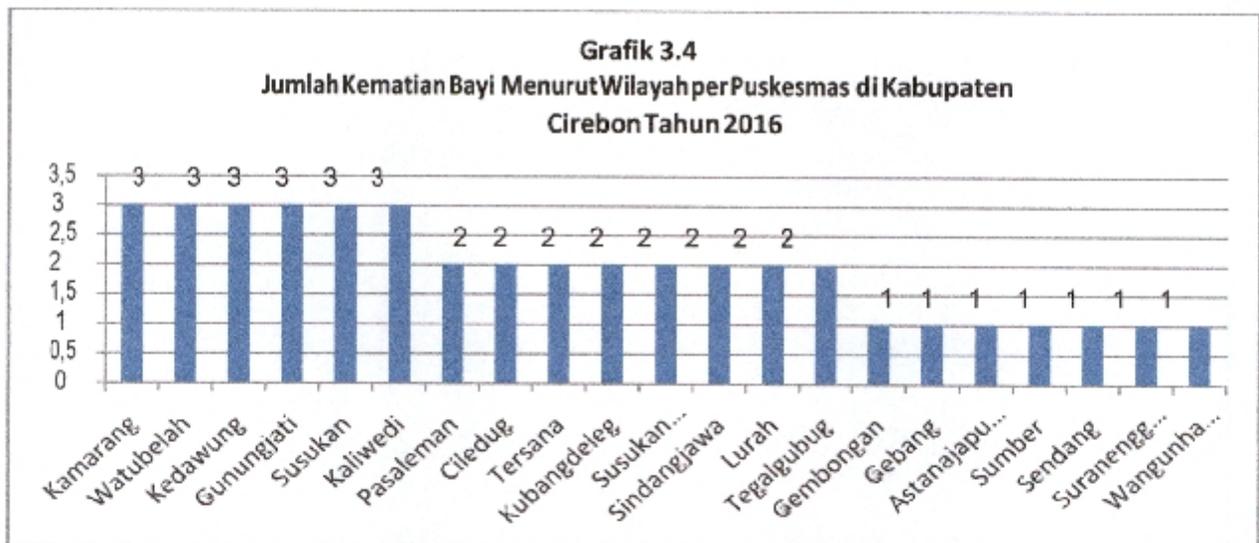
Kematian Bayi dan Kelahiran Hidup di Kabupaten Cirebon
Tahun 2012 - 2016

| Jumlah | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kematian Bayi | 235 | 227 | 206 | 210 | 209 |
| Kelahiran Hidup | 47.040 | 46.657 | 47.732 | 47.533 | 47.115 |
| Per 1000KH | 4,99 | 4,86 | 4,32 | 4,40 | 4,40 |

Sumber : Bidang Kesga Dinas Kesehatan Kab. Cirebon, 2016

Kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup (dilaporkan), tahun 2016 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Jika dibandingkan dengan keadaan Kabupaten /Kota lain di Jawa Barat, angka Kematian Bayi Kabupaten Cirebon tahun 2015 berada pada urutan ke 13.





Pada tahun 2016 jumlah kematian bayi yang terlapor di Puskesmas sebanyak 209 terdiri dari 168 kematian pada neonatal (0-29 hari) dan kematian bayi usia 1-12 bulan sebanyak 40. Jika dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 47.115 maka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup adalah 4,43 per 1000 KH. Penyebab kematian terbesar pada bayi yaitu BBLR sebanyak 57 anak (27,3%), dan Asphixia sebanyak 48 (23%).

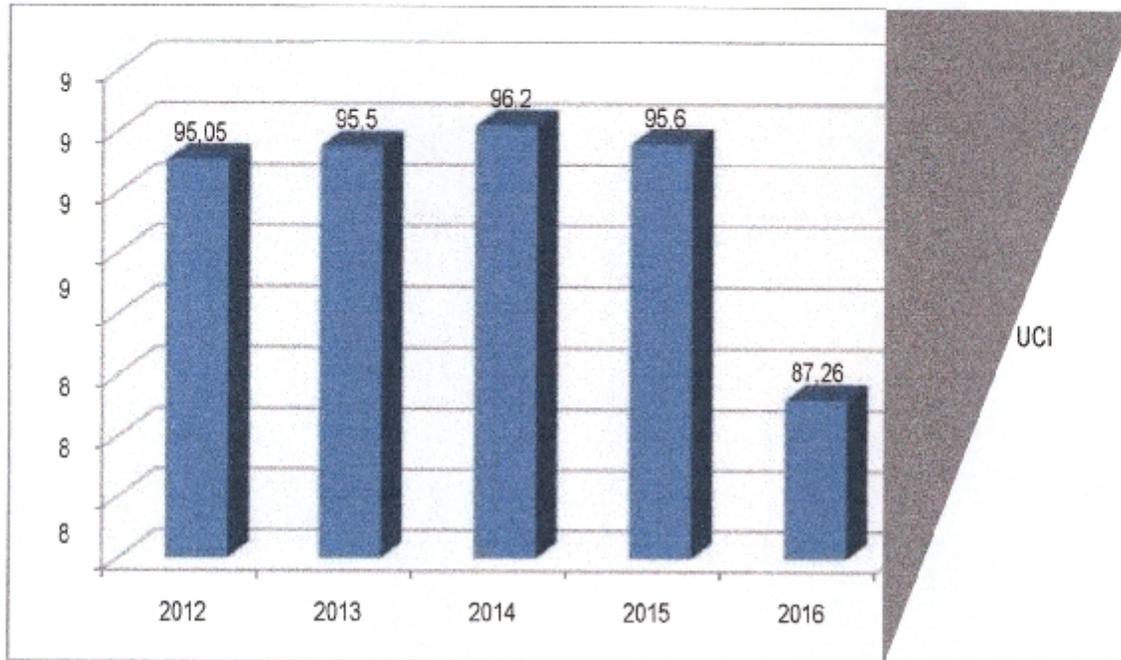
Berdasarkan data yang dilaporkan Puskesmas jumlah kematian Anak Balita (Umur 12-59 bulan) pada tahun 2016 sebanyak 35 orang. Jumlah kematian usia 1 - 4 tahun di Rumah Sakit di Wilayah Kabupaten Cirebon tanpa memilah luar atau dalam wilayah domisili asal pasien terdapat 56 kematian anak. Jika dibandingkan dengan data pelaporan dari Puskesmas terdapat selisih. Hal ini memungkinkan pencatatan dan pelaporan yang belum maksimal di tingkat desa/kelurahan ataupun di Puskesmas. Selain itu ada data kematian yang merupakan penduduk luar wilayah kabupaten Cirebon yang meninggal di rumah sakit di wilayah Kabupaten Cirebon.

Lima penyebab kematian balita (umur 1-4 tahun) terbesar di rumah sakit di wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2016 adalah Bronchopneumonia sebanyak 34 (27,2%), Sepsis sebanyak 20 (16%), Encephalitis sebanyak 12 (9,6%), Dengue Shock Syndrome sebanyak 10 (8,0%), dan Meningitis ada 6 (4,8%). Angka ini tanpa membedakan pasien dalam dan luar wilayah Kabupaten Cirebon.

Sementara, data SDKI dan Riskesdas menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) terus mengalami peningkatan (Gambar 5). Dalam SDKI, imunisasi dasar lengkap (IDL) didefinisikan sebagai persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima imunisasi BCG, campak, dan tiga kali untuk DPT dan polio. Sementara itu, menurut Riskesdas adalah jika anak 1223 bulan sudah mendapatkan semua jenis imunisasi: satu kali HB-0, satu kali BCG, tiga kali DPT-HB, empat kali polio, dan satu kali imunisasi campak. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi meningkat dari 71,2% (2013) menjadi 80,7% (2016). Meskipun meningkat, sebesar 32,1% anak usia 12-23 bulan mendapatkan imunisasi yang tidak lengkap dan 8,7% yang sama sekali tidak pernah mendapatkan imunisasi.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Tahun 2016 cakupan UCI di Kabupaten Cirebon mencapai 87,26%, mengalami penurunan dari tahun 2015 yang mencapai 95,6%. Hal ini disebabkan adanya perubahan indikator capaian UCI yang semula bersifat kuantitatif yaitu 4 (empat) indikator antigen mencapai lebih dari 80% yaitu BCG, DPT3, Polio 4 dan Campak menjadi bersifat kualitatif yaitu Imunisasi Dasar Lengkap bagi setiap bayi mencapai 80% dalam suatu desa. Sedangkan target cakupan UCI tahun 2016 yaitu 93%.

Grafik 4.6
Cakupan UCIDesa di Kabupaten Cirebon Tahun 2012 –2016



Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi SDM, fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); 2) peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi ibu dan remaja, serta pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil; 3) peningkatan pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak; 4) peningkatan peran Posyandu; dan 5) peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama imunisasi dan manfaatnya kepada masyarakat umum.

Mengakhiri Epidemii Penyakit Menular. Kasus HIV/AIDS menunjukkan kecenderungan meningkat, namun prevalensi masih dapat ditahan di bawah 0,5%. Jumlah ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) yang menerima pengobatan ARV terus meningkat dari 2.381 orang (2010) menjadi 77.748

Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM). Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi hipertensi adalah sebesar 25,8% atau hampir 40 juta penduduk di atas 18 tahun dan Diabetes Melitus (DM) sebesar 6,9%. Prevalensi obesitas penduduk di atas usia 18 tahun meningkat dari 10,3% (2007) menjadi 15,4% atau sekitar 23,5 juta penduduk (2013). Perilaku merokok, selain pola makan dengan gizi tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik, menyumbang pada peningkatan prevalensi PTM di Indonesia.

Berdasarkan pelaporan yang dihimpun oleh Puskesmas dari desa-desa di Kabupaten Cirebon, jumlah seluruh kematian semua umur tahun 2016 sebanyak 29.822 kasus.

Penyebab kematian di rumah sakit tahun 2016 untuk semua golongan umur, 5 (lima) penyebab tertinggi adalah Stroke dengan perdarahan 11,4 %, Cedera kepala berat 10,7 %, Sepsis 8,2 %, Gagal Jantung kongestif 7,4 %, Syok Hipovolemik 4,9 %. Penyakit Stroke menempati urutan pertama, seperti pada tahun-tahun sebelumnya (2013-2015). Stroke ini selalu ada di urutan lima teratas dari tahun ke tahun.

Proporsi penduduk umur di atas 15 tahun yang merokok dan mengunyah tembakau meningkat dari 34,2% (2007) menjadi 36,3% (2013). Sebesar 26,1% penduduk kurang aktivitas fisik dan 93,5% penduduk di atas usia 10 tahun kurang mengonsumsi buah dan sayur (2013). Sementara, 4,6% penduduk mengonsumsi alkohol (2007), dimana 0,6% diantaranya mengonsumsi hingga level yang berbahaya menurut standar WHO.

Tantangan untuk mengakhiri epidemi penyakit menular adalah: 1) perluasan screening wajib pada ibu hamil; 2) perluasan penggunaan metode Tes Cepat Molekuler (TCM) TB ke seluruh RS untuk meningkatkan temuan kasus baru TB; 3) peningkatan upaya mencegah Multi Drug Resistance (MDR); dan 4) peningkatan kebutuhan logistik, SDM dan pembiayaan untuk HIV/AIDS (obat ARV, reagen dan diagnostic kit) dan TB. Sementara, tantangan untuk menurunkan kematian akibat PTM diantaranya: 1) penjangkauan 2/3 penderita PTM yang belum mengetahui bahwa telah menderita PTM; 2) peningkatan upaya promotif dan preventif untuk pengendalian faktor risiko PTM; dan 3) peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, serta fasilitas layanan kesehatan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita PTM

Mencapai Cakupan Kesehatan Universal. Jumlah penduduk yang tercakup dalam JKN terus ditingkatkan. Sampai dengan 31 Desember 2017, sebanyak 187,9 juta penduduk telah menjadi peserta. Berdasarkan Susenas, perluasan cakupan berdampak pada menurunnya unmet need pelayanan kesehatan dari 9,9% (2006) menjadi 4,3% (2016). Pelaksanaan cakupan kesehatan universal perlu diarahkan pada upaya pemerataan pelayanan kesehatan antarwilayah. Upaya ke depan diantaranya: 1) menjangkau kepesertaan JKN dari pekerja informal dan pekerja penerima upah; 2) memperluas kerja sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta/mandiri; dan 3) meningkatkan akses pada fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah.

Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin. Tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat. meningkat dari 75,5% (2014) menjadi 81,57% (2016). Untuk menjamin mutu dan keamanan obat yang beredar, pengawasan obat terus ditingkatkan. Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan; 2) pengembangan skema penempatan tenaga kesehatan terutama untuk Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); 3) meningkatkan kemandirian bahan baku obat; dan 4) meningkatkan penggunaan obat rasional dan memperkuat sistem pengawasan obat.

2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

Partisipasi pendidikan penduduk Indonesia. Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 3-6 tahun, tingkat partisipasi pendidikan terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat partisipasi PAUD usia 3-6 tahun sebesar 10,93% dari 36,52% (2010) menjadi 47,45% (2016). Peningkatan partisipasi PAUD ini tidak terlepas dari tingginya peran dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan data Podes 2014, sebesar 94,72% PAUD diselenggarakan oleh masyarakat/swasta.

Selain itu, tingkat pendidikan penduduk pada jenjang pendidikan dasar sampai tinggi terus meningkat. Partisipasi pendidikan pada jenjang SD/MI/ sederajat sudah mencapai lebih dari 100%. APK SMP/MTs/ sederajat terus mengalami peningkatan dari 80,6% pada tahun 2010 menjadi 90,1% (2016). Tingkat partisipasi jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat juga mengalami peningkatan dari 62,9% (2010) menjadi 80,9% (2016). APK pendidikan tinggi meningkat dari 26,3%

(2010) menjadi 31,6% (2016). Disparitas pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Akses masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia sudah cukup merata yang ditunjukkan dengan rasio APK antara perempuan dan laki-laki pada berbagai jenjang. Pada tahun 2016, Rasio APK SD/MI/ sederajat antara perempuan dan laki-laki sebesar 0,99, rasio APK SMP/MTs/ sederajat antara perempuan dan laki-laki sebesar 1,05, dan rasio APK SMA/SMK/MA/ sederajat antara perempuan dan laki-laki sebesar 1,06. Pada jenjang pendidikan tinggi, rasio APK perempuan terhadap laki-laki mencapai 1,16. Rasio APK antara laki-laki dan perempuan yang mencapai 1 menandakan bahwa partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan telah setara.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut jenjang pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2015

| No | Kecamatan | SD | | | SLTP | | | SLTA | | |
|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| 1 | Waled | 227,46 | 79,90 | 119,96 | 74,16 | 94,55 | 82,91 | 51,57 | 76,34 | 62,20 |
| 2 | Ciledug | 231,84 | 67,26 | 105,48 | 70,67 | 97,37 | 82,08 | 54,07 | 75,44 | 63,20 |
| 3 | Losari | 227,07 | 124,98 | 162,43 | 79,92 | 110,47 | 92,94 | 59,84 | 91,41 | 73,29 |
| 4 | Babakan | 225,23 | 74,01 | 113,43 | 164,91 | 104,51 | 126,72 | 91,01 | 116,69 | 107,24 |
| 5 | Karangsembung | 205,38 | 61,02 | 95,16 | 186,25 | 118,11 | 143,11 | 157,34 | 90,81 | 115,23 |
| 6 | Lemahabang | 261,20 | 70,44 | 112,82 | 135,05 | 73,72 | 96,25 | 105,05 | 55,61 | 73,78 |
| 7 | Sedong | 227,17 | 56,58 | 91,82 | 41,16 | 91,13 | 56,46 | 28,01 | 70,39 | 40,99 |
| 8 | Astanajapura | 218,84 | 112,68 | 152,04 | 103,97 | 154,88 | 123,68 | 44,81 | 218,78 | 112,17 |
| 9 | Mundu | 242,06 | 82,57 | 126,42 | 62,11 | 103,70 | 78,35 | 53,53 | 78,19 | 63,16 |
| 10 | Beber | 234,91 | 59,55 | 95,31 | 92,73 | 86,31 | 89,48 | 81,83 | 66,31 | 73,97 |
| 11 | Sumber | 262,13 | 77,00 | 122,14 | 91,59 | 97,22 | 94,34 | 64,89 | 82,77 | 73,64 |
| 12 | Palimanan | 223,01 | 67,29 | 104,25 | 224,92 | 161,31 | 188,40 | 139,30 | 163,97 | 153,46 |
| 13 | Plumbon | 220,96 | 70,42 | 110,01 | 62,15 | 84,28 | 71,57 | 74,01 | 40,97 | 59,93 |
| 14 | Weru | 228,72 | 66,08 | 105,39 | 143,91 | 123,62 | 133,34 | 120,61 | 96,69 | 108,16 |
| 15 | Kapetakan | 240,34 | 83,09 | 125,94 | 66,14 | 95,13 | 77,42 | 54,33 | 74,34 | 62,12 |
| 16 | Klangenan | 226,99 | 66,39 | 104,69 | 342,91 | 42,67 | 79,97 | 263,81 | 31,50 | 60,36 |
| 17 | Arjawinangun | 234,78 | 92,60 | 135,03 | 92,96 | 117,91 | 104,12 | 69,79 | 101,55 | 84,00 |
| 18 | Ciwaringin | 208,56 | 45,85 | 76,22 | 230,82 | 186,34 | 206,45 | 94,66 | 234,03 | 171,02 |
| 19 | Susukan | 206,85 | 77,18 | 113,14 | 44,03 | 73,72 | 55,16 | 46,60 | 43,42 | 45,41 |
| 20 | Gegesik | 224,67 | 94,26 | 134,94 | 90,44 | 88,43 | 89,39 | 66,26 | 74,98 | 70,84 |
| 21 | Susukanlebak | 214,90 | 47,63 | 78,23 | 133,09 | 119,86 | 126,02 | 65,10 | 145,57 | 108,07 |
| 22 | Pabedilan | 214,86 | 64,47 | 101,99 | 120,84 | 88,19 | 102,30 | 65,15 | 98,40 | 84,03 |
| 23 | Dukupuntang | 237,03 | 89,84 | 132,54 | 66,03 | 199,40 | 97,78 | 41,01 | 213,39 | 82,05 |
| 24 | Panguragan | 199,68 | 72,88 | 108,85 | 55,70 | 77,43 | 64,84 | 40,58 | 59,46 | 48,52 |
| 25 | Kaliwedi | 208,83 | 52,98 | 86,64 | 52,99 | 83,30 | 64,53 | 33,47 | 86,54 | 53,68 |
| 26 | Pangenan | 221,66 | 71,39 | 111,50 | 87,18 | 126,47 | 103,28 | 54,46 | 122,61 | 82,38 |
| 27 | Gebang | 208,68 | 66,69 | 103,29 | 63,60 | 87,81 | 73,73 | 41,60 | 74,89 | 55,53 |
| 28 | Depok | 207,91 | 78,27 | 115,17 | 78,65 | 108,87 | 90,78 | 55,70 | 109,12 | 77,14 |
| 29 | Kedawung | 163,20 | 74,60 | 104,90 | 40,70 | 80,34 | 53,39 | 28,39 | 70,32 | 41,81 |
| 30 | Karangwareng | 212,69 | 50,49 | 85,11 | 54,51 | 33,67 | 42,52 | 45,12 | 27,65 | 35,07 |
| 31 | Talun | 213,05 | 71,10 | 109,07 | 81,18 | 39,24 | 52,89 | 59,05 | 32,45 | 41,11 |
| 32 | Gunungjati | 172,06 | 95,32 | 123,38 | 159,81 | 74,25 | 101,95 | 127,45 | 66,21 | 86,04 |
| 33 | Pasaleman | 219,60 | 60,20 | 96,31 | 96,92 | 45,24 | 61,69 | 77,88 | 40,31 | 52,26 |
| 34 | Pabuaran | 204,99 | 70,09 | 106,01 | 115,04 | 118,62 | 116,86 | 47,55 | 155,16 | 102,31 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 35 | Tengahatani | 210.24 | 69.19 | 107.06 | 149.60 | 36.51 | 60,00 | 119,89 | 29,35 | 48,15 |
| 36 | Plered | 259.84 | 75.69 | 120.89 | 300.00 | 68.78 | 113,76 | 262,36 | 61,83 | 100,84 |
| 37 | Gempol | 211.96 | 72.52 | 111.98 | 153.10 | 92.92 | 117,47 | 110,06 | 82,74 | 93,89 |
| 38 | Greged | 258.46 | 81.66 | 128.22 | 46.20 | 118.05 | 68,69 | 43,64 | 85,77 | 56,83 |
| 39 | Suranenggala | 208.20 | 81.84 | 119.73 | 259.39 | 97.28 | 141,35 | 181,69 | 95,35 | 118,83 |
| 40 | Jamblang | 227.93 | 79.72 | 121.06 | 126.58 | 85.24 | 101,22 | 96,68 | 64,61 | 77,01 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Cirebon

Kualitas Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan. Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan proses pengembangan diri guru secara terus menerus untuk membangun kualitas pembelajaran yang lebih baik. Sementara, berdasarkan data Kemdikbud dan Kemenag, persentase guru yang sudah tersertifikasi meningkat dari 23,97% (2010) menjadi sebesar 48,12% (2016). Dari gambaran ini, diharapkan bahwa guru yang berkualitas akan semakin meningkat.

Jumlah Guru Negeri yang telah memperoleh Sertifikasi jenjang pendidikan SD dan SLTP dan SLTA menurut jenis kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2015

| No | Kecamatan | Guru SD | | | Guru SLTP | | | SLTA | | |
|----|---------------|---------|-----|-----|-----------|-----|-----|------|----|-----|
| | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| 1 | Arjawinangun | 56 | 90 | 146 | 47 | 44 | 91 | 19 | 6 | 25 |
| 2 | Astanajapura | 58 | 103 | 161 | 30 | 19 | 49 | 36 | 12 | 48 |
| 3 | Babakan | 90 | 50 | 140 | 61 | 34 | 95 | 21 | 11 | 32 |
| 4 | Beber | 89 | 109 | 198 | 43 | 51 | 94 | 37 | 15 | 52 |
| 5 | Ciledug | 50 | 70 | 120 | 10 | 13 | 23 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Ciwaringin | 58 | 102 | 160 | 39 | 37 | 76 | 83 | 56 | 139 |
| 7 | Depok | 53 | 61 | 114 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Dukupuntang | 63 | 64 | 127 | 17 | 19 | 36 | 31 | 19 | 50 |
| 9 | Gebang | 70 | 54 | 124 | 31 | 32 | 63 | 32 | 45 | 77 |
| 10 | Gegesik | 35 | 59 | 94 | 29 | 20 | 49 | 26 | 7 | 33 |
| 11 | Gempol | 111 | 193 | 304 | 66 | 104 | 170 | 37 | 22 | 59 |
| 12 | Greged | 87 | 119 | 206 | 56 | 65 | 121 | 44 | 26 | 70 |
| 13 | Gunungjati | 82 | 167 | 249 | 31 | 56 | 87 | 32 | 21 | 53 |
| 14 | Jamblang | 64 | 126 | 190 | 44 | 57 | 101 | 22 | 14 | 36 |
| 15 | Kaliwedi | 76 | 72 | 148 | 15 | 20 | 35 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Kapetakan | 67 | 134 | 201 | 18 | 16 | 34 | 17 | 6 | 23 |
| 17 | Karangsembung | 86 | 124 | 210 | 71 | 57 | 128 | 27 | 19 | 46 |
| 18 | Karangwareng | 60 | 71 | 131 | 27 | 20 | 47 | 22 | 7 | 29 |
| 19 | Kedawung | 102 | 65 | 167 | 22 | 10 | 32 | 41 | 19 | 60 |
| 20 | Klangenan | 118 | 119 | 237 | 87 | 46 | 133 | 36 | 16 | 52 |
| 21 | Lemahabang | 48 | 58 | 106 | 24 | 14 | 38 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Losari | 79 | 61 | 140 | 25 | 17 | 42 | 15 | 9 | 24 |
| 23 | Mundu | 87 | 99 | 186 | 43 | 25 | 68 | 37 | 20 | 57 |
| 24 | Pabedilan | 59 | 59 | 118 | 28 | 19 | 47 | 10 | 1 | 11 |
| 25 | Pabuaran | 50 | 61 | 111 | 27 | 9 | 36 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Palimanan | 43 | 38 | 81 | 29 | 11 | 40 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Pangenan | 53 | 93 | 146 | 59 | 42 | 101 | 12 | 6 | 18 |
| 28 | Panguragan | 100 | 109 | 209 | 40 | 41 | 81 | 6 | 12 | 18 |
| 29 | Pasaleman | 31 | 88 | 119 | 16 | 38 | 54 | 64 | 74 | 138 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|
| 30 | Plered | 37 | 44 | 81 | 23 | 11 | 34 | 11 | 6 | 17 |
| 31 | Plumbon | 62 | 103 | 165 | 14 | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sedong | 98 | 117 | 215 | 34 | 62 | 96 | 15 | 5 | 20 |
| 33 | Sumber | 43 | 42 | 85 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Suranenggala | 40 | 67 | 107 | 36 | 22 | 58 | 6 | 1 | 7 |
| 35 | Susukan | 37 | 71 | 108 | 15 | 21 | 36 | 5 | 2 | 7 |
| 36 | Susukanlebak | 50 | 109 | 159 | 25 | 44 | 69 | 7 | 7 | 14 |
| 37 | Talun | 72 | 67 | 139 | 15 | 7 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Tengahtani | 57 | 36 | 93 | 22 | 11 | 33 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Waled | 58 | 79 | 137 | 20 | 21 | 41 | 15 | 8 | 23 |
| 40 | Weru | 63 | 82 | 145 | 21 | 26 | 47 | 47 | 29 | 76 |
| JUMLAH | | 2.642 | 3.435 | 6.077 | 1.282 | 1.203 | 2.485 | 824 | 504 | 1.328 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Cirebon

2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah dua indeks penting untuk melihat capaian pembangunan kesetaraan gender. Indonesia meraih capaian perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun untuk kedua indeks tersebut, walaupun kemajuan pencapaiannya kurang signifikan. Pada tahun 2014, IPG Indonesia adalah 90,34 dan naik menjadi 91,03 pada tahun 2015.

Berdasarkan sumber dari BP3AKB Provinsi Jawa Barat, bahwa IPG dan IDG Kabupaten Cirebon termasuk pada tingkatan yang rendah atau dibawah rata-rata IPG dan IDG Jawa Barat, Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

IPG dan IDG Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 2011-2013

| No | Kab/Kota | IPG 2013 | IDG 2013 |
|----|---------------|----------|----------|
| 1 | Bogor | 63,47 | 61,86 |
| 2 | Sukabumi | 61,57 | 60,69 |
| 3 | Cianjur | 53,71 | 50,58 |
| 4 | Bandung | 69,44 | 46,40 |
| 5 | Garut | 64,76 | 65,85 |
| 6 | Tasikmalaya | 61,72 | 62,09 |
| 7 | Ciamis | 66,65 | 58,07 |
| 8 | Kuningan | 62,48 | 59,12 |
| 9 | Cirebon | 59,17 | 52,83 |
| 10 | Majalengka | 59,25 | 57,96 |
| 11 | Sumedang | 68,15 | 64,82 |
| 12 | Indramayu | 52,43 | 60,77 |
| 13 | Subang | 63,34 | 47,25 |
| 14 | Purwakarta | 63,56 | 65,88 |
| 15 | Karawang | 61,95 | 59,94 |
| 16 | Bekasi | 61,57 | 57,34 |
| 17 | Bandung Barat | 69,14 | 70,17 |
| 18 | Pangandaran | 67,27 | 0 |
| 19 | Kota Bogor | 68,38 | 65,02 |
| 20 | Kota Sukabumi | 65,07 | 58,60 |
| 21 | Kota Bandung | 71,25 | 68,06 |
| 22 | Kota Cirebon | 69,11 | 60,27 |
| 23 | Kota Bekasi | 67,79 | 63,50 |
| 24 | Kota Depok | 73,63 | 79,34 |
| 25 | Kota Cimahi | 68,56 | 53,10 |

| | | | |
|----|-----------------------|--------------|--------------|
| 26 | Kota Tasikmalaya | 69,29 | 54,04 |
| 27 | Kota Banjar | 61,00 | 48,95 |
| | Provinsi Jabar | 64,61 | 68,08 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Susenas 2011-2014

Dari tabel diatas terlihat IPG dan IDG Kabupaten Cirebon 59,17 untuk IPG dan 52,83 untuk IDG sedangkan untuk Provinsi Jabar sebesar 64,61 untuk IPG dan 68,08 untuk IDG. Walaupun data terbaru belum tersedia untuk tahun 2014, angka ini masih sangat jauh jika di bandingkan dengan Kota/ Kabupaten lain di Jawa Barat.

Tantangan kedepan adalah bagaimana agar peningkatan kesetaraan gender tersebut lebih signifikan karena saat ini Indonesia masih tergolong negara ASEAN yang memiliki Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tinggi. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengarusutamaan gender. Disamping itu, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.

Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016 menunjukkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan, sebagai berikut:

1. Kekerasan oleh pasangan:

- sekitar 2 dari 11 perempuan yang pernah/ sedang menikah mendapat kekerasan fisik dan/ atau seksual dari pasangannya selama hidup mereka (18,3%) dan sekitar 1 dari 20 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (4,9%); serta
- sekitar 28,3% perempuan yang pernah/ sedang menikah mendapat minimal 1 dari 3 jenis kekerasan (fisik, seksual dan emosional) dari pasangannya selama hidupnya dan sekitar 10,4% dalam 12 bulan terakhir.

- Kekerasan oleh selain pasangan: sekitar 1 dari 4 perempuan yang pernah, sedang atau belum menikah mengalami kekerasan fisik dan/ atau seksual dari selain pasangan selama hidup mereka (23,7%) dan sekitar 1 dari 18 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (5,6%). Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak (14,4%).

Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut umur di Kabupaten Cirebon Tahun 2015

| No | Kabupaten Cirebon | Kelompok Umur | | | Total |
|----|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-------|
| | | Anak (0<18 Tahun) | Remaja (18-<25 Tahun) | 25 Tahun ke atas | |
| 1 | LSM Banati | 4 | 6 | 13 | 23 |
| 2 | P2TP2A | 17 | 5 | | 22 |
| 3 | Kepolisian | | 4 | 10 | 14 |
| 4 | Kejaksaan | | 3 | 9 | 12 |
| 5 | LSM WCC Balqis | 64 | 24 | 24 | 112 |

Sumber data : Banati, P2TP2A, Kepolisian, Kejaksaan dan Balqis Kab. Cirebon

Selanjutnya, hasil survei Kekerasan terhadap Anak (KtA) tahun 2013 menunjukkan sekitar 38,62% anak laki-laki dan 20,48% anak perempuan umur 13-17 tahun

menyatakan dirinya pernah mengalami tindak kekerasan dalam satu tahun terakhir.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), adalah: (i) membangun sistem data dan informasi KtP; (ii) meningkatkan komitmen pemangku kepentingan terkait serta koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; (iii) meningkatkan efektifitas upaya-upaya pencegahan KtP dan penanganan korban KtP; dan (iv) meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KtP.

Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut jenis kekerasan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2015

| No | Kabupaten Cirebon | Jenis Kekerasan | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|-----------------|---|--------|---|---------|---|------------|---|--------------|---|---------|---|
| | | Fisik | | Psikis | | Seksual | | Eksplorasi | | Penelantaran | | Lainnya | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 1 | LSM Banati | | | 1 | | | 5 | | | 2 | 1 | | |
| 2 | P2TP2A | | | | | 2 | 1 | | | | | | |
| 3 | Kepolisian | 1 | | | | 2 | 4 | | | | | | |
| 4 | Kejaksaan | 1 | | | | 1 | 3 | | | | | | |

Sumber data : Banati, P2TP2A, Kepolisian, Kejaksaan dan Balqis Kab. Cirebon

REKAPITULASI KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK P2TP2A KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017-2018

| No | KASUS | TAHUN 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------|-----|------|-----|-----------|-----|------|-----|--------------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|--------|-----|----|---|-------|---|----|---|
| | | Kepolisian | | | | Kejaksaan | | | | Mawar Balqis | | | | FWBMI | | | | P2TP2A | | | | TOTAL | | | |
| | | USIA | | USIA | | USIA | | USIA | | USIA | | USIA | | USIA | | USIA | | USIA | | | | | | | |
| | | 0-18 | 18+ | 0-18 | 18+ | 0-18 | 18+ | 0-18 | 18+ | 0-18 | 18+ | 0-18 | 18+ | 0-18 | 18+ | 0-18 | 18+ | 0-18 | 18+ | | | | | | |
| | | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | | |
| 1 | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Traffiking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | |
| 3 | Perkosaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | |
| 4 | Kekerasan Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 5 | Penelantaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Kekerasan Terhadap Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Penipuan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Penganiayaan/Bullying | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Persetubuhan/Perbuatan Cabul | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 12 | 1 | | 7 | 12 | 1 |
| 10 | Bawa Lari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Depresi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Kekerasan Psikis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Kekerasan Terhadap TKW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Pengrusakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Hak Asus Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | |
| 16 | Anak Berhadapan dengan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Hak Anak (Tunjangan Anak) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Perlindungan Perempuan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total menurut Usia | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 13 | 5 | | 9 | 13 | 5 |
| | Total Menurut Sumber Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total Per Tahun | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Menghapus Semua Praktik Berbahaya. Prevalensi perkawinan usia anak (<18 tahun) mengalami penurunan dalam 8 tahun terakhir. Data tahun 2016 menunjukkan sekitar 22,4% perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin, menikah pertama kali sebelum usia 18 tahun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2008 sebesar 27,4%. Peningkatan umur kawin pertama tersebut berkorelasi positif dengan meningkatnya pendidikan perempuan (SDKI, BPS).

Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, serta Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin. Tantangan lain dalam meningkatkan keterwakilan perempuan adalah melakukan "affirmative action" terutama melalui terobosan politik.

**Anggota DPR menurut Partai dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2015**

| NO. | PARTAI | ANGGOTA DPR | | JUMLAH |
|---------------|----------|-------------|-----------|----------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| 1 | NASDEM | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PKB | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PKS | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PDIP | 2 | 0 | 2 |
| 5 | GOLKAR | 2 | 0 | 2 |
| 6 | GERINDRA | 1 | 0 | 1 |
| 7 | DEMOKRAT | 1 | 0 | 1 |
| 8 | PAN | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PPP | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HANURA | 0 | 1 | 1 |
| 11 | PBB | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PKPI | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 8 | 1 | 9 |

Sumber: DPRD Kabupaten Cirebon

**Anggota DPRD Kabupaten Cirebon menurut Partai dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2015**

| NO. | PARTAI | ANGGOTA DPRD Kab | | JUMLAH |
|---------------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | PDI Perjuangan | 8 | 3 | 11 |
| 2 | PKB | 7 | 1 | 8 |
| 3 | GERINDRA | 4 | 2 | 6 |
| 4 | GOLKAR | 4 | 2 | 6 |
| 5 | PKS | 4 | 1 | 5 |
| 6 | DEMOKRAT | 3 | 2 | 5 |
| 7 | NASDEM | 2 | 2 | 4 |
| 8 | HANURA | 2 | 1 | 3 |
| 9 | PPP | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PBB | 1 | 0 | 1 |
| JUMLAH | | 36 | 14 | 50 |

Sumber: DPRD Kabupaten Cirebon

Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak Reproduksi. Data SDKI 2007 dan 2012 menunjukkan Unmet Need pelayanan KB telah menurun dari 13,1% pada tahun 2007 dan 11,4% pada tahun 2012. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman perempuan menikah usia 15-49 tahun tentang suatu cara kontrasepsi modern meningkat dari 98,3% menjadi 98,9% dan laki-laki meningkat dari 94,1% menjadi 97,2% pada periode yang sama. Untuk menjamin perempuan mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi, Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi, pendidikan dan pelayanan kepada remaja sepanjang tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama. Selanjutnya, untuk pelaksanaannya telah ada Peraturan Pemerintah No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tantangan yang dihadapi adalah pelaksanaan advokasi dan KIE yang efektif responsif gender yang dapat meningkatkan kesertaan berKB. Tantangan lainnya adalah peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah serta manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi.

Meningkatkan Penggunaan Teknologi. Pada tahun 2015 persentase perempuan yang memiliki telepon selular adalah 50,4% dan meningkat menjadi 52,1% pada tahun 2016. Sementara, untuk laki-laki adalah 63,4% pada tahun 2015 dan 64,4% pada tahun 2016 (Susenas 2015-2016). Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan penggunaan teknologi adalah meningkatkan cakupan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan.

Kebijakan dan Perundang-Undangan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Kaum Perempuan. Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi anggaran umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang sudah dikembangkan adalah Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Pada saat ini, penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar belum menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Pada tahun 2015, yang merupakan tahun akhir pelaksanaan Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals - MDGs), proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan adalah 70,97%. Angka ini melampaui target MDGs sebesar 68,87%. Namun demikian, capaian air minum untuk kawasan perdesaan adalah 60,58%, masih di bawah target MDGs sebesar 65,81%. Menurut Laporan yang sama, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sejak tahun 2000 sampai 2015 menunjukkan peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan, bahkan sampai tahun 2010 perkembangannya memperlihatkan kecenderungan menurun. Sejak tahun 2012 sampai 2015 terjadi perubahan pencapaian yang positif setelah dilakukan koreksi BPS terhadap definisi tentang akses air minum layak. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap fasilitas sanitasi dasar layak, baik di perkotaan maupun perdesaan adalah 62,14%, masih sedikit di bawah target MDGs sebesar 62,41%. Peningkatan akses sanitasi layak sejak tahun 2000 tidak menunjukkan peningkatan yang berarti.

Dalam rangka peningkatan ketahanan air, arah kebijakan pemerintah adalah memelihara dan memulihkan sumber air dan ekosistemnya melalui penanganan DAS termasuk penyelesaian status DAS lintas negara, pemulihan kesehatan dan peningkatan perlindungan mata air melalui konservasi sumber daya air, mengurangi luasan kawasan kritis dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS, serta internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST).

Dalam upaya mendukung ketahanan air dan ketahanan energi, pada periode tahun 2010-2014 telah dibangun 21 waduk dan 3 diantaranya telah selesai, sehingga jumlah waduk yang berfungsi penuh sampai tahun 2014 adalah 208 buah. Untuk embung/situ/bangunan penampung air lainnya, sampai akhir tahun 2014 telah dibangun sebanyak 1.332 buah, rehabilitasi pada 82 buah waduk dan 342 embung/situ/bangunan penampung air lainnya, serta konservasi terhadap kawasan sumber air di 74 kawasan. Untuk mendukung pencapaian target MDGs, yaitu peningkatan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak, telah dibangun prasarana dan sarana air baku dengan kapasitas mencapai 51,44 M³/detik dalam periode 2010-2014, sehingga total kapasitas air baku yang tersedia selama periode tersebut mencapai 171,44 M³/detik.

Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana air minum yang telah terbangun, mengingat belum mantapnya lembaga penyelenggara dan tarif air minum yang belum memenuhi prinsip pemulihan biaya, semakin terbatasnya sumber air baku untuk air minum, dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Air baku untuk air minum semakin terbatas, baik secara kuantitas, kontinuitas, maupun kualitas. Selain itu, pemanfaatan alternatif sumber air baku, antara lain melalui daur ulang air dan pemanfaatan air hujan belum banyak dimanfaatkan. Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan).

Tantangan yang dihadapi dalam permasalahan sanitasi antara lain:

- (1) cakupan layanan sanitasi nasional yang masih rendah dan belum seluruh masyarakat dapat menikmati akses sanitasi yang layak (11,08% atau sekitar 28,66 juta jiwa penduduk Indonesia masih buang air besar sembarangan);
- (2) rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, sehingga permintaan atas layanan sanitasi masih rendah;
- (3) dokumen perencanaan sanitasi di tingkat daerah masih ada yang belum berkualitas baik atau tidak diimplementasikan dengan baik;
- (4) perlunya peningkatan peran daerah terkait pengelolaan sanitasi;
- (5) kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur; dan
- (6) perlunya peningkatan manajemen asset (Renstra Kementerian PUPR 2015-2019).

Dalam hal perubahan perilaku, pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) telah menghasilkan perubahan yang cukup besar diindikasikan dengan jumlah desa yang telah mencapai status Stop Buang Air Besar Sembarangan (Open Defecation Free/ODF), dari 500 desa pada tahun 2007 menjadi lebih dari 8.400 desa pada tahun 2017. Dan untuk Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 2018 telah ada 135 desa ODF.

Dalam rangka menunjang ketahanan air dan pangan, sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 adalah “menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang berada pada kisaran 66,5-68,6.” Pada saat ini kondisi kualitas air sungai menurun karena pencemaran limbah domestik, dan parameter Chemical Oxygen Demand (COD) pada sungai di sebagian besar provinsi telah melebihi baku mutu. Sementara penurunan kualitas air sungai dan danau disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang berdampak pada ketersediaan air.

Pada akhir 2013, kapasitas produksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk PDAM adalah sebesar 36,83 M³/detik, sehingga tantangannya adalah memanfaatkan kapasitas air baku yang sudah tersedia. Permasalahan lainnya adalah lokasi potensi sumber-sumber air baku tidak selalu berdekatan dengan lokasi kawasan perkotaan dan permukiman, sehingga di beberapa daerah masih terjadi kekurangan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Sejumlah peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan sumber daya air telah banyak diterbitkan. Dengan telah dibatalkannya UU No. 7/2004 oleh Mahkamah Konstitusi, maka PP No. 16/2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, yang merupakan salah satu turunan UU No. 7/2004 juga turut batal demi hukum. Meskipun sudah terbit PP No 121/2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP No. 122 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, akan tetapi Undang-undang yang baru pengganti UU No 7/2004 masih tetap diperlukan.

2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Perkembangan Ekonomi Makro. Di tengah perekonomian global yang cenderung melambat, kinerja perekonomian Indonesia masih terus menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa triwulan terakhir. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,9% pada tahun 2015 menjadi 5,02% pada 2016. Pencapaian tersebut didorong oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian domestik dengan tingkat inflasi yang relatif rendah, berkurangnya defisit transaksi berjalan dan stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (USD). Demikian pula PDB per kapita menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, PDB per kapita Indonesia sebesar 28,77 juta rupiah dan terus meningkat sampai mencapai 47,96 juta rupiah pada tahun 2016.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon berdasarkan data BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2018 dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan perlambatan pada suatu waktu. Pada tahun 2014 mencapai 5,07 persen. Namun pada tahun 2015 mengalami perlambatan dengan pertumbuhan 4,88 persen dan kemudian meningkat 5,63 persen tahun 2016. Pada tahun 2017 juga mengalami perlambatan yang hanya mencapai 5,05 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2017 dicapai oleh kategori Real Estate sebesar 9,73 persen. Kategori ekonomi yang lain pun seluruhnya tumbuh positif. Pertumbuhan terendah tercatat kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,22 persen. Dari sisi pengeluaran, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (lebih dari 50 persen). Pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 34 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah 7 persen. Pengeluaran konsumsi LNPRRT memiliki peran yang relatif kecil sekitar 1 persensaja. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

Pada tingkat nasional, laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang dilihat dari PDB per tenaga kerja menunjukkan arah yang serupa dengan laju pertumbuhan PDB per kapita yaitu tetap tumbuh namun cenderung stagnan dan melambat. Laju pertumbuhan PDB menurut sektor dari periode 1990-2000 ke periode 2000-2016 memiliki nilai yang bervariasi. Laju pertumbuhan PDB sektor pertanian dan jasa menunjukkan peningkatan yang nyata, sedangkan terjadi penurunan laju pertumbuhan bagi sektor industri dan manufaktur.

Secara umum Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam mencapai target ekonomi makro, baik di tingkat global maupun nasional. Berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi global yang relatif lambat dan meningkatnya proteksionisme di beberapa negara utama sehingga menghambat aktivitas perdagangan global;
2. Penurunan tingkat produktivitas di beberapa negara dunia dan fenomena aging population di negara-negara maju berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi global yang relatif terbatas dalam jangka menengah;
3. Belum optimalnya ruang untuk stimulus fiskal yang pada saat bersamaan masih dihadapkan pada kondisi peningkatan rasio penerimaan perpajakan;
4. Pengaruh cuaca ekstrim pada tahun 2016 yang menjadi penyebab utama turunnya pertumbuhan di sektor pertanian, khususnya tanaman hortikultura dan mundurnya musim panen;
5. Produktivitas nasional yang masih perlu ditingkatkan dalam mendukung peningkatan kinerja ekonomi nasional.

Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik pada tahun 2016 berdampak pada terjadinya peningkatan kesempatan kerja. Bertambahnya kesempatan kerja ini terlihat dari turunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 6,18% pada Agustus 2015 menjadi 5,61% pada Agustus 2016. Penurunan tersebut sejalan dengan penciptaan lapangan kerja sebesar 3,59 juta pekerja. Walaupun demikian, angka TPT pada tahun 2016 masih belum memenuhi sasaran kuantitatif pada RKP 2016, yaitu sekitar 5,2-5,5%.

Meskipun tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan, masih perlu upaya besar untuk mencapai target TPT sesuai RPJMN pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,0-5,0%. Hal ini karena perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2015 mengakibatkan rendahnya penambahan kesempatan kerja yang jauh dari target 2 juta per tahun, yaitu hanya sekitar 191.173 ribu. Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar pada tahun 2016 terjadi pada sektor jasa dan lainnya yang mencapai 3,29 juta pekerja atau sebesar 91,4%. Kemudian pada sektor industri hanya menyerap sekitar 7,9% tenaga kerja dari total penyerapan tenaga kerja tahun 2016.

Penambahan kesempatan kerja dalam jumlah besar perlu dicermati kualitasnya, karena hanya pekerjaan yang baik dapat secara bersamaan mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Kerentanan dan ketidakpastian kesempatan kerja masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh Indonesia sampai saat ini. Kerentanan dan ketidakpastian tersebut tercermin dari tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja dan upah yang tidak memadai, dan kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja.

Capaian saat ini menunjukkan persentase pekerja formal terus meningkat dari 40,62% pada Agustus 2014 menjadi 42,40% pada Agustus 2016. Sebagian besar pekerja formal sekitar 30 juta orang berada pada sektor jasa dan lainnya, disusul oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Persentase jumlah pekerja informal juga menurun dari 59,38% pada Agustus 2014 menjadi 57,6% pada

Agustus 2016. Sebagian besar pekerja informal mencapai 49% berada pada sektor pertanian. Walaupun terjadi penurunan pekerja informal, tetapi masih terdapat hampir setengah penduduk yang bekerja pada sektor informal dengan produktivitas, kondisi kerja, dan perlindungan pekerja yang lebih rendah daripada sektor formal. Meningkatnya persentase tenaga kerja formal diharapkan dapat memberikan kepastian perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja.

Apabila dilihat berdasarkan tingkat keaktifannya, proporsi kaum muda berusia 15-29 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan atau tidak dalam pelatihan (Not in Education, Employment, or Training/NEET) pada tahun 2016 masih relatif besar yaitu sebesar 23,19%. Proporsi ini telah menurun dari tahun 2010 sebesar 25,66%. Sebagian besar tingkat NEET tersebut didominasi oleh perempuan.

Upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan yang menyeluruh perlu dilakukan untuk lebih mendorong kepastian berusaha dan investasi pada pekerja, termasuk di dalamnya menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan. Tabel 5 menunjukkan perkembangan upah yang diperoleh pekerja berdasarkan sektor, apabila dilihat pada indeks upah riil. Pada sektor pertambangan non-migas terjadi penurunan upah riil pada tahun 2014, hal ini bersamaan dengan momentum lemahnya harga komoditas pertambangan di pasar global beberapa tahun terakhir ini. Namun, lain halnya pada sektor pariwisata, meningkatnya promosi pariwisata Indonesia mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja sektor perhotelan dan upah riil.

Selain itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi konflik hubungan industrial termasuk demonstrasi tuntutan pekerja/ buruh yang erat kaitannya dengan pengupahan atau kenaikan upah minimum yang dinilai masih belum memenuhi rasa keadilan dari sisi pekerja. Pemerintah berperan dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha agar terlaksana perundingan yang mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan kedua pihak.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak dan produktif, antara lain:

1. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (skill mismatch dan underqualified);
2. Tingginya jumlah pekerja rentan dan informal dengan tingkat produktivitas dan perlindungan yang rendah;
3. Transformasi struktural pasar kerja yang mengarah pada sektor dengan produktivitas rendah;
4. Efisiensi pasar tenaga kerja yang lemah dalam kerangka daya saing global;
5. Kenaikan upah yang tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas tenaga kerja;
6. Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai dan diskriminasi di tempat kerja;
7. Terbatasnya penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda;
8. Lemahnya koordinasi lintas sektor dan instansi dalam pencapaian target bersama.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, jumlah unit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) nonpertanian mendominasi sekitar 98,33% dari total unit usaha secara keseluruhan. Dominasi lapangan usaha non-pertanian tersebut, antara lain: (1) perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan kendaraan bermotor; (2) akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman; dan (3) industri pengolahan. Kontribusi UMK terhadap penyerapan tenaga kerja cukup tinggi,

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, ditetapkan 7 target yang diukur melalui 33 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 1.

Dalam rangka mencapai tujuan dan target tanpa kemiskinan, RPJMN 2015–2019 diarahkan pada tiga kebijakan utama, yaitu:

1. Pertama, penyelenggaraan perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Program jaminan dan bantuan sosial yang tepat sasaran dilaksanakan melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran dengan satu kartu. Program ini diharapkan juga dapat memperluas inklusi keuangan dan kepesertaan jaminan sosial.
2. Kedua, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan melalui (i) perluasan penyediaan sarana dan prasarana dasar, (ii) peningkatan pelayanan dasar yang inklusif, dan (iii) peningkatan pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk menysasar kebutuhan dasar 40,0% penduduk berpendapatan terendah, seperti kepemilikan dokumen kependudukan dan perumahan.
3. Ketiga, pengembangan penghidupan berkelanjutan. Perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi dilaksanakan melalui (i) peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil; (ii) peningkatan akses terhadap permodalan usaha; dan (iii) peningkatan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha

Program Tujuan 1.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup (1) penanganan fakir miskin; (2) jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran; (3) pemenuhan kebutuhan dasar; (4) perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi; (5) penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS); (6) pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS); (7) program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan; (8) penataan kelembagaan jaminan sosial (Sistem Jaminan Sosial Nasional/SJSN); (9) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; (10) koordinasi kebijakan pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia; (11) pemenuhan kebutuhan dasar; (12) bina gizi dan kesehatan ibu dan anak; (13) pembinaan kesehatan masyarakat; (14) pembinaan surveilans, imunisasi, karantina, dan kesehatan matra; (15) pencegahan dan pengendalian penyakit; (16) kefarmasian dan alat kesehatan; (17) kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga; (18) penguatan promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”; (19) pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; (20) penyehatan lingkungan; (21) pengembangan perumahan; (22)

pengembangan pembiayaan perumahan; (23) pemberdayaan sosial; (24) penyediaan perumahan layak; (25) pendidikan dasar dan menengah: penjaminan kepastian layanan pendidikan SD/MI dan sederajat, SMP/MTs dan sederajat, SMA/MA/SMK dan sederajat; (26) penataan administrasi kependudukan; (27) perlindungan anak; (28) pengelolaan ketenagalistrikan; (29) koordinasi kebijakan pengurangan risiko bencana; (30) koordinasi kebijakan penanganan pascabencana; dan (31) perlindungan dan jaminan sosial: perlindungan sosial korban bencana.

Selain melalui program kementerian/lembaga, terdapat tiga program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Ketiga program tersebut adalah (1) Youth in Action for Urban Resilience yang merupakan kontribusi Pusat Inkubasi Usaha Kecil Konsulindo (PINBUKINDO); (2) Sosialisasi penghimpunan dana ZISWAF untuk penyediaan energi dan air di perdesaan dengan menggunakan panel surya yang merupakan program kontribusi lembaga di bawah Majelis Ulama Indonesia; dan (3) Emergency Situation Training (EST) yang merupakan program kontribusi Sekolah Relawan.

Target pencapaian indikator Tujuan 1 bisa dilihat pada tabel yang merupakan lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.

3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 20 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 2.

Arah kebijakan RPJMN 2015-2019 untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, meliputi: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, (2) stabilisasi harga bahan pangan, (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan, (4) percepatan perbaikan gizi masyarakat, (5) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, dan (6) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan.

Dalam upaya pencapaian TPB/SDGs tujuan 2, kebijakan produksi dan penyediaan pangan diarahkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri yang berkualitas guna menyediakan pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, serta dengan harga yang terjangkau. Bersamaan dengan itu, upaya untuk meningkatkan kualitas permintaan pangan juga diperlukan agar terbentuk pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang serta aman.

Kebijakan operasional dan program peningkatan produksi dan penyediaan pangan yang terkait erat dengan upaya pencapaian target TPB/SDGs tujuan 2 yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, diantaranya: (1) Peningkatan produksi pangan pokok dan penting untuk mencapai swasembada berkelanjutan komoditas beras dan jagung dan peningkatan penyediaan pangan untuk komoditas kedelai, gula tebu, daging sapi, bawang merah, dan cabai;

(2) Perluasan areal tanam untuk komoditas pangan prioritas dengan pencetakan sawah, penyediaan pasokan air untuk pertanian dengan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, long storage, serta bangunan air lainnya; dan peningkatan indeks pertanaman; (3) Percepatan produksi dan perbanyak benih tanaman VUB yang memiliki kemampuan adaptif terhadap cekaman lingkungan dan sesuai minat pengguna/petani; (4) Penyediaan sarana produksi pupuk dan benih secara enam tepat (jenis, varietas, dosis, waktu, tempat, dan harga) dan alat mesin pertanian yang sesuai dengan kondisi agroekosistem dan kebutuhan petani; (5) Penyediaan dan peningkatan jumlah indukan sapi, pengembangan ketersediaan pakan, dan pengembangan jumlah populasi sapi; (6) Fasilitasi untuk mendukung peningkatan produksi budidaya ikan dan perikanan tangkap; (7) Penguatan cadangan pangan nasional dan pembentukan cadangan pangan pemerintah serta pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan; (8) Percepatan penganekaragaman ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal, termasuk pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga; (9) Hilirisasi produk pangan (penanganan pasca panen dan pengembangan produk olahan) terutama berbasis pangan lokal, untuk menciptakan nilai tambah, menyediakan pangan beragam, mengurangi kehilangan hasil, dan meningkatkan pendapatan usaha skala kecil/rumah tangga; (10) Pemberdayaan petani kecil/kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan daya saing produk pangan; dan (11) Fasilitasi untuk mendorong usaha swasta dan BUMN berinvestasi di bidang agribisnis pangan di seluruh Indonesia termasuk di wilayah perbatasan antarnegara.

Sementara itu upaya perbaikan gizi masyarakat yang terkait dengan pencapaian TPB/SDGs Tujuan 2, diantaranya adalah:

- (1) sosialisasi tentang manfaat pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) untuk hidup sehat, aktif, dan produktif;
- (2) peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan;
- (3) pemberdayaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, termasuk sosialisasi manfaat dan menciptakan minat atau preferensi pada konsumsi pangan ikan, hasil peternakan, sayuran, dan buah-buahan lokal;
- (4) perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu dan penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
- (5) penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi dan keamanan pangan;
- (6) penguatan integrasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil; (7) perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja perempuan, dan kelompok rawan gizi lainnya;
- (8) penguatan sistem surveilans pangan dan gizi termasuk pemantauan pertumbuhan;
- (9) pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- (10) peningkatan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat; dan
- (11) penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis (berpendapatan rendah) dan transien (darurat bencana).

Program Tujuan 2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMN 2015-2019 antara lain terkait dengan: (1) pelayanan kesehatan dan gizi bagi bayi, balita, remaja, dan ibu hamil mulai dari pemeriksaan kesehatan, pemberian suplementasi, dan pendidikan kesehatan dan gizi; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk imunisasi dan pemberian obat cacing pada anak; (b) penyehatan lingkungan terutama perluasan akses air bersih dan sanitasi; (3) peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan dan gizi; (4) pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan gizi termasuk pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) seperti Posyandu; (5) peningkatan status kesehatan dan gizi anak sekolah; (6) peningkatan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat; (7) peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan; (8) bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk menjamin akses terhadap pangan dan layanan sosial dasar; dan (9) perluasan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan.

Target pencapaian indikator Tujuan 2 bisa dilihat pada tabel yang merupakan lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.

3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (tobacco control), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 3. Kebijakan dalam RPJMN diarahkan pada: 1) akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; 2) mempercepat perbaikan gizi masyarakat; 3) meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 4) memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan; 5) meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; 6) meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; 7) meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; 8) meningkatkan pengawasan obat dan makanan; 9) meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; 10) meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 11) menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi kesehatan; dan 12) mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.

Program Tujuan 3. Memperhatikan tujuan dan target serta arah kebijakan TPB/SDGs tujuan 3, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, mencakup: 1) pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; 2) penguatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, baik pelayanan dasar dan rujukan; 3) penyehatan lingkungan; 4) peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan; 5) pelayanan kesehatan jiwa; 6) rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA; 7) pelayanan KB bagi perempuan usia reproduksi; 8) pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia reproduksi, termasuk remaja; dan 9) peningkatan ketersediaan

SDM kesehatan. Target pencapaian indikator Tujuan 3 bisa dilihat pada tabel yang merupakan lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.

3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 23 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs, adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan menjamin hak seluruh anak Indonesia untuk dapat menyelesaikan pendidikan dasar, dan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas, antara lain melalui penyediaan bantuan untuk anak dari keluarga kurang mampu, pemberian peluang lebih besar bagi anak di daerah pasca konflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), dan perluasan pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan;
- (2) Peningkatan kualitas pembelajaran, melalui penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan, penguatan kurikulum dan pelaksanaannya; dan penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel;
- (3) Peningkatan kualitas, profesionalisme, pengelolaan dan penempatan guru yang merata;
- (4) Peningkatan pemerataan akses dan kualitas serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi;
- (5) Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja;
- (6) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas Wajib Belajar 12 Tahun;
- (7) Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan;
- (8) Penumbuhan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa; dan
- (9) Peningkatan tata kelola pendidikan dan efisiensi pembiayaan pendidikan.

Program Tujuan 4. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: 1) program-program terkait peningkatan kualitas dan akses pendidikan dasar dan menengah; 2) program terkait peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; 3) program terkait peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 4) program terkait penilaian mutu satuan pendidikan; 5) program terkait peningkatan kapasitas dosen, guru, dan tenaga kependidikan; 6) program terkait penyediaan/pemberian

bantuan pendidikan untuk penduduk; 7) program terkait pengembangan dan pembinaan, dan perlindungan bahasa; 8) program terkait peningkatan kualitas kelembagaan, tata kelola, dan layanan pendidikan.

Target pencapaian indikator Tujuan 4 bisa dilihat pada tabel yang merupakan lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.

3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 5. Kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 untuk pencapaian Goal 5 berasal dari kebijakan di beberapa bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

Pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang mencakup: (1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; (2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan; (3) penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan dan kebijakan; (4) peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan; (5) penguatan kapasitas kelembagaan di semua tingkatan; dan (6) penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk pelaksanaan proses pembangunan.

Kedua, meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, melalui: (1) pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu tentang konseling kesehatan reproduksi remaja; (2) peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja; (3) pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatankelompok keluarga remaja; dan (4) peningkatan jumlah dan kompetensi SDM pemberi pelayanan.

Ketiga, melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas melalui: (1) pemberian dukungan bagi anak dari keluarga tidak mampu; (2) peningkatan pemahaman bagi orang tua tentang pentingnya pendidikan menengah; (3) peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan; (4) penyediaan bantuan operasional sekolah; (5) penyediaan layanan khusus bagi anak yang memerlukan pendidikan khusus.

Keempat, meningkatkan peran perempuan di bidang politik melalui: (1) penguatan UU Partai Politik; (2) peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30 persen keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif; (3) peningkatan kapasitas perempuan potensial, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif;

(4) peningkatan pemahaman masyarakat dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik; dan (5) pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia. □

Kelima, meningkatkan KIE dan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui: (1) peningkatan sosialisasi, promosi, penyuluhan, penggerakan dan konseling tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK); dan (2) penguatan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas.

Keenam, meningkatkan jangkauan pelayanan internet berpita lebar dan peningkatan literasi digital melalui perluasan jaringan dan pendidikan.

Program Tujuan 5. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 5 antara lain adalah: (1) Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak ; (2) Program perlindungan anak yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia; (3) Program partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PP dan PA; (4) Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik (5) Program perlindungan dan jaminan sosial serta program rehabilitasi sosial yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial; (6) Program peningkatan pemajuan dan penegakan HAM yang akan dilaksanakan oleh Bagian Hukum, serta Komisi Nasional Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan; (7) Program manajemen peradilan Umum yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung;

Selain program di atas masih ada program-program lain yang memberikan kontribusi pada upaya pencapaian target TPB/SDGs. Dari masing-masing program tersebut kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan TPB dicantumkan dalam matriks-matriks terlampir. Selain Program dan kegiatan-kegiatan yang berasal dari Pemerintah, dalam upaya pencapaian target TPB juga didukung oleh program dan kegiatan yang berasal dari organisasi nonpemerintah yaitu dari organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha, seperti yang tercantum dalam matriks terlampir.

Target pencapaian indikator Tujuan 5 bisa dilihat pada tabel yang merupakan lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.

3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 40 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 6. Tujuan 6 dari TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Tujuan 6 ini dicapai melalui pencapaian target-target sebagaimana telah diuraikan di atas. Untuk pencapaian target-target TPB/SDGs lima tahun pertama (2015-2019), indikator-indikator yang dikembangkan dijabarkan dari kebijakan RPJMN 2015-2019, yaitu prinsip-prinsip ketahanan air, sinergitas antara air minum dan

sanitasi, efektivitas pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi dan pemeliharaan dan pemulihan sumber beserta ekosistemnya.

Untuk mendukung pencapaian 100% akses air minum dan sanitasi selain kegiatan untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi serta meningkatkan ketersediaan air baku, juga terdapat kegiatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat akan air minum dan sanitasi. Kegiatan yang terkait revolusi mental dalam pembangunan air minum dan sanitasi adalah sebagai berikut: perilaku hemat air, setop buang sampah di sungai dan saluran, setop buang air besar sembarangan (langsung dan tidak langsung), dan gerakan 3R (reduce, reuse, recycle). Kegiatan yang terakhir ini, meskipun lebih merupakan gerakan moral, apabila dilaksanakan secara masif dan sistematis, dapat menjadi pendorong percepatan pencapaian target-target TPB/SDGs yang tercermin dalam program-program pemerintah.

Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 6 antara lain adalah: (1) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, yang terdiri dari: (a) Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi; (b) Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; (c) Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan; serta (d) Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT); (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; (3) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyehatan Lingkungan; (4) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air; serta (5) Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung yang terdiri dari: (a) Kegiatan Pembinaan, Pengendalian Kerusakan Perairan Darat; (b) Kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS; serta (c) Kegiatan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat.

Target pencapaian indikator Tujuan 6 bisa dilihat pada tabel yang merupakan lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.

3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pada jangka waktu 5 tahun terakhir ini, PDB per kapita di Indonesia naik setiap tahunnya, namun hal ini tidak sejalan dengan laju pertumbuhannya. Sektor pariwisata, khususnya di Indonesia, memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu sektor pariwisata perlu diberdayakan karena dapat berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja. Namun selain jumlah kesempatan kerja yang meningkat, perlu diperhatikan juga kualitasnya yang diindikasikan dengan tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja, upah serta perlindungan sosial bagi pekerja.

Peningkatan kesempatan kerja juga didukung oleh upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya dalam peningkatan kesempatan kerja adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan, karena UMKM memiliki potensi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin keberlanjutan UMKM, dibutuhkan akses terhadap pembiayaan serta perlindungan melalui regulasi.

Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus dalam Tujuan 8 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-target dari Tujuan 8 meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakan kebijakan

pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Tujuan 8 berjumlah 20 sebagaimana tertera pada tabel 15.

Kebijakan Tujuan 8 yang diarahkan untuk pencapaian target-target Tujuan 8 yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 meliputi kelompok kebijakan (1) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan; (2) sektor ekonomi yang kokoh, serta (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mendukung Pertumbuhan Ekonomi Makro meliputi :
 1. Mendorong investasi untuk tumbuh tinggi sehingga berdampak pada peningkatan ekspor barang dan jasa, serta konsumsi;
 2. Optimalisasi realokasi belanja nonproduktif menjadi belanja investasi, penyerapan belanja pemerintah yang lebih merata di setiap kuartal dalam tahun anggaran, serta mendorong tingkat realisasi belanja pemerintah yang lebih tinggi;
 3. Prioritas pembangunan pada proyek prioritas nasional yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta;
 4. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui: (i) peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang layak; (ii) fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (iii) pengendalian harga, terutama harga barang-barang kebutuhan pokok; serta (iv) subsidi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin;
 5. Diversifikasi ekspor dan pendalaman pasar yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor barang nonmigas;
 6. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan sektoral, seperti pembangunan smelter, waduk dan irigasi, alat tangkap ikan yang modern dan berkelanjutan, jaringan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya, serta fasilitas energi di kawasan industri;
 7. Revitalisasi industri pengolahan dan upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang berkelanjutan.
- b. Dalam rangka Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif meliputi :
 1. Mendorong investasi, terutama investasi padat pekerja dengan mengedepankan kepastian berusaha, melalui dukungan regulasi yang mendorong arus investasi;
 2. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan informasi pasar kerja;
 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan mendorong relevansi antara kurikulum lembaga diklat dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri;
 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi pasar kerja di daerah untuk memfasilitasi bertemunya pekerja dengan pemberi kerja;
 5. Melaksanakan perluasan akses usaha mikro kecil dan koperasi melalui kegiatan pengembangan keterampilan dan layanan usaha dan pengembangan kewirausahaan;
 6. Mendorong terlaksananya hubungan industrial yang harmonis di perusahaan yang dilakukan melalui pemberdayaan serikat pekerja/serikat buruh untuk melakukan negosiasi bipartit dengan prinsip collective bargaining dan peningkatan kuantitas dan kualitas mediator hubungan industrial;

7. Meningkatkan perlindungan pekerja dengan mendorong perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi pekerja;
 8. Meningkatkan kelembagaan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan dengan penyederhanaan prosedur dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan peraturan ketenagakerjaan.
- c. Dalam rangka Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui
1. Mendorong kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha dengan membangun iklim usaha yang baik melalui peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat.
 2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan nonbank.
 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengembangan kewirausahaan.
 4. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui pengintegrasian fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor.
- d. Dalam rangka Peningkatan Promosi Pariwisata Berkelanjutan melalui
1. Pemasaran pariwisata nasional melalui pembentukan pusat promosi pariwisata Indonesia di negara-negara terpilih, serta pemberdayaan kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri;
 2. Pembangunan destinasi pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata, sehingga berdaya saing di dalam dan luar negeri;
 3. Pembangunan industri pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional, serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran melalui: (i) pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal, (ii) fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta (iii) fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata; 4. Pembangunan kelembagaan pariwisata diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pariwisata, serta organisasi kepariwisataan nasional dengan kebijakan operasional sebagai berikut: (i) berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan; (ii) meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan, memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata; serta (iii) turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan swasta.

Mengingat keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam prinsip pelaksanaan TPB/SDGs, organisasi nonpemerintah juga memiliki program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan 8 TPB/SDGs sebagaimana termuat dalam matriks 2. Beberapa program dan kegiatan organisasi nonpemerintah tersebut, antara lain: (1) studi dan pemberdayaan keberantaraan sektor kopi sebagai upaya meningkatkan nilai lebih bagi petani; (2) survei dan wawancara mendalam kepada pelaku usaha (terutama perempuan) dalam rantai hulu hilir usaha sektor kopi, garmen, dan alas kaki; (3) penguatan kapasitas kelompok masyarakat untuk meningkatkan pendapatan; (4) identifikasi gap kebijakan (program, anggaran, dan kelembagaan) di daerah; (5) asistensi terhadap pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah terkait pelatihan kerja; (6) pembangunan kemitraan multipihak dalam pelatihan kerja; serta (7) menyusun panduan teknis pelaksanaan Tujuan 8 TPB/SDGs untuk pemerintah daerah.

Target pencapaian indikator Tujuan 8 bisa dilihat pada tabel yang merupakan lampiran peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah TPB ini.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi pada tingkat nasional maupun daerah, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan TPB/SDGs.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Tim Pelaksanaan TPB/SDGs yang ditetapkan dalam pasal 7 butir b Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara itu, pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut, yang menugaskan setiap Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional. Khusus untuk pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk organisasi nonpemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tersendiri.

Tujuan Pemantauan dan Evaluasi. Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

Lingkup Pemantauan dan Evaluasi. TPB/SDGs mencakup 8 atau 10 tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs yang sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten. Masing-masing target dilaksanakan oleh instansi pelaksana. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program-program yang dibiayai baik oleh APBD maupun sumber pembiayaan lain yang sah.

4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme Pemantauan RAD Alur pemantauan RAD dilakukan dengan mengikuti arahan pembagian tugas dan fungsi yang telah dinyatakan dalam Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Aksi Daerah TPB dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 050/Kep.137-Bappelitbangda/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Kabupaten Cirebon.

Alur pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Kabupaten setiap enam bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat kabupaten yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs kabupaten melaporkan capaian RAD kepada Bupati dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs provinsi

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renaksi Pihak Non Pemerintah Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (voluntary), oleh karena itu mekanisme pelaporannya juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme "penilaian diri sukarela" (voluntary self assesment) dengan menggunakan format laporan melalui self assesment tool (SAT) yang disepakati.

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Organisasi nonpemerintah melakukan voluntary self assessment atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format self assessment tool, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan.

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara ad hoc oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

BAB V PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi-aksi atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan nonpemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya berpegang atau mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi dan no one left behind (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi untuk pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs Indonesia. Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu Tujuan/Goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari Tujuan/Goal yang lainnya. Keterkaitan antartujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah. Dalam melaksanakan RAD TPB/SDGs juga diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) perluasan penggunaan teknologi; (2) penguatan kerja sama multipihak; (3) penguatan koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; (5) pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

Perluasan Penggunaan Teknologi. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat global, juga telah diterapkan Indonesia prinsip di tingkat nasional dan daerah. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar Pemerintah, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, serta Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditempatkannya wakil-wakil dari setiap pihak dalam keanggotaan Tim Koordinasi Nasional dan Daerah TPB/SDGs. Kemitraan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara daring (online) dan luring (offline).

Penguatan Koordinasi. Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Kementerian PPN/BAPPENAS di tingkat pusat dan BAPPEDA di tingkat daerah mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan,

pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB/SDGs. Dalam aspek substansi program, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam aspek pendanaan perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs, baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari dana pemerintah (APBN dan APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

Untuk melaksanakan Rencana Aksi TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik pada lingkup Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, seminar, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.

Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah daerah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, baik secara daring (online) dan luring (offline). Pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

Pj. BUPATI CIREBON

TTD

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI B

Lampiran II Peraturan Bupati Cirebon

NOMOR : 4 Tahun 2019

TANGGAL : 12 Februari 2019

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

Matrik Target Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon oleh Kegiatan Pemerintah Daerah

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|--|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|------------------|---------------------------------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN : TANPA KEMISKINAN DAN KELAPARAN | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Tingkat kemiskinan Ekstrim | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS | Terdokumentasikannya Pemutakhiran data PMKS dan PSKS | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Sosial |
| Kegiatan 2 : Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Keluarga Miskin | Keluarga Miskin yang mempunyai Keterampilan | Kepala Keluarga | 4.366 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 2.616 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Sosial, |
| Kegiatan 3 : Fasilitasi Pengembangan Program Keluarga Harapan | Pendamping PKH memahami PKH | Kecamatan Lokasi PKH | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6.600 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi | Dinas Sosial, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|---|---|------------------|------|------|------|------|------|------|--|------------------|--------------------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 4 : Bimbingan Sosial dan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | PRSE yang mempunyai Keterampilan | Orang | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 767 | 767 | 4.767 | APBD, BANPROV, | Dinas Sosial |
| Kegiatan 5 : Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Eks Pekerja Migran Bermasalah Sosial | Eks Pekerja Migran Bermasalah Sosial Mempunyai Keterampilan Dan Memiliki KUBE (lokasi: pangenan, gebang, babakan, pabedilan) | orang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6.000 | APBD, BANPROV, | Dinas Sosial |
| Kegiatan 6 : Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan, | Percepatan Penurunan Jumlah Penduduk Miskin | Kelompok | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 260 | APBD, BANPROV, | Dinas Sosial |
| Kegiatan 7 : Fasilitasi dan Monitoring Beras Miskin / BPNT | Desa dan Kelurahan yang di fasilitasi Raskin/BPNT | Desa / Kelurahan | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 8.480 | APBD, BANPROV, | Dinas Sosial, |
| Kegiatan 8 : Bimbingan Sosial dan Keterampilan Berusaha bagi Eks | ▪ Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks WTS) Yang Telah Mempunyai Keterampilan | Orang | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.800 | APBD, BANPROV, | Dinas Sosial |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|---|---|----------------|------|------|------|------|------|------|--|------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Penyandang Penyakit Sosial | ▪ Bertambahnya eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Memiliki KUBE | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 9 : Bimbingan Sosial dan Keterampilan Berusaha bagi Eks Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan | ▪ Eks Warga Binaan Lembaga ▪ Pemasarakatan (eks WBLK) Yang Telah Mempunyai Ketrampilan ▪ Bertambahnya eks WBLK yang memiliki KUBE | Orang | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 900 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi | Dinas Sosial |
| Kegiatan 10 : Bimbingan Sosial dan Keterampilan Berusaha bagi Pemulung | ▪ Pemulung Yang Telah Mempunyai Ketrampilan ▪ Bertambahnya Pemulung yang memiliki KUBE | Orang | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 900 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi | Dinas Sosial, |
| Kegiatan 11 : Bimbingan Sosial dan Keterampilan Berusaha bagi Gelandangan dan Pengemis | ▪ Gelandangan dan Pengemis Yang Telah Mempunyai Ketrampilan ▪ Bertambahnya Gelandangan Dan Pengemis Yang Memiliki KUBE | Orang | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 900 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi | Dinas Sosial, |
| Kegiatan 12 : Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang | Tersalurkannya a Bantuan Bagi Kaum Dhuafa Dan Anak Yatim Piatu | Orang | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450 | APBD, BANPROV, | Setda, Dinas Sosial |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|--|-----------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|---------------------------------|----------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 2 : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : | | | | | | | | | | | | |
| Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni | Berkurangnya Keluarga Berumah Tidak Layak Huni | Kepala Keluarga | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 8.970 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Sosial, DPKPP, |
| Kegiatan 2 : | | | | | | | | | | | | |
| Pelayanan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Terlayannya PMKS yang singgah | Orang | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Sosial, |
| Kegiatan 3 : | | | | | | | | | | | | |
| Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Anak Jalanan | Bertambahnya Anak Jalanan yang memiliki KUBE | Orang | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.500 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Sosial |
| Kegiatan 4 : | | | | | | | | | | | | |
| Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | Bertambahnya AMPK yang memiliki KUBE | Orang | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi | Dinas Sosial |
| Kegiatan 5 : | | | | | | | | | | | | |
| | | Orang | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | APBD, BANPROV, | Dinas Sosial, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|---|-----------|----------------|------|------|------|------|------|------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) | Bertambahnya ABHn yang memiliki KUBE | | | | | | | | | | APBN, | |
| Kegiatan 6 : Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana | Korban bencana mendapat bantuan sosial | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN, | Setda, Dinas Sosial, BPBD |
| Kegiatan 7 : Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa | Korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi | Setda, Dinas Sosial |
| PROGRAM 3 : Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Karang Taruna yang telah mempunyai ketrampilan ▪ Bertambahnya Karang Taruna yang memiliki KUBE | Orang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.000 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial |
| Kegiatan 2 : Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Bertambahnya Orsos yang mendapatkan bantuan sosial | Kecamatan | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 400 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Sosial |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|---|----------|----------------|------|------|------|------|-----------------|-----------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3 : | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Bimbingan sosial kepada PSM. 40 PSM | Kelompok | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 600 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Sosial |
| Kegiatan 4 : | | | | | | | | | | | | |
| Fasilitasi Penyuluhan Kepedulian Sosial | Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang kesetiakawanan social, 1000 orang | Orang | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 (kumulatif) | 100 (kumulatif) | 600 | APBD, BANPROV, | Setda, Dinas Sosial, |
| Kegiatan 5 : | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Keterampilan Tenaga Pendamping Sosial | tenaga pendamping yang mendapat bimbingan | orang | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 450 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi | Setda, Dinas Sosial, |
| Kegiatan 6 : | | | | | | | | | | | | |
| Pelatihan dan Pemantapan Relawan Penanggulangan Bencana | Terlatihnya Relawan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam | orang | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 900 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi | Setda, Dinas Sosial, BPBD, Filantropi |
| PROGRAM 4 : Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : | | | | | | | | | | | | |
| Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia | Lanjut Usia Yang Mendapat Bantuan Sosial | Orang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 kumulatif) | 100 (kumulatif) | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi | Setda, Dinas Sosial, BKAD |
| Kegiatan 2 : | | | | | | | | | | | | |
| Operasionalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo | Bertambahnya panti asuhan/ jompo yang mendapatkan bantuan sosial | Panti | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 720 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi | Setda, Dinas Sosial, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|----------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 5 : Program Pembinaan Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar | Bertambahnya anak terlantar yang memiliki KUBE | Kelompok | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 900 | APBD, BANPROV, APBN, | Setda, Dinas Sosial, |
| INDIKATOR : Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat | Jumlah Masyarakat Miskin Yang Termasuk Ke Dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah | Kepala Keluarga | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 (kumulatif) | 70 (kumulatif) | 30.600 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial |
| Kegiatan 2 : Meningkatkan Jaminan Dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan | Terlayannya PBI Daerah Peserta BPJS sebanyak 213.645 jiwa | Jiwa | 213.645 | 213.645 | 213.645 | 213.645 | 213.645 | 213.645 | 213.645 | 640.935 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial |
| INDIKATOR : Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Percepatan penurunan jumlah penduduk miskin | Meningkatnya penyandang cacat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya | Orang | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 6.409 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Dinas Sosial, |
| Kegiatan 2 : Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat | Bantuan sosial kepada ODKB sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya | Orang | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Dinas Sosial, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|--|----------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3 : Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma | Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma yang telah mempunyai Ketrampilan | Orang | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 900 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Sosial, |
| Kegiatan 4 : Bimbingan Sosial dan Pemberian Alat Bantu bagi Para Penyandang Disabilitas | Para Penyandang Disabilitas yang mendapatkan alat bantu | Orang | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 2.160 | APBD, BANPROV, APBN, | Setda, Dinas Sosial, |
| Kegiatan 5 : Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Eks Kronis | Penyandang disabilitas eks kronis yang telah mempunyai ketrampilan | Orang | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 864 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi | Setda, Dinas Sosial, |
| Kegiatan 6 : Unit Pelayanan Sosial Keliling bagi Penyandang Disabilitas | Penyandang disabilitas mendapatkan rekomendasi untuk tindak lanjut | Orang | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 648 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi | Setda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 7 : Sosialisasi Program Kegiatan bagi Keluarga dengan Penyandang Disabilitas Eks Psikotik | Sosialisasi program kegiatan kepada keluarga penyandang disabilitas eks psikotik | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 540 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi | Setda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|---------------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan. | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Pembinaan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pembinaan Kesehatan Keluarga | 1. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4) | Orang | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 23.976 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 2. Puskesmas dan Pustu yang melaksanakan kelas ibu hamil | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 768 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 3. Puskesmas dan Pustu yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 2.565 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 2 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan | Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4) | Orang | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 30.238 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| PROGRAM 2 : Program Sosialisasi dan Pendampingan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Sosialisasi Kesehatan bagi Ibu Hamil | Peningkatan pengetahuan dan pemahaman ibu hamil tentang pelayanan antenatal ke empat (K4) | Orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 18.000.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 2 : Pendampingan Kesehatan Ibu Hamil | Peningkatan jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4) | Orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 18.000.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|--|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|---------------------|-----------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Bayi dan Balita | Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Penanganan Komplikasi neo, MTBS dan SDIDTK | Orang | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 19.800 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 2 : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita | Pelayanan bayi muda dgn MTBM Peningkatan kunjungan bayi dan balita | Orang | 231.162 | 231.162 | 231.162 | 231.162 | 231.162 | 231.162 | 231.162 | 138.697 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 3 : Peningkatan Imunisasi | Terlaksananya pelayanan imunisasi pada bayi dan anak di bawah dua tahun | Orang | 231.162 | 231.162 | 231.162 | 231.162 | 231.162 | 231.162 | 231.162 | 277.394 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Filantropi |
| Kegiatan 4 : Penyiapan tenaga vaksinator terlatih | Setiap PKM dan pustu memiliki Tenaga vaksinator / pelaksana cold chain yang telah mengikuti pelatihan menggunakan modul latihan tenaga imunisasi | Puskesmas dan pustu | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 13.824 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan |
| PROGRAM 2 : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Surveilans dan Karantina Kesehatan | 1. Puskesmas yang mendapatkan peningkatan antigen imunisasi | Puskesmas | 57 (100%) | 57 (100%) | 57 (100%) | 57 (100%) | 57 (100%) | 57 (100%) | 57 (100%) | 13.824 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|--|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pelayanan Kontrasepsi | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pelayanan KB Medis Operasi | Jumlah peserta KB MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang) MOP/MOW | Orang | 354.676 | 354.676 | 354.676 | 354.676 | 354.676 | 354.676 | 354.676 | 354.676 | 212.806 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas PPKBP3A |
| PROGRAM 2 : Program Pembinaan dan Pendampingan Pelayanan Kontrasepsi | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Sosialisasi KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) | Peningkatan pengetahuan PUS tentang berbagai macam metode KB dan dampaknya | Orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 18.000.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas PPKBP3A |
| Kegiatan 2 : Pendampingan pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) | Peningkatan jumlah kepesertaan KB | Orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 18.000.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas PPKBP3A |
| INDIKATOR : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Proporsi populasi penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan | 1. Sambungan Rumah (SR) dikawasan regional | SR | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 165 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan, |
| | 2. Sambungan Rumah (SR) di IbuKota Kawasan | SR | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 165 | APBD, BANPROV | Diskimrumtan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp. Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------|------|----|---|---------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 3. Sambungan Rumah (SR) diperdesaan berbasis masyarakat | SR | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 165 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan, |
| | 4. Sambungan Rumah (SR) dikawasan kumuh perkotaan | SR | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 165 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan, PDAM |
| | 5. Sambungan Rumah (SR) dikawasan nelayan | SR | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 165 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan, |
| | 6. Sambungan Rumah (SR) dikawasan rawan air | SR | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 165 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan, F |
| | 7. Kawasan MBR terfasilitasi pengembangan jaringan SPAM PDAM | Kawasan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 420 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan, PDAM, |
| | 8. Kawasan MBR terfasilitasi pengembangan jaringan SPAM Non- PDAM | Kawasan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 420 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan, |
| | 9. Kecamatan mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum | Kecamatan | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 420 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan, Filantropi |
| Kegiatan 2 : Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan | Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan | Kecamatan | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.000 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM, F |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|---|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---------------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3 : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan | 1. Terbangunnya IPAL Terpusat Skala Kota | Kecamatan | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.000 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2. Tebangunnya IPAL Terpusat Skala Kawasan | Kecamatan | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.000 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan, Dinas LH, |
| | 3. Terbangunnya IPLT Setempat | Kecamatan | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.000 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan, Dinas LH, |
| PROGRAM 2 : Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Kegiatan Penyehatan Lingkungan | Desa/kelurahan yang melaksanakan STBM | Desa / Kelurahan | 260 | 272 | 283 | 295 | 307 | 318 | 318 | 8.675 | APBD, BANPROV, | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan, |
| | Sarana air minum yang dilakukan pengawasan | Desa / Kelurahan | 260 | 272 | 283 | 295 | 307 | 318 | 318 | 8.675 | APBD, BANPROV, | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan, |
| INDIKATOR : Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Keg. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman | 1. Kawasan kumuh perkotaan | Ha | 78,78 | 65,65 | 52,52 | 39,39 | 26,26 | 13,13 | 13,13 | 32.825 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan, Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas PMD, desa |
| Kegiatan 2 : Pengembangan Perumahan Swadaya | 1. Jumlah MBR yang menerima pemberdayaan dan meningkat keswadaanya | MBR | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 750 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, Dinas PMD |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|---|----------------|------|------|------|------|------|------|----|--|----------------------|-------------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Pengembangan Perumahan Swadaya | 2. Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya | RT | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 750 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, desa |
| | 3. Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh akses terhadap KPR Swadaya | RT | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 750 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, |
| | 4. Jumlah rumah tangga , daerah terpencil, pedesaan daerah tertinggal yang terfasilitasi peningkatan kualitas rumah | RT | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 750 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, |
| INDIKATOR : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD | 1. Ruang Kelas SD yang dibangun | Ruang | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43.703 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan Dinas Pendidikan |
| | 2. Sekolah SD yang dibangun | Sekolah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.000 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan Dinas Pendidikan |
| | 3. Ruang kelas SD yang direhabilitasi | Ruang | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.100 | APBD, APBN, BANPROV, | Diskimrumtan Dinas Pendidikan |
| | 4. Siswa Paket A yang menerima bantuan operasional | Kecamatan | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6.390 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan Dinas Pendidikan |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|---|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------------|------------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD | 5. SD yang mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) | Sekolah | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 576 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan |
| | 6. SD yang mendapatkan bantuan peralatan pendidikan | Sekolah | 155 | 155 (lanjutan) | 155 (lanjutan) | 155 (lanjutan) | 155 (lanjutan) | 148 (lanjutan) | 148 (lanjutan) | 92.300 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan |
| | 7. SD yang mendapatkan pembinaan akreditasi | Sekolah | 155 | 155 (lanjutan) | 155 (lanjutan) | 155 (lanjutan) | 155 (lanjutan) | 148 (lanjutan) | 148 (lanjutan) | 557 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan |
| | 8. Siswa SD penerima bantuan melalui KIP | Orang (siswa) | 20.193 | 20.193 | 20.193 | 20.193 | 20.193 | 20.193 | 20.193 | 145.390 | APBD, APBN, BANPROV, | Dinas Pendidikan |
| INDIKATOR : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat . | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Persentase Penduduk usia 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Pendidikan Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP | 1. Siswa SMP yang mendapatkan bantuan operasional SMP Terbuka | Orang | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 840 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan |
| | 2. SMP Terbuka yang menerima bantuan operasional | Sekolah | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 408 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan |
| | 3. Siswa Paket B yang menerima bantuan operasional | Orang | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 594 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan |
| | 4. Sekolah berasrama yang dibangun | Sekolah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, Dinas PUPR |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|---|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|---------------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP | 5. Sekolah SMP yang dibangun | Sekolah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.000 | APBD, APBN, BANPROV | Dinas Pendidikan |
| | 6. Sekolah SD-SMP satu atap yang dibangun | Sekolah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan |
| | 7. Ruang kelas SMP yang dibangun | Ruang | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 43.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan |
| | 8. Ruang kelas SMP yang direhabilitasi | Ruang | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 27.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan |
| | 9. Siswa SMP yang mendapatkan beasiswa bakat dan berprestasi | Orang | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 936 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan |
| | 10. Sekolah SMP yang mendapatkan bantuan peralatan pendidikan | Sekolah | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan |
| | 11: SMP yang mendapatkan pembinaan akreditasi | Sekolah | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 900 | APBD, APBN, BANPROV | Dinas Pendidikan |
| | 12. Siswa SMP penerima bantuan melalui KIP | Orang | 15.615 | 15.615 | 15.615 | 15.615 | 15.615 | 15.615 | 15.615 | 93.690 | APBD, APBN, BANPROV | Dinas Pendidikan |
| PROGRAM 2 : Program Penataan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil | Anak yang memiliki akta kelahiran | orang | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | APBD, BANPROV, APBN | Disdukcapil, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|---|------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 3 : Program Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Peningkatan Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Secara Online + SMS Gateway | Terpenuhinya Data Perkawinan dan Perceraian di Kabupaten Cirebon | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | APBD, BANPROV, APBN | Disdukcapil, |
| Kegiatan 2 : Penataan Pelayanan Perkawinan dan Perceraian | Terpenuhinya Data Perkawinan dan Perceraian di Kabupaten Cirebon | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | APBD, BANPROV, APBN | Disdukcapil, |
| Kegiatan 3 : Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Secara Mobile | Meningkatnya Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian sesuai SOP | Orang | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 540 | APBD, BANPROV, APBN | Disdukcapil, |
| Kegiatan 4 : Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian | Meningkatnya Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian sesuai SOP | Orang | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 540 | APBD, BANPROV, APBN | Disdukcapil, |
| INDIKATOR : Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Terlaksananya distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh tani dan nelayan | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penataan Penguasaan Tanah | Tersedianya sistem penataan, penguasaan, pemilikan, dan pengalihan hak atas tanah | Dokumen / sistem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, BPN, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|--|------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|--|---------------------|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penataan Penguasaan Tanah | Tersedianya informasi penggunaan tanah berupa data dan peta | Dokumen / sistem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | APBD, BANPROV, APBN | Berenlitbangda, Diskimrumtan, BPN, |
| Kegiatan 2 : Penyempurnaan Kelembagaan dan Pengembangan Administrasi Pertanahan | Tersedianya dokumen pertanahan dengan menggunakan teknologi mutakhir | Dokumen / sistem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | APBD, BANPROV, APBN | Berenlitbangda, Diskimrumtan, BPN, |
| Kegiatan 3 : Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pertanahan | Adanya peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas penataan pertanahan bagi petugas DPKPP | Kegiatan | - | 1 | - | - | - | - | - | 300 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, BPN, |
| Kegiatan 4 : Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Terpenuhinya Kebutuhan Tanah untuk Kepentingan Umum di 11 lokasi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanah untuk Pembangunan Kampus ITB ▪ Tanah untuk TPSA ▪ Tanah untuk Pembangunan Mesjid di Gunungjati ▪ Tanah untuk BBI Perikanan ▪ Tanah untuk Balai Pembibitan Sapi ▪ Tanah untuk Kantor UPT Pertanian ▪ Tanah untuk Kantor Damkar | lokasi | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | 109.355 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Berenlitbangda, Diskimrumtan, BPN, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|---|------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | 1. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Barenlitbangda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 2. Pengembangan Pangan Lokal | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Barenlitbangda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, |
| | 3. Bantuan bahan makanan pokok bagi warga terancam rawan pangan ekstrim | Kepala Keluarga | 4.366 | 4.148 | 3.940 | 3.743 | 3.556 | 3.378 | 3.378 | 11.566 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, |
| | 4. Jumlah desa P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) | Desa / Kelurahan | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 8.480 | APBD, BANPROV, APBN | Barenlitbangda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, |
| | 5. Promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Barenlitbangda, Dinas Ketahanan Pangan |
| Kegiatan 1: Pengembangan Penganekaragaman | 6. Penyediaan tenaga/ petugas lapangan | Orang | 40 | 40 (lanjutan) | 4.320 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|----------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Konsumsi dan Keamanan Pangan | 7. Penanganan Keamanan Pangan segar tingkat produsen dan konsumen | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 8. Terlaksananya pemantauan dan pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan (termasuk skor PPH dan tingkat konsumsi energi rata-rata penduduk) | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Ketahanan Pangan |
| | 9. Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi penganeekaragaman dan keamanan pangan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Ketahanan Pangan |
| PROGRAM 2 : Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Peningkatan Pembinaan Gizi Masyarakat | 1. Persentase balita gizi buruk dirawat sesuai standar | Orang | 182 | 137 | 102 | 77 | 58 | 43 | 43 | 898 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas kesehatan |
| | 2. Presentase bayi usia 0-8 bulan mendapat ASI Eksklusif | Orang | 182 | 137 | 102 | 77 | 58 | 43 | 43 | 898 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas kesehatan |
| | 3. Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium | Kepala Keluarga | 455.874 | 470.869 | 485.859 | 500.852 | 515.845 | 529.778 | 529.778 | 898 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|---------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | |
| 4. Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A | Orang | 45.722 | 46.107 | 46.582 | 47.058 | 47.533 | 47.533 | 47.533 | 16.832 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan |
| 5. Persentase pelaksanaan surveilans gizi | Kepala Keluarga | 4.366 | 4.148 | 3.940 | 3.743 | 3.556 | 3.378 | 3.378 | 2.213 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan |
| 6. Persentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk daerah bencana | Bayi (100%) | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 579 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial, |
| 7. Jumlah (persentase) Puskesmas dengan tenaga terlatih Tatalaksana Anak Gizi Buruk | Puskesmas dan Pustu | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| 8. Jumlah (persentase) RSUD dengan tenaga terlatih Tatalaksana Anak Gizi Buruk | RSUD | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, RSUD Waled, RSUD Arjawinangun |
| 9. Persentase balita ditim bang di Posyandu (D/S) | Anak | 45.702 | 46.173 | 46.644 | 47.115 (100%) | 47.115 (100%) | 47.115 (100%) | 47.115 (100%) | 600 | APBD, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas PMD |
| 10. Persentase Puskesmas memiliki tenaga terlatih pemantauan pertumbuhan | Puskesmas dan Pustu | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Filantropi |
| 11. Persentase Pembinaan kader di Posyandu | Posyandu | 2.533 | 2.558 (100%) | 2.558 (100%) | 2.558 (100%) | 2.558 (100%) | 2.558 (100%) | 2.558 (100%) | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas PMD |
| 12. Persentase Puskesmas memiliki konselor menyusui | Puskesmas dan Pustu | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|---|--|---------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|------------------|---------------------|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | | |
| | 13. Persentase Puskesmas membina kelompok pendukung ASI | Puskesmas dan Pustu | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 2 : Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak | 1. Persentase ibu hamil mendapat tablet Fe 90 table | orang | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 2. Persentase ibu hamil KEK mendapat PMT | Orang | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 3. Persentase bayi 6-12 bulan dan anak 1-5 tahun mendapat kapsul vitamin | Orang | 196.488 | 231.162 (100%) | 231.162 (100%) | 231.162 (100%) | 231.162 (100%) | 231.162 (100%) | 231.162 (100%) | 231.162 (100%) | 3.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 4. Persentase Kunjungan Ibu Hamil ke-4 (K4) | Orang | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 5. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) | Orang | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 912 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, RSUD Waled dan Arjawinangun |
| PROGRAM 3 : Aksesibilitas Pangan | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pengembangan Ketersediaan Pangan | 1. Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan | desa | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 (kumulatif) | 20 (kumulatif) | | | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas PMD, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|--|---------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan di daerah rawan pangan | unit | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (kumulatif) | 7 (kumulatif) | 6.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas PMD |
| | 3. Penanganan daerah rawan pangan | Kepala Keluarga | 4.366 | 4.148 | 3.940 | 3.743 | 3.556 | 3.378 | 3.378 | 11.566 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian |
| | 4. Ketersediaan data rawan pangan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.500 | APBD, BANPROV, APBN | Barenlitbangda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian |
| | 5. Pemantauan dan pemantapan ketersediaan dan kerawanan pangan (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian |
| Kegiatan 2 : Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan | 1. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di daerah produsen pangan | unit | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (kumulatif) | 7 (kumulatif) | 6.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas PMD |
| | 2. Tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian |
| | 3. Terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|--|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|------------------|----------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penyusunan Necara bahan bahan makanan | Tersusunnya Situasi Konsumsi Pangan Penduduk | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian |
| Kegiatan 2 : Penyusunan Database Potensi Produk Pangan | Tersusunnya dokumen alur distribusi hasil produksi dan tata niaga hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian |
| Kegiatan 3 : Bantuan bahan makanan pokok bagi keluarga terancam rawan pangan ekstrim | Tersalurkannya bantuan bahan makanan pokok bagi keluarga terancam rawan pangan ekstrim di luar keluarga penerima raskin/BPNT | Kepala Keluarga | 4.366 | 4.148 | 3.940 | 3.743 | 3.556 | 3.378 | 3.378 | 11.566 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, |
| INDIKATOR : Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Bantuan bahan makanan pokok bagi keluarga terancam rawan pangan ekstrim | Kepala Keluarga | 4.366 | 4.148 | 3.940 | 3.743 | 3.556 | 3.378 | 3.378 | 11.566 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, |
| INDIKATOR : Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis | Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan | Kelas (kegiatan) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pertanian, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | | |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------|--|------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2024 | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis | ▪ Kemandirian petani dalam melaksanakan kegiatan usahatani yang berorientasi agribisnis | kegiatan | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pertanian, Akademis, Dunia Usaha, Filantropi |
| | ▪ Terselenggaranya a Penyuluhan di Kabupaten Cirebon ▪ Berfungsinya Pos Pelayanan Penyuluhan Pertanian Tingkat Desa | Kecamatan | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16.000 | APBD, BANPROV, APBN, DUNIA USAHA |
| Kegiatan 3 : Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani | ▪ Dokumen Penilaian Kelas Kelompok ▪ Lomba Petani,THL, Penyuluh PNS dan Penyuluh Swad aya ▪ Lomba BPP berprestasi Tk.Kabupaten, Provinsi dan Nasional ▪ PENAS, Pasar Tani Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional ▪ Pemantapan Kelembagaan Petani dan KWT | Kegiatan | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3.438 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, |
| INDIKATOR : Ketersediaan pangan komoditi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Peningkatan Ketahanan Pangan | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 2 : Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan yang akan Dipasarkan | Terlaksananya pelatihan teknis kemasan terlaksananya pelatihan teknis kemasan | kegiatan | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|--|---|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------|------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah | - Terlaksannya pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan asal hewan - Terawasinya hewan qurban yang dijual sehat dan layak Hewan Qurban | kegiatan | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 600 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pertanian |
| Kegiatan 3 : Pengembangan Kawasan Mangga Gedong Gincu | Meningkatnya Kualitas Produk Mangga dengan Penerapan GAP dan GHP melalui Sekolah Lapangan | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 600 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pertanian, |
| Kegiatan 4 : Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan | Pengembangan kawasan tanaman buah selain Mangga Gedong Gincu | Ha | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 (lanjutan) | 50 (lanjutan) | 1.800 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pertanian |
| | Pengembangan registrasi kebun tanaman buah | pohon | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 kumulatif | 12.000 (kumulatif) | 1.950 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pertanian | |
| | Perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 750 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pertanian, |
| | Perbaikan mutu pengelolaan pasca panen tanaman buah | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 750 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pertanian, |
| | Pengembangan registrasi packing house | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 750 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pertanian, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|---|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|----------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan jumlah kelembagaan usaha Tanaman Buah | Kelompok | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 1.800 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pertanian, Dinas Koperasi UMKM, |
| Kegiatan 5 : Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap | Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton) | ton | 28.000 | 29.400 | 30.870 | 32.414 | 34.034 | 35.736 | 35.736 | 12.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dislakan, |
| Kegiatan 6 : Peningkatan Prod. Perikanan Budidaya | Volume produksi (juta ton) | Lokasi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dislakan |
| Kegiatan 7 : Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan | ▪ Volume produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah dengan kemasan dan mutu terjamin (juta ton) | Ton | 15.000 | 15.750 | 16.538 | 17.364 | 18.233 | 19.144 | 19.144 | 1.800 | APBD, BANPROV, APBN | Dislakan, Dinas Perdagangan Perindustrian, |
| | ▪ Jumlah rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional dan kabupaten (kg) | Kg per kapita | 25,50 | 26,78 | 28,11 | 29,52 | 31,00 | 32,55 | 32,55 | 1.800 | APBD, BANPROV, APBN | Dislakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 8 : Kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan | ▪ Jumlah pelepasan ikan dan pasar ikan yang berfungsi sesuai standar | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dislakan, Dinas Perdagangan Perindustrian, |
| | ▪ Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) | lokasi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5.600 | APBD, BANPROV, APBN | Dislakan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, |
| Kegiatan 9 : Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan | Jumlah kelompok potensi perikanan yang disuluh | Kelompok | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18.000 | APBD, BANPROV, APBN, | Dislakan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|---|----------------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|--|--|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Berkembangnya usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan yang kurang mampu | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perkebunan, Perikanan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna | Tersedianya alsin dan pengendalian hama | Paket | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 (kumulatif) | 12 (kumulatif) | 3.600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pertanian, Dinas PMD, Dinas Koperasi UMKM, |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya Kegiatan kaji terap Teknologi Padi Sawah ▪ Terlaksananya Kegiatan kaji Terap Bio Teknologi Bawang Merah ▪ Terlaksananya Kegiatan kaji Terap Penggunaan TSS Bawang Merah ▪ Terlaksananya Kegiatan kaji Terap Padi Varietas Baru Padi Sawah ▪ Terlaksananya kaji Terap tanaman perkebunan | Kegiatan | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3.438 | APBD, BANPROV, APBN, FILANTROPI, DUNIA USAHA | Dinas Pertanian, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Akademis, Dunia Usaha, Filantropi |
| Kegiatan 3 : Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan | Terlaksananya penangkaran benih/bibit : pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan | Kelompok | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 kumulatif | 12 (kumulatif) | 3.600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pertanian, Dinas kelautan perikanan |
| INDIKATOR : Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pemetaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan | Tersusunnya peta kawasan pertanian pangan berkelanjutan | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | 500 | APBD, BANPROV, APBN | Barenlitbangda, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|--|------------------|------|------|------|------|------|-----------------|-----------------|--|--|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering | Tersedianya bibit tanaman buah-buahan dan toga, intensifikasi Pekarangan , Irigasi tanah dalam dalam mendukung Agrowisata serta kegiatan penunjang | Paket | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pertanian, Dinas PMD, Akademis, Dunia Usaha, Filantropi |
| Kegiatan 3 : Registrasi Penilaian Lahan Usaha/ Kebun | Teregistrasinya lahan usaha/kebun kelompok Terlaksananya Pertemuan TOT | Orang / kelompok | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3.438 | APBD, BANPROV, APBN, FILANTROPI, DUNIA USAHA | Dinas Pertanian, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Akademis, Dunia Usaha, Filantropi |
| PROGRAM 2 : Program Rehabilitasi Lahan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Lahan | Pemanfaatan lahan kritis untuk kegiatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan | Ha | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 (kumulatif) | 70 (kumulatif) | 600 | APBD, BANPROV, APBN, F | Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, |
| Kegiatan 2 : Pencanangan Gerakan Menanam Pohon | Meningkatnya ruang terbuka hijau dan menurunnya luasan lahan kritis di wilayah kabupaten cirebon | Ha | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 (kumulatif) | 7,0 (kumulatif) | 900 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, |
| INDIKATOR : Tersalurkannya sarana produksi pertanian, peternakan dan perikanan, terutama pupuk, benih dan alat mesin pertanian/perikanan | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penyuluhan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan | Terlaksananya pelatihan produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. 270 gapoktan dan 80 kelompok garam rakyat | Kelompok | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.400 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pertanian, Dislahan, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangani |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------|------|--|------------------|--|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Penyediaan Sarana Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan | Terlaksananya bantuan sarana produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan melalui 270 gapoktan dan 80 kelompok garam rakyat | kegiatan | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 54.600 | APBD, BANPROV, APBN, FILANTROPI, DUNIA USAHA | Dinas Pertanian, Dislakan, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Akademis, Dunia Usaha, Filantropi |
| Kegiatan 3 : Pengembangan Bibit Unggul Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbangunnya Kebun Bibit Datar (KBD) Tebu ▪ Terlaksananya Pengembangan Unggas Lokal dan Aneka Ternak ▪ Terlaksananya Pengembangan Ternak Ruminansia ▪ Pengembangan Pelayanan Rumah Potong Hewan ▪ Terlaksananya temu lapang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan ▪ Terlaksananya temu teknis Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan | Paket | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pertanian, Dislakan, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Akademis, Dunia Usaha, Filantropi |
| Kegiatan 4 : Penunjang Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan kegiatan pengembangan tebu rakyat ▪ Terlaksananya pendampingan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan | kegiatan | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 5.460 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pertanian, Dislakan, Dinas Ketahanan Pangan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 5 : Penyediaan Sarana Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan | Tersedianya sarana produksi Pertanian, Perkebunan, Sarana pembibitan ternak, Peternakan dan Perikanan. | kegiatan | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 54.600 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi, Dunia Usaha | Dinas Pertanian, Dislakan, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Akademis, |
| Kegiatan 6 : Peningkatan Infrastruktur Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan | Tersedianya sarana infrastruktur yang memadai kegiatan produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. | Paket | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80.000 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi, Dunia Usaha | Dinas Pertanian, Dislakan, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUUR, |
| Kegiatan 7 : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna | Terlaksananya pelatihan inseminasi buatan | Paket | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80.000 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pertanian, Dislakan, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, |
| TUJUAN : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Meningkatkan akses Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer rawat jalan, rawat inap dan pelayanan kesehatan khusus | Meningkat nya kualitas kesehatan masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cakupan K4 ▪ Cakupan KN Lengkap ▪ Cakupan Kunjungan Bayl . ▪ Cakupan Kunjungan Balita ▪ Presentasi Kasus Gizi Buruk yang di Tangani | Orang | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 23.976 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp. Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|---|--|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------------|---------------------|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBÓN | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Intervensi gizi dan kesehatan | 1. Terselenggaranya pelatihan manajemen program gizi di puskesmas bagi pimpinan dan petugas puskesmas dan jaringannya | Puskesmas dan Pustu | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 2. Tersedianya biaya operasional bagi Puskesmas untuk pembinaan Posyandu, pelacakan kasus, kerjasama Pekerja Sosial Masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat | Puskesmas dan Pustu | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 600 | APBD, BANPROV, APBN |
| | 3. Terpenuhi kebutuhan sarana antropometri dan KIE bagi Puskesmas dan jaringannya | Orang | 2.291 | 2.291 | 2.291 | 2.291 | 2.291 | 2.291 | 2.291 | 2.291 | 82.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, DPPKBPPPA |
| | 4. Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi petugas Puskesmas perawatan maupun Kader Posyandu | Puskesmas dan Pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 5. Tersusunnya pedoman Promosi keluarga sadar gizi (KADARZI) | Puskesmas dan Pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 3 : Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terselenggaranya Istem pelaporan, diseminasi, informasi dan pemanfaatannya ▪ Tersedianya data gizi secara reguler (pemantauan status gizi, untuk semua kelompok | Puskesmas dan Pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|--|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|---------------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| | umur, pemantauan konsumsi gizi, kelaparan dan kurang gizi, khususnya gizi buruk pada tingkat desa, kecamatan dan kabupaten | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Unmet need pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan | Meningkatnya jumlah petugas dlm peningkatan mutu pel kesehatan dasar (pengobatan rasional, pel. Kes gigi, pel laboratorium, labkesda dan pel kegawatdaruratan Puskesmas 57 dokter dan 114 perawat, 4%, 57 pkm, 57 pkm+1 labkesda, 57 petugas kegawatdaruratan | Puskesmas dan Pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 2 : Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan | Jumlah pos kesehatan lebaran, natal dan tahun baru terbentuk dan P3K, Pelayanan P3K, Peningkatan kemampuan teknis petugas dalam penanganan kasus kegawatdaruratan dan bencana. | Puskesmas, Pustu, Poskesdes | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 3 : Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan | Jumlah yang menerima biaya operasional dan pemeliharaan | Puskesmas, Pustu, UPT | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 13.200 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|---|----------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 4 : Pelayanan Operasi Katarak | Jml Penderita katarak yang ditemukan (penjaringan kasus) dari keluarga miskin dapat dilakukan operasi | Orang | 332 | 266 | 212 | 170 | 136 | 109 | 80 | 3.320 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi, Dunia Usaha | Dinas Kesehatan, RSUD Waled, RSUD Arjawinangun |
| Kegiatan 5 : Pelayanan Kesehatan Pengembangan/ Khusus | Jumlah petugas Puskesmas yang mampu melaksanakan upaya kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan indera, kesehatan komunitas, kesorga, dan kesehatan tradisional | puskesmas | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 4.104 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Kesehatan, Filantropi, Dunia Usaha |
| Kegiatan 6 : Pelayanan Perizinan Praktik Perorangan dan Pembinaan Sarana Kesehatan | Legalisasi praktek perorangan 100% | Orang | 128 | 134 | 141 | 148 | 156 | 163 | 170 | 3.300 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 7 : Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Untuk Puskesmas | Terselenggaranya Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas | Puskesmas | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 342.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 8 : Penilaian Kinerja Puskesmas | Meningkatnya cakupan puskesmas dengan kinerja baik | Puskesmas | 34 | 40 | 46 | 51 | 57 | 60 | 60 | 180.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 9 : Akreditasi Sarana Kesehatan Swasta | Terakreditasinya sarana kesehatan swasta | Puskesmas | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 90.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|---|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|---------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 10 : Akreditasi Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang terakreditasi, | Puskesmas | 34 | 40 | 46 | 51 | 60 | 60 | 60 | 180.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Filantropi, Dunia Usaha |
| INDIKATOR : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Prevalensi anemia pada ibu hamil | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Pembinaan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pembinaan Gizi Masyarakat | 1. Balita kurus yang mendapat makanan | Orang | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 47.936 | 23.976 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 2. Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan | Orang | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 3. Ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah(TTD) 90 tablet selama masa kehamilan | Orang | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 4. Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan | Orang | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 5. Bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) | Puskesmas dan Pustu | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 128 (100%) | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|----------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | 1. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | 2. Pengembangan Pangan Lokal | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dislakan |
| PROGRAM 2 : Program Mutu Dan Keamanan Pangan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pengawasan Obat dan Makanan | 1. Proporsi makanan yang memenuhi syarat | Kepala Keluarga | 4.366 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 2.616 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Kesehatan |
| Kegiatan 2 : Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya | 1. Persentase makanan yang mengandung cemaran bahan berbahaya/dilarang | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, |
| Kegiatan 3 : Inspeksi dan Sertifikasi Makanan | 1. Persentase sarana produksi makanan bayi dan anak yang memenuhi standar GMP yang terkini 2. Persentase sarana produksi makanan bayi dan anak yang memenuhi standar GMP yang terkini | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|------------------|--|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Persentase sarana penjualan makanan yang memenuhi standar GRP/GDP | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 4 : Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan Pengawas Pangan Kabupaten / Kota (District Food Inspector) | Jumlah tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan Pengawas Pangan Kabupaten/ Kota (District Food Inspector) | Kecamatan | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16.000 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, |
| Kegiatan 5 : Bimbingan Teknis pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Penyusunan Modul Penerapan Prinsip-prinsip Keamanan Pangan pada Proses Produksi di IRTP Berdasarkan Jenis Produknya 2. Jumlah IRTP yang Dilatih dan Difasilitasi Penerapan Prinsip-prinsip Keamanan Pangan pada Proses Produksi di IRTP Berdasarkan jenis produknya 3. Jumlah IRTP yang Dilatih dan Difasilitasi Disain dan Implementasi Cara Produksi Produk Pangan yang Baik (CPPB) pada Industri Rumah Tangga 4. Monitoring dan Verifikasi Penerapan CPPB pada Industri Rumah Tangga | Orang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.000 | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|---|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|--|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 6 : Bimbingan Teknis dan Monitoring pada Kantin Sekolah | 1. Jumlah Kantin Sekolah yang Dilatih dan Difasilitasi Penerapan Prinsip-prinsip Keamanan Pangan di Kantin Sekolah 2. Monitoring dan Verifikasi Pelaksanaan Bimtek pada Kantin Sekolah | Sekolah (SD, MI, SMP, MTs) | 343 | 412 | 480 | 549 | 617 | 686 | 700 | 3.000 | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan |
| PROGRAM 3 : Kelembagaan Pangan Dan Gizi | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Eningkatan Kelembagaan Pangan dan Gizi | 1. Jumlah tenaga kesehatan gizi di puskesmas | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 2.565 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 2. Jumlah kecamatan yang mempunyai tenaga PPL pertanian yang mengikuti pelatihan pangan dan gizi | Kecamatan | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16.000 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan,, Dinas Ketahanan Pangan, |
| PROGRAM 4 : Pendirian dan pengelolaan Rumah Gizi | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Sosialisasi Gizi bagi remaja putri, ibu hamil, ibu dengan balita, ibu dengan anak stunting, gizi buruk dan gizi kurang. | Peningkatan pengetahuan bagi remaja putri, ibu hamil dan keluarga, ibu dengan balita dan keluarga, ibu dengan anak stunting, anak gizi buruk, anak kurang gizi dan keluarga tentang gizi dan keutamaannya | Orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 18.000.000 | APBD, BANPROV, APBN, APBDes | Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa |
| Kegiatan 2 : Konseling Gizi dan Koseling Menyusui bagi masyarakat | Penurunan jumlah anak kurang gizi, jumlah stunting, jumlah malnutrisi, jumlah kasus anemia pada ibu hamil serta peningkatan jumlah bayi yang lulus ASI Eksklusif | orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 18.000.000 | APBD, BANPROV, APBN, APBDes | Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|----------------------|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Angka Kematian Ibu (AKI) | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Pembinaan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pembinaan Gizi Masyarakat | 1. Ibu hamil KEK yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) | Orang | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, PKK, Filantropi, Dunia Usaha |
| Kegiatan 2: Pembinaan Kesehatan Keluarga | 1. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan | Orang | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.861 | 3.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, PKK, Filantropi, Dunia Usaha |
| | 2. Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 2.565 | APBD, APBN | Dinas Kesehatan, Filantropi |
| | 3. Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 3: Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer | 1. Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS | Puskesmas | 57 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 13.824 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 2. Pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil | Kecamatan | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16.000 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Kesehatan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|---|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------------------|----------------------|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 4: Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan | 1. Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Tersertifikasi | Kecamatan | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16.000 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Kesehatan, |
| | 2. Kabupaten memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 300 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan RSUD Waled, RSUD Arjawinangun |
| PROGRAM 2 : Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam Penanggulangan Komplikasi Kebidanan dan Bayi | bumil resti dan komplikasi dapat ditangani, 424 bidan dpt mendeteksi sesuai SOP, PKM PONED mampu memberikan pelayanan sesuai SOP, 10 PKM fokus PKRT | Puskesmas | 57 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 13.824 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Filantropi |
| Kegiatan 2: Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Neonatal Penguatan rujukan dan peningkatan kebijakan | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 3: Pembangunan Sistem Implementasi Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Neonatal, Penguatan rujukan dan peningkatan kebijakan 2 RS swasta dan 6 Pusk PONED 5 Pusk PONED | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 4 : Jaminan Persalinan | Jumlah masyarakat (pasien persalinan dan keluarga pasien) yang menerima bantuan jaminan persalinan | Jiwa | 213.645 | 213.645 | 213.645 | 213.645 | 213.645 | 213.645 | 213.645 | 213.645 | 640.935 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Kejadian Malaria per 1000 orang | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Proporsi kasus Kusta yang ditemukan dan diobati | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis 100% | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra | 1. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | Orang | 214.981 | 217.292 | 219.604 | 224.227 | 226.539 | 228.850 | 228.850 | 27.394 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan. |
| | 2. Persentase anak usia dibawah tiga tahun yang mendapat imunisasi dasar lengkap dan imunisasi | Orang | 161.813 | 173.372 | 184.930 | 196.488 | 208.046 | 219.604 | 219.604 | 27.394 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan. |
| | 3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi | Orang | 214.981 | 217.292 | 219.604 | 224.227 | 226.539 | 228.850 | 228.850 | 27.394 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan. |
| | 4. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspons | Orang | 214.981 | 217.292 | 219.604 | 224.227 | 226.539 | 228.850 | 228.850 | 27.394 | APBD, APBN BANPROV | Dinas Kesehatan. |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|--|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------------------|---------------------|------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. Penemuan kasus discarded campak ≥ 2 per 100.000 penduduk | Puskesmas | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 34.200 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 6. Penemuan kasus AFP non polio ≥ 2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun | Puskesmas | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 34.200 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 7. Persentase melaksanakan upaya kesehatan matra sebesar 60% | Puskesmas | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 34.200 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 8. Persentase Kabupaten yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100% | Puskesmas | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 34.200 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 9. Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan sebesar 100% | Puskesmas | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 34.200 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 10. Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantina kesehatan sebesar 100% | Puskesmas | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 34.200 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 2 : Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang | 1. Persentase pengendalian vektor terpadu sebesar 80%. | Puskesmas | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 17.100 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 2. Jumlah API <1/1.000 penduduk | Puskesmas | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 17.100 | APBD, APBN | Dinas Kesehatan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|--|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---------------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Jumlah endemis Filaria berhasil menurunkan angka mikro filarial menjadi < 1% sebanyak 75 kabupaten | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 4. Persentase IR DBD < 49 per 100.000 penduduk sebesar 68% | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 5. Persentase eliminasi rabies sebesar 85% | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 6. Persentase rekomendasi kajian pengendalian penyakit bersumber binatang | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 7. Persentase teknologi tepat guna pengendalian penyakit bersumber binatang | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 3 : Pengendalian Penyakit Menular Langsung | 1. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat sebesar 95%. | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 2. Jumlah mencapai eliminasi kusta. Dengan target di tahun 2020, eliminasi kusta | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 3. Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85% sebesar 90% | Orang | 1.784 | 1.475 | 1.386 | 1.296 | 1.207 | 1.118 | 1.118 | 8.920 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|---|---|---------------------|------|------|------|------|------|------|--|------------------|---------------------|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| | 4. Persentase angka kasus HIV yang diobati sebesar 55% | Orang | 129 | 97 | 73 | 54 | 41 | 31 | 31 | 1.290 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan |
| | 5. Persentase Puskesmas melakukan pemeriksaan dan tata laksana Pneumonia melalui program MTBS sebesar 60% | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan |
| | 6. Persentase melaksanakan kegiatan deteksi dini hepatitis B pada kelompok berisiko sebesar 80% | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan |
| | 7. Persentase kajian pengendalian penyakit menular langsung | Dokumen / Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan |
| | 8. Persentase teknologi tepat guna pengendalian penyakit menular langsung | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan |
| Kegiatan 4 : Penyehatan Lingkungan | 1. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan |
| | 2. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup |
| | 3. Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|--|---------------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|---------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| | 4. Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar sebesar 36% | RSUD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, |
| | 5. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup |
| | 6. Jumlah menyelenggarakan tatanan kawasan sehat sebanyak 386 desa/ kelurahan | Desa | 260 | 272 | 283 | 295 | 306 | 318 | 318 | 1.734 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup |
| | 7. Persentase rekomendasi kajian penyehatan lingkungan | Dokumen Rekomendasi | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup |
| | 8. Persentase teknologi tepat guna penyehatan lingkungan | Desa | 260 | 272 | 283 | 295 | 306 | 318 | 318 | 1.734 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup |
| | 9. Persentase penerbitan sertifikat/hasil uji pemeriksaan laboratorium dan kalibrasi | Dokumen Rekomendasi | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup |
| PROGRAM 2 : Program penanggulangan penyakit tidak menular kanker serviks dan kanker payudara melalui Iva test dan sadarnis | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Sosialisasi kanker serviks dan kanker payudara serta deteksi dini Iva test dan sadarnis pada PUS | Peningkatan pengetahuan dan pemahaman PUS tentang penyakit tidak menular kanker serviks dan kanker payudara serta deteksi dini IVA test dan sadarnis | orang | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 18.000.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|--|---------------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|------------------------------------|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Pendampingan dan pelayanan pemeriksaan deteksi dini iva test dan sadarnis bagi PUS | Jumlah PUS yang sudah melakukan pemeriksaan deteksi dini IVA test dan sadarnis | orang | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 12.000.000 | APBD, BANPROV, APBN, dan Kemitraan | Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisyiyah Cirebon |
| INDIKATOR : Prevalensi tekanan darah tinggi | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Surveilans Faktor Risiko PTM (Penyakit Tidak Menular) | Tersedianya data/informasi hasil ukur faktor resiko PTM di Posbindu PTM | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 2 : Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 2. Persentase melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 3. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 4. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|---|---------------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|---------------------|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| | 5. Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 6. Persentase kajian pengendalian penyakit tidak menular | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| | 7. Persentase teknologi tepat guna pengendalian penyakit tidak menular | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| INDIKATOR : Angka Kematian Dari Percobaan Bunuh Diri | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Jumlah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Puskesmas Yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Pencegahan Percobaan Bunuh Diri Pada Anak Dan Remaja Dengan Depresi | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Peningkatan Partisipasi Masy. dan Lembaga Keagamaan | Tercapainya pencegahan tindakan bunuh diri | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Depag, Dinas Sosial, Desa/kelurahan, |
| Kegiatan 2 : Peningkatan Peran Satuan Pendidikan Keagamaan Non Formal | Tercapainya pencegahan tindakan bunuh diri | Lembaga | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 750 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Depag, Dinas Pendidikan, Desa/kelurahan, |
| INDIKATOR : Prevalensi penyalahgunaan narkoba | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Jumlah penyalahgunaan narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di fasilitas pelayanan | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir | | | | | | | | | | | | |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|---|--|----------------|------|------|------|------|------|------|----|--|------------------|---------------------|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Jumlah yang menyelesaikan program rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Unit Pelayanan Sosial Keliling bagi Korban Penyalahgunaan Napza | 1. Pelayanan Sosial oleh tim untuk pemenuhan kebutuhan dasar 2. Eks Korban Penyalahgunaan Napza mendapatkan rekomendasi tindak lanjut | Lembaga | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 750 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, |
| Kegiatan 2 : Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA | 1. Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah mempunyai ketrampilan 2. Bertambahnya eks korban NAPZA yang memiliki KUBE | Lembaga | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 750 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Depag, Dinas Sosial, |
| PROGRAM 2 : Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pencegahan, Pemberrantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Meningkatnya peran pemuda dalam menekan penyalahgunaan dan peredaran narkoba | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Depag, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas kesehatan, Satpol PP, Disbudparpora |
| Kegiatan 2 : Sosialisasi tentang bahaya penggunaan Narkoba dan dampaknya bagi masa depan pengguna | Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar SMP dan SMA dan masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba dan dampaknya bagi masa depan pengguna | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.000.000 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Depag, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas kesehatan, Satpol PP, Disbudparpora |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|--|---|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------------|----------------------|------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Angka Kematian Akibat Cedera Fatal Kecelakaan Lalu Lintas | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Kondisi Mantap Jalan Nasional | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Kondisi Mantap Jalan | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Penguatan Konektivitas Regional | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan | Panjang Jalan yang terpelihara | Km | 534,97 | 534,97 | 534,97 | 534,97 | 534,97 | 534,97 | 534,97 | 534,97 | 3.000 | APBD, APBN, BANPROV, | Dinas PUPR |
| PROGRAM 1 : Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan | Tersedianya Desain Teknis Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 1 Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | - | | | 500 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR |
| Kegiatan 2 : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan | Panjang Jalan Kabupaten yang Dipelihara Secara Rutin dan Periodik | Km | 534,97 | 534,97 | 534,97 | 534,97 | 534,97 | 534,97 | 534,97 | | 3.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR |
| Kegiatan 3 : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan | Jembatan Kabupaten yang terpelihara | buah | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | | 3.860 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR |
| PROGRAM 2 : Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan | Tersedianya Desain Teknis Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 1 Dokumen | 1 | - | 1 | 1 | - | - | | | 500 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|---|---------------------|----------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--|---------------------|-----------------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan | Panjang Jalan Kabupaten yang Dipelihara Secara Rutin dan Periodik | Km | 534,97 | 534,97 | 534,97 | 534,97 | 534,97 | 534,97 | 534,97 | 3.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR |
| Kegiatan 3 : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan | Jembatan Kabupaten yang terpelihara | buah | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 61 | 3.860 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR |
| PROGRAM 3 : Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pemanfaatan Jalan | Tersedianya Laporan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan yang Dipergunakan Masyarakat dan Jumlah Patok Km/Hm yang Terpasang | Dokumen | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 500 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR |
| Program 4 : Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penyusunan Sistem Informasi/ Database Jalan | Tersusunnya Informasi Database Jalan | 1 Dokumen | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 500 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR |
| Kegiatan 2 : Penyusunan Sistem Informasi/ Database Jembatan | Tersusunnya Informasi Database Jembatan | 1 Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 500 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR |
| PROGRAM 2 : Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pembangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu | Terbangunnya fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas) baru dan yang rusak berat menjadi lebih memadai dan memenuhi standar kesehatan | Puskesmas dan Pustu | 1 PKM | 1 Pustu | 1 Pustu | - | - | - | - | 9.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas PUPR |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|---|---------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|--|---------------------|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Pengadaan Puskesmas Keliling | Tersedianya Kendaraan Puskesmas Keliling untuk Puskesmas | Pusling | - | - | 1 | 1 | - | - | | 3.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 3 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas | Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Cirebon | Puskesmas | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan |
| Kegiatan 4 : Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap | Bertambahnya jumlah Puskesmas rawat inap | Puskesmas | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan |
| Kegiatan 5 : Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu | Terlaksananya perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas pembantu) yang ada dengan lebih memadai dan memenuhi standar kesehatan | Pustu | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan |
| Kegiatan 6 : Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik Puskesmas | Terbangunnya sarana dan prasarana fisik puskesmas serta IPAL yang lebih memadai dan memenuhi syarat kesehatan | Unit (IPAL) | 8 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | | 64.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kimrumtan, |
| Kegiatan 7 : Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas | Terlaksananya perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas) yang ada dengan lebih memadai dan memenuhi standar kesehatan | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|--|---------------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|---------------------|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 8 : Pengembangan Labkesda dan Labkesling | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya Perbaikan Bangunan UPT Labkesda & Labkesling agar lebih baik dan memenuhi syarat ▪ Akreditasi Labkesda dan Labkesling | Unit | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 14.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup |
| PROGRAM 3 : Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | Cakupan pelayanan kesehatan pra lansia Cakupan pelayanan kesehatan lansia | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, BPJS, |
| INDIKATOR : Jumlah Penduduk Yang Dicapuk Asuransi Kesehatan Atau Sistem Kesehatan Masyarakat Per 1000 Penduduk | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN pada Puskesmas | Terlayannya Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Peserta JKN pada FKTP Puskesmas atau yang setara, Praktik dokter, Praktik dokter gigi, Klinik pratama atau yang setara, Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 120 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, BPJS, |
| INDIKATOR : Angka Kematian Akibat Air Tidak Aman, Sanitasi Tidak Aman, Dan Tidak Higienis | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Angka Kematian Akibat Keracunan | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pengawasan dan Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan | Meningkatnya cakupan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|---|--|----------|----------------|------|------|------|------|------|--|------------------|---------------------|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2024 |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Pengawasan dan Pembinaan Tempat-tempat Umum | Meningkatnya cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Trantib, Dunia Usaha, Filantropi |
| Kegiatan 3 : Pengawasan dan Pembinaan Industri | Meningkatnya cakupan industri yang memenuhi syarat kesehatan | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satpol PP |
| Kegiatan 4 : Pengawasan Obat (distribusi dan penggunaan) | Peningkatan pengetahuan peraturan mengenai distribusi obat (CDOB = Cara Distribusi Obat yang Baik) di Apotek dan Toko Obat | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, |
| Kegiatan 5 : Bimbingan dan Penyuluhan Keamanan Pangan | Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan hygiene sanitasi bagi pengelola makanan dan minuman | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | |
| PROGRAM 1 : Program Pengembangan Lingkungan Sehat | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat | Tersusunnya konsep Pengembangan Lingkungan Sehat di Kabupaten Cirebon | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup |
| Kegiatan 2 : Klinik Sanitasi | Penurunan penyakit berbasis lingkungan | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|--|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|--|-------------------------------|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3 : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Meningkat nya kualitas kesehatan masyarakat | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas Rumkintan |
| INDIKATOR : Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Adanya peningkatan cakupan rumah tangga ber PHBS | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN APBDes | Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa |
| Kegiatan 2 : Pengembangan Kabupaten Sehat | ~ Adanya 9 kawasan sehat ~ Pembinaan Program Cirebon Kabupaten Sehat" | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappelitbangda |
| PROGRAM 1 : PembinaanLingkungan Sosial | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Derajat Kesehatan Masy. Dengan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok | Cakupan RT tdk merokok dlm ruangan | Keluarga | 235.927 | 283.112 | 330.298 | 377.483 | 424.669 | 471.854 | | 3.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| INDIKATOR : Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Kefarmasian dan Alat Kesehatan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | 60.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, BPJS, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|--|---------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|--|---------------------|------------------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Terpenuhinya obat esensial, obat generik dan perbekalan kesehatan yang aman dan bermutu di puskesmas dan jaringannya | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 60.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 3 : Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian yang bermutu baik, Penulisan resep Obat generik di puskesmas, Harmonisasi lintas program dalam pengelolaan obat | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 60.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, BPJS, |
| Kegiatan 4 : Pengadaan Sarana Rantai Vaksin | Tersedianya sarana rantai vaksin di puskesmas dan dinas kesehatan sesuai standar | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 60.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, BPJS, |
| INDIKATOR : Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Proporsi pasangan usia subur (umur 15- 49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Metneed KB/ Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern) | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Bintek dan Seminar Pengarusutamaan Gender | Meningkatk an kesempatan dan daya saing ketenagaker jaan | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, DPPKBPPPA, Filantropi |
| Kegiatan 2 : Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan | Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketram pilan dan berjiwa kewirausa haan | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, DPPKBPPPA, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|---|----------------|------|------|------|------|------|----------------|-----|--|---------------------|------------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3 : Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) | Korban yang terlayani, Jejaring gugus tugas yang terfasilitasi, masyarakat tersosialisasi | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA, |
| Kegiatan 4 : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Jumlah Lembaga / Organisasi yang mendukung Kesetaraan Gender | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, DPPKBPPPA, Filantropi |
| Kegiatan 5 : Evaluasi Pelaksanaan PUG | | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, DPPKBPPPA, |
| Kegiatan 6 : Sosialisasi dan Pembinaan Fungsi KLA dan Forum Anak Daerah | Bertambahnya jumlah kelompok yang mendapatkan sosialisasi, bertambahnya Forum Anak | Kelompok | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 (kumulatif) | | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, DPPKBPPPA |
| INDIKATOR : Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Kampung Keluarga Berencana (KB) | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 2 : Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Fasilitasi Pembentukan Kampung KB | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengendalian penduduk Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas Terwujudnya desa pelopor KB di setiap kecamatan | Desa | 260 | 272 | 283 | 295 | 306 | 318 | 328 | 1.734 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA Dinas Kesehatan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp. Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---------------------|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Fasilitasi Pembentukan Kel. Masy. Peduli KB | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kelompok Keluarga Paripurna Setiap Kecamatan | Desa | 260 | 272 | 283 | 295 | 306 | 318 | 328 | 1.734 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA Dinas Kesehatan, |
| PROGRAM 3 : Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah | 1. Peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) melalui SJSN Kesehatan (PBI) | orang | 354.676 (100%) | 354.676 (100%) | 354.676 (100%) | 354.676 (100%) | 354.676 (100%) | 354.676 (100%) | 354.676 (100%) | 53.201 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA Dinas Kesehatan, |
| | 2. Faskes yang mendapatkan pemenuhan sarana, alokon sesuai standar pelayanan | Puskesmas dan pustu | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 60.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, BPJS, Dinas Sosial, Filantropi |
| Kegiatan 2: Pembinaan standarisasi kapasitas tenaga kes. pelayanan | 1. Peserta KB (PBI dan non PBI) yang dilayani di Faskes Swasta dan jejaringnya | Orang | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 35.909 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, BPJS, Dinas Sosial, |
| Kegiatan 3: Peningkatan Kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus | Kesertaan KB Pria (Peserta KB Pria/ PA) | Orang | 83.963 (100%) | 83.963 (100%) | 83.963 (100%) | 83.963 (100%) | 83.963 (100%) | 83.963 (100%) | 83.963 (100%) | 12.594 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 4: Peningkatan Advokasi dan KIE Program | 1. PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA Dinas Kesehatan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|---|----------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---------------------|----------------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga | media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang, terutama media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, banner, media tradisional) | | | | | | | | | | | |
| | 2. PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui tenaga lini lapangan | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 5 : Pelayanan KIE | Jumlah Motivator KIE KB | Orang | 1.059 | 1.332 | 1.665 | 1.959 | 2.176 | 2.291 | 2.356 | 10.482 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PPKBPPPA |
| Kegiatan 6 : Sosialisasi (KHIBA) Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak | Pemahaman Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak (KHIBA) | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 7 : Sosialisasi/ Orientasi dan Pengembangan Kel. Pusat Informasi Komunikasi (PIK) Remaja | Pemahaman Informasi Komunikasi (PIK) Remaja | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 8 : Pelayanan KB Sosialisasi/Orientasi Konseling Kontrasepsi (KIP/K) bagi Pengelola Program KB | Pemahaman Kontrasepsi (KIP/K) bagi Pengelola Program KB | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA Dinas Kesehatan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 9 : Sosialisasi/Orientasi Peningkatan Pelindungan dan Hak-Hak Reproduksi Individu | Pemahaman Pelindungan dan Hak-Hak Reproduksi Individu | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 10 : Akreditasi Penyuluh Keluarga Berencana | Umpan balik hasil penilaian akreditasi PKB | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA Dinas Kesehatan, |
| INDIKATOR : Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pelayanan Kontrasepsi | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pelayanan KB Medis Operasi | Peserta KB yang dilayani | Orang | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 35.909 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 2 : Pelayanan KB Melalui Mobil Unit Pelayanan (Moyan) | Peserta KB yang dilayani | Orang | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 35.909 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA Dinas Kesehatan, |
| Kegiatan 3 : Pelayanan KIE Melalui Mobil Unit Penerangan (Mupen) | Peserta KB yang dilayani | Orang | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 239.399 (100%) | 35.909 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA Dinas Kesehatan, |
| INDIKATOR : Proporsi Populasi Yang Menggunakan Layanan Air Minum Yang Dikelola Secara Aman | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Kapasitas Prasarana Air Baku Untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan Dan Industri, Serta Penyediaan Air Baku | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Proporsi Populasi Yang Menggunakan Layanan Sanitasi Yang Dikelola Secara Aman, Termasuk Fasilitas Cuci Tangan Dengan Air Dan Sabun | | | | | | | | | | | | |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|--|----------------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Proporsi Populasi Yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan Dengan Sabun Dan Air | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Jumlah Terbangun Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan Dan Komunal | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penyediaan Prasarana Sarana Air Minum bagi Masyarakat Ber-penghasilan Rendah | Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, PDAM, Dinas Kesehatan |
| Kegiatan 2 : Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Limbah | Unit | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 (kumulatif) | 30 (kumulatif) | 360.000 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, |
| Kegiatan 3 : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum | Tersedianya sarana dan prasarana air minum | Desa | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 (kumulatif) | 48 (kumulatif) | 138.000 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan |
| Kegiatan 4 : Pembangunan Sanitasi | Terbangunnya Sarana Sanitasi di Kabupaten Ciebon | Desa | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 (kumulatif) | 48 (kumulatif) | 21.000 | APBD, BANPROV, APBN APBDes | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan, Dinas LH, Pemerintah Desa |
| PROGRAM 2 : Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Perencanaan pengembangan infrastruktur | Adanya Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Permukiman di Bidang Infrastruktur | dokumen | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.000 | APBD, BANPROV, APBN | Barelitbangda, Dinas PUPR, Diskimrumtan |
| Kegiatan 2 : Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Bangunan dan Gedung Pelayanan Masyarakat di Kab Cirebon | Desa | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 (kumulatif) | 56 | 9.000 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan Pemerintah Desa |
| PROGRAM 3 : Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan | | | | | | | | | | | | |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|---|--------|----------------|------|------|------|------|----------------|------|--|-----------------------------|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan | Terpenuhinya Lingkungan yang Sehat Bagi Masyarakat Perdesaan | Desa | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 (kumulatif) | 56 | 9.000 | APBD, BANPROV, APBN | Diskimrumtan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan |
| Kegiatan 2 : Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan | Terpenuhinya Lingkungan yang Sehat Bagi Masyarakat Perdesaan | Desa | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 (kumulatif) | 56 | 9.000 | APBD, BANPROV, APBN APBDes | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan Pemerintah Desa |
| INDIKATOR : Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Bidang Kesehatan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan/ Penyehatan Lingkungan | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM | Desa | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 (kumulatif) | 56 | 9.000 | APBD, BANPROV, APBN APBDesa | Diskimrumtan, Dinas Kesehatan Pemerintah Desa |
| | Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan | Desa | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 (kumulatif) | 56 | 9.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas LH, Dinkes |
| | Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan | Desa | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 (kumulatif) | 56 | 9.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan |
| TUJUAN : PENDIDIKAN BERKUALITAS | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 3 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan | Siswa SD yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan Internasional | Orang | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 47.816 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|--|---------|----------------|------|------|------|------|------|------|--|----------------------|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tercapainya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | sekolah | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 83.070 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, |
| INDIKATOR : Persentase SD/MI berakreditasi minimal B | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Penyelenggaraan Akreditasi SD/MI | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Akreditasi SD/MI | Pemetaan Kompetensi Kinerja Kepala SD/MI Meningkatnya Kompetensi Kinerja Kepala SD/MI | sekolah | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, |
| Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Akreditasi SD/MI | Pembangunan perpustakaan sekolah | sekolah | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225.000 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, |
| INDIKATOR : Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTs | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTs | Pemetaan Kompetensi Kinerja Kepala SMP/MTs Meningkatnya Kompetensi Kinerja Kepala SMP/MTs | sekolah | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18.750 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, Akademis |
| Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTs | Pembangunan perpustakaan sekolah | sekolah | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 187.500 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, |
| | Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum | sekolah | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225.000 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, |
| | Pembangunan sarana dan prasarana olahraga | sekolah | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 281.250 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp. Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|--|---------------------|------|------|------|------|------|------|----|---|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir | sekolah | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150.000 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, |
| INDIKATOR : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/M I/ sederajat | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Angka Partisipasi Kasar (APK) SM P/MTs/ sederajat | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Rasionalisasi angka rasio murid sekolah melalui penambahan guru | Tercapainya rasio perbandingan siswa dan guru melalui penerimaan guru baru SD/MI | orang | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 17.280 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan |
| Kegiatan 2 : Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa | Tersedianya buku teks pelajaran dan Buku Laporan Pendidikan | Sekolah | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 38.400 | APBD, APBN, BANPROV, | Dinas Pendidikan, |
| Kegiatan 3 : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Tersedianya alat praktikum dan peraga siswa sebagai penunjang kelancaran KBM | Sekolah | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 96.000 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, |
| INDIKATOR : Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penyelenggaraan dan Pembinaan SMP Terbuka | Tercapainya pembelajaran lancar dan sukses di SMP Terbuka | Paket per kecamatan | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 26.250 | APBD, BANPROV, Filantropi, Dunia Usaha | Dinas Pendidikan, Filantropi, Ormas, Dunia Usaha, Akademis |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------|------|--------|--|----------------------------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paket B Setara SMP | Tercapai pembelajaran Paket B sesuai dengan Petunjuk Teknis orang | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 5.880 | APBD, APBN, BANPROV, | Dinas Pendidikan, | |
| Kegiatan 3 : Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup | Mendorong Terciptanya Jiwa Kewirausahaan untuk Mengakses Peluang Tenaga Kerja orang | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 600 | APBD, APBN, BANPROV, | Dinas Pendidikan, Disnakertrans, | |
| INDIKATOR : Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pendidikan Anak Usia Dini | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penambahan Ruang Kelas Sekolah | Terbangunnya Ruang Kelas Baru PAUD Kegiatan/ kecamatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, | |
| Kegiatan 2 : Pembangunan sarana bermain | Tersedianya alat permainan edukatif untuk PAUD Kegiatan/ kecamatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, | |
| Kegiatan 3 : Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir | Terbangunnya pagar pengaman sekolah Kegiatan/ kecamatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, | |
| Kegiatan 4 : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Rehabilitasi Ruang Kelas TK/PAUD Kegiatan/ kecamatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.400 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, | |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|--|--------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|----|--|---------------------|--------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 5 : Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | Terlaksananya Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini. 80 Lembaga PAUD dan 16 TK Negeri | PAUD dan TK Negeri | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 4.800 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, |
| Kegiatan 6 : Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) | Meningkatnya Mutu Layanan PAUD dan Kesejahteraan PTK | PAUD dan TK Negeri | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 9.600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, |
| PROGRAM 2 : Program Pengembangan Kurikulum PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini | Peserta Bintek Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD | PAUD dan TK Negeri | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 4.800 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, |
| Kegiatan 2 : Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa | Tersedianya buku teks dan buku Laporan Pendidikan | PAUD dan TK Negeri | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 4.800 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, |
| Kegiatan 3 : Pengembangan pendidikan anak usia dini | Dilaksanakannya Lomba Kreativitas Peserta Didik | PAUD dan TK Negeri | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 4.800 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, |
| Kegiatan 4 : Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini | Sosialisasi Teori Pembelajaran bagi Guru PAUD yang bukan berkualifikasi Ke-PAUD-an. | PAUD dan TK Negeri | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 4.800 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|--|--|------|------|------|------|------|------|----|--|----------------------|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15- 59 tahun | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pendidikan Non Formal | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan | Peserta Lomba Keteladanan dan Apresiasi | Lembaga Pendidikan dan Ketarampilan (Kursus) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6.000 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, |
| Kegiatan 2 : Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal | Program Pembelajaran LKP sesuai dengan Petunjuk Teknis | Orang | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1.440 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, |
| Kegiatan 3 : Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal | Meningkatnya Kompetensi dalam menyusun Kurikulum Pembelajaran KF | Lembaga pendidikan | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1.500 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, |
| Kegiatan 4 : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan | Penerapan pembelajaran mengenal dan menguasai baca Al - Qur'an | kecamatan | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6.000 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, |
| Kegiatan 5 : Peningkatan Pengembangan Pendidikan Non Formal | Peserta Sosialisasi Tutor Keaksaraan Fungsional | orang | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 4.800 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Filantropi, Akademis |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|--|--|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|----|--|------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 6 : Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal | Meningkatnya pencitraan publik melalui lomba-lomba pendidik dan peserta didik kursus | orang | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 4.800 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, |
| PROGRAM 2 : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pengembangan Pendidikan Keaksaraan | Sebanyak 6.000 WB mendapat Pembelajaran Keaksaraan Fungsional (KF) | Paket | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.500 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, |
| Kegiatan 2 : Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Berbasis Masyarakat | Berkembangnya Pendidikan Luar Sekolah Berbasis Masyarakat | Kecamatan | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, |
| Kegiatan 3 : Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS dan Guru Bantu Daerah Terpencil | Tercapainya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 7 Orang Guru Kontrak Daerah | Orang (guru kontrak daerah) | 7 | 17 | 21 | 28 | 35 | 42 | 42 | 42 | 3.600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, |
| Kegiatan 4 : Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP | 1. Sosialisasi BOS | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, |
| | 2. Bimtek Pendataan dan Pelaporan BOS | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, |
| | 3. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Dana BOS | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------|------|----|--|------------------|----------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. Operasional Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten Cirebon | orang | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 4.800 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, |
| | 5. Penyediaan Honorarium PTK Non PNS pada SD dan SMP | orang | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 4.800 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan, |
| INDIKATOR : Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Peningkatan Sarana dan Prasarana | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pembangunan Gedung Sekolah Baru | Terbangunnya gedung sekolah baru di wilayah-wilayah yang kekurangan termasuk kegiatan penggabungan (regrouping) sekolah menjadi sekolah yang layak dan representatif | Sekolah | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6.000 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, |
| Kegiatan 2 : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah | Terehabnya gedung sekolah yang rusak menjadi lebih layak dan representatif | Sekolah | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16.200 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, |
| Kegiatan 3 : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Sekolah | Gedung sekolah terpelihara konstruksi bangunan dan perlengkapan penunjangnya | Sekolah | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.100 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, |
| Kegiatan 4 : Pengadaan Perlengkapan Gedung Sekolah | Sekolah memiliki perlengkapan yang memenuhi standar kelayakan minimum termasuk sarana air bersih dan sanitary | Sekolah | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27.000 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|---|--|----------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|------------------|----------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Persentase guru SD dan SMP, yang bersertifikat pendidik | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Pengembangan Sistem Perencanaan | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 2 : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pelatihan dan Fasilitasi Kompetensi Tenaga Pendidik | Motivasi guru dalam memenuhi SNP guru SD dan SMP | orang | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 11.520 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan |
| Kegiatan 3 : Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik | Peserta memahami proses, maksud dan tujuan adanya Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | orang | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,24 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Pendidikan |
| Kegiatan 4 : Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi | Tercapainya peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan MGMP | Orang | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,24 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, |
| Kegiatan 5 : Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Sekolah dapat menyajikan data pokok pendidikan dengan valid dan akurat. 923 SD, 153 MI | Sekolah | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 176 | 176 | 176 | 1.800 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, |
| Kegiatan 6 : Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Bimtek Integrasi Verifikasi dan Validasi/Pemutakhiran NUPTK. Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan terupdate | Sekolah | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 176 | 176 | 176 | 1.800 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp. Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|---|----------------|------|------|------|------|------|------|----|---|--------------------------------|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik | 1. Pelatihan kompetensi guru SD/SMP; 2. Seleksi Guru/Kepala/Pengawas SD/SMP di Kabupaten Cirebon | orang | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26.136 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, |
| Kegiatan 2 : Pelatihan Penyusunan Kurikulum | Tersusunnya kurikulum di Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Cirebon | orang | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3.967,17 | APBD, BANPROV, APBN, | Dinas Pendidikan, |
| TUJUAN : KESETARAAN GENDER | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga | Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan bidang Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga | Dokumen | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Barenlitbangda, Disnakertrfans, DPPKBPPPA, |
| Kegiatan 2 : | Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan perempuan dan anak | Dokumen | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Barenlitbangda, Disnakertrfans, DPPKBPPPA, |
| Kegiatan 3 : | Terkoordinasikannya penyelesaian masalah-masalah perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22.5 | APBD, BANPROV, APBN, Kemitraan | Setda, Barenlitbangda, Disnakertrfans, DPPKBPPPA, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|--|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|------------------|----------------------|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | | |
| perlindungan bagi tenaga kerja perempuan | kerja perempuan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan | Kebijakan | | | | | | | | | | APBN, | Disnakertrfans, DPPKBPPPA, Filantropi, Dunia Usaha |
| Kegiatan 7: Peningkatan Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan | Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | APBD, BANPROV, APBN, | Setda, DPRD, Barenlitbangda, Disnakertrfans, DPPKBPPPA, |
| Kegiatan 8 : Peningkatan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial | Jumlah kebijakan terkait perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.5 | APBD, BANPROV, APBN, | Setda, Barenlitbangda, Dinsos, DPPKBPPPA, |
| INDIKATOR : Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Cirebon Berkesetaraan Gender dan Anak Ceria | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pembinaan Ketahanan Keluarga Berbasis Gender | Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas | Kepala Keluarga | 4.366 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 2.616 | APBD, BANPROV, APBN, | Setda, Dinas Sosial, , Dinas DPPKBPPPA, |
| Kegiatan 2 : Penatalaksanaan Manajemen Hak Anak | Jumlah Lembaga/ Kelompok/ Masyarakat yang Berkesetaraan Gender dan Anak yang CERIA (C = Cerdas, E = Energik, R = Responsif, I = Inovatif, A = Akuntabel) | Kelompok | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 600 | APBD, BANPROV, APBN, | DPPKBPPPA, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|---|---|----------------|------|------|------|------|------|------|----|--|------------------|----------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3 : Pembinaan Ketahanan Keluarga Berbasis Gender | Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas | Orang | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 43.75 | APBD, BANPROV, APBN, | Setda, DPPKBPPPA, |
| INDIKATOR : Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak | Terkumpulnya data keluarga yang Valid | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.500 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA, |
| INDIKATOR : Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Pendampingan korban kekerasan seksual | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penanganan hukum pelaku kekerasan seksual | Persentase polisi yang terlatih dalam (isu) kesehatan seksual dan kekerasan seksual | Orang | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2.400 | APBD, BANPROV, APBN | Dnas Kesehatan, DPPKBPPPA, Satpol PP, Polres, |
| Kegiatan 2 : Pendampingan korban kekerasan seksual | Jumlah kejadian kekerasan seksual yang dilaporkan untuk bukti hukum ke penegakhukum dan/atau ketenaga kesehatan | Orang | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 180 | APBD, BANPROV, APBN, | Setda, Dnas Kesehatan, DPPKBPPPA, |
| | Korban kekerasan seksual mendapatkan layanan yang berkualitas | Orang | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 180 | APBD, BANPROV, APBN, | Setda, Dnas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil, DPPKBPPPA, Polres, |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|---|----------|----------------|------|------|------|------|------|------|--|--------------------------------|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3 : Pelatihan tenaga pendamping korban kekerasan seksual | Jumlah petugas yang pernah dilatih pendampingan dan pemulihan mental korban pelecehan atau kekerasan seksual | Orang | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 130 | APBD, BANPROV, APBN, Kemitraan | Setda, Dnas Kesehatan, Dinas Sosial, DPPKBPPPA, |
| INDIKATOR : Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pelatihan kesadaran hukum | Peserta (masyarakat) perempuan memahami hak-hak perlindungan dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk dan dimensi | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA, |
| Kegiatan 2 : Pengembangan sistem dan mekanisme memudahkan perempuan korban kekerasan mengakses hak-haknya | 1. Masyarakat (terutama kaum perempuan) memahami dan memiliki akses informasi melalui sistem informasi tentang hak-hak perlindungan dari tindakan kekerasan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA, |
| | 2. Masyarakat (terutama kaum perempuan) memahami mekanisme pengaduan dan memiliki akses advokasi jika mengalami tindakan kekerasan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA, |
| INDIKATOR : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Total Fertility Rate (TFR) | | | | | | | | | | | | |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Kesehatan Reproduksi Remaja | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) | Jumlah remaja yang memahami KRR | Orang | 1.400 (100%) | 1.400 (100%) | 1.400 (100%) | 1.400 (100%) | 1.400 (100%) | 1.400 (100%) | 1.400 (100%) | 2.800 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, DPPKBPPPA |
| Kegiatan 2 : Workshop Program Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi Tokoh Remaja | Bertambahnya Tokoh Remaja yang memahami Program KKB | Orang | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 1.400 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA, |
| Kegiatan 3 : Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya penjangkauan kes siswa SD kls 1, pembekalan dokcil dan kader kesehatan remaja, lama sekolah sehat, dokter cilik, kader kesehatan remaja, akselerasi pelaksanaan UKS, rakontek UKS, program komunikasi jejaring prog UKS ▪ Seluruh sekolah (SD, SMP, SMA) melaksanakan penjangkauan dan pelayanan kesehatan anak sekolah | Orang | 1.400 (100%) | 1.400 (100%) | 1.400 (100%) | 1.400 (100%) | 1.400 (100%) | 1.400 (100%) | 1.400 (100%) | 2.800 | APBD, BANPROV, APBN | Setda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPPKBPPPA, Dinas PMD, Dinas Trantib, Polres, Filantropi |
| Kegiatan 4 : Sosialisasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) | Jumlah remaja yang memahami KRR | Orang | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 7.200.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan, DPPKBPPPA |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 2 : Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Fasilitasi Pembentukan Forum Konsultasi KB Pria | Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas | Orang | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi | Dinas Sosial |
| Kegiatan 2 : Sosialisasi/ Orientasi Peningkatan Pelindungan dan Hak-Hak Reproduksi Individu | Bertambahnya Remaja yang memahami Triad KRR(Seks Bebas Napza HIV/AIDS)dan | Puskesmas | 57 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 13.824 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan |
| INDIKATOR : Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Kebijakan atau regulasi tentang pencatatan kejadian pelaksanaan <i>Female Genital Mutilation</i> (FGM) atau Sunat Perempuan | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Sosialisasi pelarangan pelaksanaan FGM | Kebijakan atau regulasi tentang pencatatan kejadian pelaksanaan <i>Female Genital Mutilation</i> (FGM) atau Sunat Perempuan dengan tingkat yang membahayakan (<i>harm</i>) | Dokumen | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1.000 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA |
| Kegiatan 3 : Penyusunan Strategi untuk menghilangkan praktek FGM. Peraturan medis yang melarang dilakukan FGM | Persentase fasilitas menyediakan pelayanan medis, psikologis, serta rujukan, bagi perempuan yang mengalami FGM | Dokumen | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1.000 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA |
| | Jumlah institusi pendidikan dan pelatihan yang menyediakan pelatihan tentang pencegahan dan penanganan komplikasi akibat FGM | Puskesmas | 57 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 60 (100%) | 13.824 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------------------|---------------------------------|------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 4 : Pencatatan kejadian FGM | Persentase perempuan mengalami FGM | Puskesmas | 57 (100%) | 57 (100%) | 57 (100%) | 57 (100%) | 57 (100%) | 57 (100%) | 57 (100%) | 57 (100%) | 13.824 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kesehatan |
| Kegiatan 5 : KIA Pencatatan kejadian FGM | Kebijakan atau regulasi tentang pencatatan kejadian pelaksanaan <i>Female Genital Mutilation</i> (FGM) atau Sunat Perempuan dengan tingkat yang membahayakan (<i>harm</i>) Dicatat ada atau tidak ada dokumen kebijakan/regulasi, | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi | DPPKBPPPA |
| INDIKATOR : Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP) | Bertambahnya masyarakat yang terpapar informasi mengenai perlindungan perempuan dan anak | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi | Dinas Pendidikan |
| Kegiatan 2 : Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha (PEKKA) | Terciptanya perempuan mandiri | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi | DPPKBPPPA |
| Kegiatan 3 : Seminar dan | Peserta (masyarakat) perempuan memahami hak-hak perlindungan dari | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN, | DPPKBPPPA |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | | |
|---|---|----------------|------|------|------|------|------|--|------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2024 | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Sosialisasi Perlindungan Perempuan | tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk dan dimensi | | | | | | | | | | Filantropi | |
| PROGRAM 2 : Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan | Terbentuknya kelompok perempuan dan bertambahnya anggota kelompok perempuan dalam pembangunan | Orang | 100 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 250 | 1.100 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA |
| Kegiatan 2 : Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera | Jumlah Kelompok Perempuan dalam Pembangunan | Kelompok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 840 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA |
| Kegiatan 3 : Pembinaan Kelompok Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima) | Jumlah Kelompok Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima) | Kelompok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.080 | APBD, BANPROV, APBN | DPPKBPPPA |
| Kegiatan 4 : Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah kegiatan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.080 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi | DPPKBPPPA |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|--|---|----------------|------|------|------|------|------|------|--|------------------|---|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program pelatihan pengembangan kapasitas | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pelatihan Kepemimpinan Perempuan | 1. Pemimpin dan kader organisasi perempuan yang berakhlak baik dan mampu melakukan advokasi isu-isu perempuan | Kegiatan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60.480 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi dan Kemitraan | DPPKBPPPA |
| | 2. Lahir kader-kader perempuan yang berkualitas | Kegiatan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60.480 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi dan Kemitraan | DPPKBPPPA |
| INDIKATOR : Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak control | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penyusunan dan Pengumpulan Data | Tersedia dokumen perencanaan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 | APBD, BANPROV, APBN | Barenlitbangda |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|--|--|-----------------|------|------|------|------|------|------|--|------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan | Pemanfaatan Tanah | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 : Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Masyarakat memiliki akses yang sama dalam penguasaan lahan dan pengurusan legalitas tanah (lahan) | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | 450 | APBD, BANPROV, APBN | Barenlitbangda, Dinas PUPR, Diskimrumtan, BPN, Dinas PMD |
| Kegiatan 3 : Verifikasi Penyediaan Prasarana Sarana, Utilitas Umum dan Fasilitasi Sosial Permukiman | Tersedianya data akurat tentang Penyediaan Prasarana Sarana, Utilitas Umum dan Fasilitasi Sosial Permukiman | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | 450 | APBD, BANPROV, APBN | Barenlitbangda, Dinas PUPR, Diskimrumtan, BPN, Dinas PMD |
| Kegiatan 4 : Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu | Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) | Kepala Keluarga | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 8.970 | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Dinas Sosial, DPKPP, |
| INDIKATOR : Proporsi individu yang memiliki telepon genggam | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan | Penyusunan kajian standar Operasional prosedur (SOP) Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan terdatanya pengguna | Kegiatan | 1 | - | - | - | - | - | - | 450 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Kominfo |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|---|----------------|------|------|------|------|------|------|----|--|---------------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| komunikasi | jaringan komunikasi | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Upah rata-rata per jam pekerja | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Terlaksananya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.800 | APBD, BANPROV, APBN | Disnakertrans |
| Kegiatan 2 : Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Norma Kerja | Menurunnya Pelanggaran Peraturan Perundang- undangan ketenagakerjaan | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.800 | APBD, BANPROV, APBN | Disnakertrans |
| Kegiatan 3 : Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon | Terlaksananya Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 750 | APBD, BANPROV, APBN | Disnakertrans |
| INDIKATOR : Tingkat pengangguran terbuka | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan | Jumlah Pengembangan Tenant Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja | Unit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans, Dinas Koperasi |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|---|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--|--|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kesempatan Kerja | | | | | | | | | | | | UMKM |
| | Jumlah Kerjasama dalam Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja serta Penyebaran Informasi | Unit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 600 | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans, Dinas Koperasi UMKM |
| Kegiatan 2 : Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan padat karya | Orang | | | | | | | | | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans |
| | Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan wirausaha baru | Orang | 52.043 | 62.452 | 72.860 | 83.269 | 93.677 | 104.086 | 104.086 | 2.400 | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans |
| | Jumlah tenaga kerja muda yang diberdayakan melalui kegiatan penciptaan wirausaha muda | Orang | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 4.800 | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans |
| | INDIKATOR : Persentase setengah pengangguran | | | | | | | | | | | |
| | INDIKATOR : Persentase Tenaga Kerja Formal | | | | | | | | | | | |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|--|----------------------------|------|------|------|------|------|--------------------|-----------------|--|---|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Cirebon Bebas Pengangguran | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Kampung Produktif | Munculnya wirausaha baru | Lokasi (1 lokasi 4 org) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 (kumulatif) | 120 (kumulatif) | 4.200 | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans |
| PROGRAM 2 : Program Peningkatan Kesempatan Kerja | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja ▪ Jumlah Lowongan Kerja | Kegiatan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.700 | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans |
| Kegiatan 2 : Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan | Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan | Kegiatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.800 | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans |
| Kegiatan 3 : Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan | Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan | Kegiatan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.700 | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|---|----------------|------|------|------|------|------|------|---|--|--|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 4 : Penyebarluasan Informasi Prosedur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri | Terlaksananya Penyebarluasan informasi prosedur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja luar negeri. | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Disnakertrans |
| Kegiatan 5 : Tenaga Kerja Mandiri | Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Disnakertrans |
| Kegiatan 6 : Job Fair | - Terlaksananya Pameran Bursa kerja dengan peserta - Jumlah lowongan kerja | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Disnakertrans |
| Kegiatan 7 : Pembinaan Pencari Kerja | Terbinanya Pencari Kerja | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Disnakertrans |
| Kegiatan 8 : Pemagangan Dalam Negeri | Terlaksananya Pemagangan dalam negeri di sektor jasa pariwisata | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Disnakertrans |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|--|----------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|--|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 3 : Pembinaan Lingkungan Sosial | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pelatihan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau | Terlatihnya dan terdidiknya masyarakat dilingkungan sekitar industri tembakau | Orang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Disnakertrans |
| INDIKATOR : Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3 | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan | Terlaksananya sosialisasi peraturan pelaksanaan : a. Peraturan Perusahaan; b. Perjanjian Kerja Bersama; c. Organisasi Pekerja (Serikat Pekerja); d. LKS Bipartit | Orang | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.500 | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Disnakertrans |
| Kegiatan 2 : Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan | Terlaksananya Pengawasan, Perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja | Pabrik | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Disnakertrans |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|--|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| dan Kesehatan Kerja | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3 : Pembinaan Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja | Terlaksananya Pembinaan persyaratan kerja dan kesejahteraan melalui: - Bimtek - Seminar BPJS | Orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 750 | APBD, BANPROV, APBN, Dunia Usaha, Filantropi | Disnakertrans |
| Kegiatan 4 : Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit | Terlaksananya Peningkatan Hukum terhadap norma kerja | Pabrik | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Disnakertran, Dinas Perdagangan Perindustrian |
| TUJUAN : AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Proporsi Limbah Cair Yang Diolah Secara Aman | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Identifikasi : sumber pencemaran, kegunaan jenis bahan, sistem pengolahan, banyaknya buangan dan jenisnya, kegunaan bahan beracun dan berbahaya yang terdapat dalam pabrik | Tersusunnya hasil Identifikasi : sumber pencemaran, kegunaan jenis bahan, sistem pengolahan, banyaknya buangan dan jenisnya, kegunaan bahan beracun dan berbahaya yang terdapat dalam pabrik | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Lingkungan Hidup |
| Kegiatan 2 : Pembuatan model IPAL | Tersedia model IPAL untuk berbagai jenis industri | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | 300 | APBD, BANPROV, | Dinas Lingkungan Hidup |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|---|----------------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|--|---------------------|------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Industri | | | | | | | | | | | APBN | |
| Kegiatan 3 : Pembuatan stimulan IPAL Industri | Terbangunnya IPAL untuk berbagai jenis industri : Furniture, Batu Alam, Industri makanan, dan batik | Unit | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 (kumulatif) | 12 (kumulatif) | 6.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Lingkungan Hidup |
| INDIKATOR : Jumlah Kabupaten/Kota Yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan Dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pembuatan stimulan IPAL lumpur tinja | Terbangunnya IPAL untuk pengolahan lumpur tinja | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Lingkungan Hidup |
| INDIKATOR : Proporsi Badan Air Dengan Kualitas Air Ambien Yang Baik | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Kualitas Air Danau | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pemantauan Kualitas Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan hasil pemantauan kualitas lingkungan ▪ Bintek peningkatan kapasitas masyarakat untuk kualitas lingkungan | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Lingkungan Hidup |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------|------|--|------------------|---------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 2 : Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bintek Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Kerusakan Pantai ▪ Bintek pengelolaan sampah masyarakat pesisir ▪ Gerakan bersih lingkungan pesisir | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Lingkungan Hidup, Dislakan |
| PROGRAM 3 : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, baik pasar, permukiman, dan perusahaan | Unit | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 10.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Lingkungan Hidup, Diskimrumtan, Dinas PUPR |
| Kegiatan 2 : Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan | Peningkatan Pelayanan Pengangkutan Sampah | Armada Sampah | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 7.500 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Lingkungan Hidup |
| Kegiatan 3 : Pengembangan teknologi pengolahan persampahan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 orang ▪ 50 orang ▪ 1 pokjamas ▪ 1 dokumen ▪ 1 unit | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Lingkungan Hidup |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|---|----------------|------|------|------|------|------|------|----|--|---------------------|------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 4 : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Terbentuknya pokmas, lembaga bank sampah dan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah | pokmas | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 750 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Lingkungan Hidup |
| INDIKATOR : Perubahan Efisiensi Penggunaan Air Dari Waktu Ke Waktu | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Insentif Penghematan Air Pertanian/Perkebunan Dan Industri | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Tingkat Water Stress: Proporsi Pengambilan (<i>Withdrawal</i>) Air Tawar Terhadap Ketersediannya | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air | Terjaganya Fungsi Kawasan Resapan Sumber-sumber Mata Air | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Lingkungan Hidup |
| Kegiatan 2 : Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air | Laporan Inventarisasi Keanekaragaman hayati | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Lingkungan Hidup |
| INDIKATOR : Pengendalian Dan Penegakan Hukum Bagi Penggunaan Air Tanah | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan | | | | | | | | | | | | |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | | |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------|--|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2024 | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat | Termonitornya dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Lingkungan Hidup |
| INDIKATOR : Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) Yang Diinternalisasi Ke Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi | Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | 400 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR |
| Kegiatan 2 : Perencanaan Pembangunan Reservoir | Tersedianya dokumen perencanaan detail Reservoir | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | 500 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR |
| Kegiatan 3 : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Meningkatnya pengelola irigasi pengetahuan petani tentang pengelolaan jaringan irigasi | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR |
| Kegiatan 4 : Tersedianya Dokumen Perencanaan | Tersedianya Dokumen Perencanaan | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | 500 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR, Dislakan, Dinas |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|---|--|----------------|------|------|------|------|------|------|--|------------------|---------------------------|------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Pemberdayaan Petani Pemakai Air | Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sungai, Muara dan Pengaman Kawasan Pantai | | | | | | | | | | APBN | Lingkungan Hidup |
| Kegiatan 5 : Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sungai, Muara Sungai dan Pengaman Kawasan Pantai | Prasarana Jaringan Irigasi yang dipelihara | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 750 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR |
| Kegiatan 6 : Pembangunan dan Peningkatan Sumber Air | Terlaksananya operasi dan pemeliharaan Sumber Air | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR |
| INDIKATOR : Jumlah Stasiun Hidrologi Dan Klimatologi Yang Dilakukan <i>Updating</i> Dan Revitalisasi | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya Air Yang Dibentuk | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penyusunan Sistem Informasi/Database | Tersedianya Data Kondisi Sungai dan Jaringan Irigasi | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | 500 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|--------|---|------|------|------|------|--|------------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | |
| | | INDIKATOR : Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) Yang Meningkatkan Jumlah Mata Airnya | | | | | | | |
| | | INDIKATOR : Jumlah Wilayah Sungai (WS) Yang Memiliki Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Daerah Tangkapan Sungai Dan Danau | | | | | | | |
| | | INDIKATOR : Kegiatan Penataan Kelembagaan Sumber Daya Air | | | | | | | |
| | | INDIKATOR : Jumlah DAS Prioritas Yang Meningkatkan Jumlah Mata Airnya Melalui Konservasi Sumber Daya Air Di Daerah Hulu DAS Serta Sumur Resapan | | | | | | | |
| | | INDIKATOR : Jumlah DAS Prioritas yang Dipulihkan kesehatannya Melalui Pembangunan Embung, Dam Pengendali, Dam Penahan Skala Kecil Dan Menengah | | | | | | | |
| | | INDIKATOR : Proporsi Wilayah Cekungan Lintas Batas Dengan Pengaturan Kerja Sama Sumberdaya Air Yang Operasional | | | | | | | |
| | | INDIKATOR : Perubahan Tingkat Sumber Daya Air Terkait Ekosistem Dari Waktu Ke Waktu | | | | | | | |
| | | INDIKATOR : Jumlah Danau Yang Ditingkatkan Kualitas Airnya | | | | | | | |
| | | INDIKATOR : Jumlah DAS Prioritas Yang Dilindungi Mata Airnya Dan Dipulihkan kesehatannya | | | | | | | |
| | | INDIKATOR : Jumlah Danau Yang Pendangkalannya Kurang Dari 1% | | | | | | | |
| | | INDIKATOR : Jumlah Danau Yang Menurun Tingkat Erosinya | | | | | | | |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|--|----------|----------------|------|------|------|------|------|------|--|---------------------|------------------------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Perencanaan Pengelolaan DAS | Tersusunnya dokumen perencanaan detail pengelolaan DAS | DAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.500 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR |
| Kegiatan 2 : Penataan RTH | Terbangunnya RTH Publik | Ha | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 13.000 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup |
| Kegiatan 3 : Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Terciptanya kawasan RTH yang asri | Ha | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 1.800 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup |
| Kegiatan 4 : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup |
| Kegiatan 5 : Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Partisipatif Pengelolaan DAS Terpadu | Tersusunnya dokumen Kelembagaan dan Kemitraan Partisipatif Pengelolaan DAS Terpadu | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | 800 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR |
| Kegiatan 6 : Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan | Tersajinya laporan kemajuan kegiatan pengelolaan DAS di Kabupaten Cirebon | DAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.500 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas PUPR |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | | |
|---|--|----------------|------|------|------|------|------|--|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2024 | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| DAS | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pengendalian Banjir | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Muara Sungai dan Pengaman Pantai | Saluran/Pantai Aman dari Daya Rusak Air Laut/Abrasi | Paket | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.500 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Lingkungan Hidup, Dislakan |
| Kegiatan 2 : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Muara Sungai dan Pengaman Pantai | Saluran/Pantai Aman Dari Daya Rusak Air Laut/Abrasi yang direhabilitasi | Paket | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.500 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Lingkungan Hidup, Dislakan |
| INDIKATOR : Proporsi Unit Pemerintah Lokal Yang Menerbitkan Dan Melaksanakan Kebijakan Dan Prosedur Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Dan Sanitasi | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan | Meningkatnya kelompok masyarakat peduli lingkungan yang mampu secara mandiri mengembangkan praktek- prakte k ramah lingkungan dan peningkatan akses informasi lingkungan bagi masyarakat | kelompok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Lingkungan Hidup |
| Kegiatan 2 : Peningkatan Kualitas | Meningkatnya kelompok masyarakat peduli lingkungan yang mampu | kelompok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Lingkungan Hidup |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | | |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------|--|------------------|--------------------|---------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2024 | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | secara mandiri mengembangkan praktek-praktek ramah lingkungan dan peningkatan akses informasi lingkungan bagi masyarakat | | | | | | | | | APBN | | |
| TUJUAN : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Laju Pertumbuhan PDB per Kapita | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : PDB per Kapita | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja/Tingkat Pertumbuhan PDB Riil Per Orang Bekerja Per Tahun | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri | Pameran Perindustrian dan Perdagangan, Temu Bisnis Pelaku Usaha Dengan Atase Perdagangan Eropa serta Pembuatan Katalog Produk Ekspor | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnaker |
| Kegiatan 2 : Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor | Pembinaan prosedur ekspor dan impor bagi para pengusaha kecil dan menengah | Pengusaha | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnaker, Dinas Koperasi UMKM |
| Kegiatan 3 : | Pemantauan Harga Barang Kepokmas dan Barang | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, | Dinas Perdagangan |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------|------|--|------------------|---------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk | Penting/ Strategis serta survey ketersediaan barang kepokmas | | | | | | | | | | APBN | Perindustrian, Disnaker, Dinas Koperasi UMKM |
| Kegiatan 4 : Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah | Pemungutan retribusi di 9 Pasar Pemda | Pasar | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.100 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnaker, Dinas Koperasi UMKM |
| INDIKATOR : Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Penataan Sarana dan Prasarana Pasar | Pembangunan pasar/pemeliharaan pasar, pengurusan drainase, pembelian tabung, pengisian tabung pemadam kebakaran, pembangunan kios dan los untuk pedagang kaki lima dan asongan | Pasar | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 822 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Perdagangan Perindustrian |
| Kegiatan 2 : Pembinaan dan Pengembangan SDM Pasar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan manajemen pengelolaan pasar, Bimbingan Teknis penyelenggaraan pasar, Operasi terpadu keamanan dan ketertiban pasar, Bimbingan Teknis penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Bimbingan Teknis ▪ Pedagang Pasar Desa, Pelatihan Petugas | Pasar | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 540 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Perdagangan Perindustrian |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------|------|---|--|---------------------|---------------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| | Keamanan dan Petugas Retribusi Pasar | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Persentase Akses Layanan Keuangan Formal UMKM | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah tentang Perekonomian | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : | Tersampainya a peningkatan bidang industri dan perdagangan serta kumpulan untuk substansi kebijakan di bidang industri dan perdagangan | 1 dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 450 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Perdagangan Perindustrian |
| Kegiatan 2 : | Terlaksananya kegiatan koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi kebijakan OPD bidang koperasi dan UMKM | 1 dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 450 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Perdagangan Perindustrian |
| Kegiatan 3 : | Memfasilitasi pengembangan kawasan bagi pelaku UMKM (outlet) melalui observasi lapangan (OL) | 1 dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 450 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Perdagangan Perindustrian |
| Kegiatan 4 : | - Jumlah peserta pelatihan - Laporan hasil pelatihan | 1 dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 450 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Perdagangan Perindustrian |
| Kegiatan 5 : | - Jumlah peserta pelatihan - Laporan hasil pelatihan | 1 dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 450 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Perdagangan Perindustrian |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | | |
|---|--|----------------|------|------|------|------|------|--|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2024 | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kecil Menengah | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Bantuan Untuk Komitmen Perdagangan Dan Pencairan Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah tentang Perekonomian | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Peningkatan Kebijakan Pemerintahan Daerah Bidang Industri dan Perdagangan | Tersampainya a peningkatan bidang industri dan perdagangan serta kumpulan untuk substansi kebijakan di bidang industri dan perdagangan | 1 dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 450 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Perdagangan Perindustrian |
| Kegiatan 2 : Peningkatan Kebijakan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal | Terlaksananya kegiatan koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi kebijakan OPD bidang penanaman modal di kabupaten cirebon | 1 dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 450 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Perdagangan Perindustrian |
| Kegiatan 3 : Peningkatan Kebijakan Pemerintahan Daerah Bidang Industri dan Perdagangan | Tersampainya a peningkatan dibidangpendapatan dan kumpulan masukan untuk substansi kebijakan di bidang perdagang | 1 dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 450 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Perdagangan Perindustrian |
| INDIKATOR : Total Pengeluaran Pemerintah Dalam Program Perlindungan Sosial Dan Ketenagakerjaan Dalam Proporsi Terhadap Anggaran PDB | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Jumlah Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Persentase Dan Jumlah Anak Usia 5-17 Tahun, Yang Bekerja, Dibedakan Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur (Dibedakan Berdasarkan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) | | | | | | | | | | | | |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|---|----------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Tertindaknya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans |
| Kegiatan 2 : Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan | Tertindaknya sosialisasi peraturan pelaksanaan : a. Peraturan Perusahaan; b. Perjanjian Kerja Bersama; c. Organisasi Pekerja (Serikat Pekerja); d. LKS Bipartit | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | APBD, BANPROV, APBN | Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans |
| Kegiatan 3 : Pembinaan Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja | Tertindaknya Pembinaan persyaratan kerja dan kesejahteraan melalui : a. Bimtek b. Seminar BPJS | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi, Dunia Usaha | Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans, BPJS |
| Kegiatan 4 : Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon | Tertindaknya Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi, Dunia Usaha | Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans |
| Kegiatan 5 : | Pekerja perempuan mendapatkan haknya yang | Orang | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 250 | 250 | 400 | APBD, BANPROV, | Setda, Dinas Perdagangan |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp. Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|---|--|----------------|------|------|------|------|------|------|---|------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial | terampas dari adanya perselisihan hubungan industrial | | | | | | | | | | APBN, Filantropi, Dunia Usaha | Perindustrian, Disnakertrans, |
| Kegiatan 6 : peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap norma kerja | menurunnya pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bagi pekerja perempuan | Orang | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 250 | 250 | 400 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi, Dunia Usaha | Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans |
| Kegiatan 7 : sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan | terlaksananya sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan | Orang | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 250 | 250 | 600 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi, Dunia Usaha | Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans |
| Kegiatan 8 : peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3 | terlaksananya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3 | Orang | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 250 | 250 | 500 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi, Dunia Usaha | Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans |
| Kegiatan 9 : pembinaan persyaratan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja | terlaksananya pembinaan persyaratan kerja dan kesejahteraan melalui; bimtek, seminar BPJS | Orang | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 250 | 250 | 600 | APBD, BANPROV, APBN, Filantropi, Dunia Usaha | Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnakertrans, BPJS |
| INDIKATOR : Jumlah Wisatawan Nusantara | | | | | | | | | | | | |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|---|---|----------------|------|------|------|------|------|------|----|--|---------------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Jumlah Wisatawan Mancanegara | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 2 : Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah | Jumlah group seni yang direvitalisasi, direkonstruksi, diwariskan, dan diberi penghargaan | Grup | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4.200 | APBD, BANPROV, APBN | Disbudparora |
| Kegiatan 2 : Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya | Jumlah kegiatan kajian nilai budaya melalui seminar dan lokakarya | BCB | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Disbudparpora |
| Kegiatan 3 : Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya | Meningkatnya Apresiasi dan Pengembangan Karya Seni dan Kerajinan Tangan | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | APBD, BANPROV, APBN | Disbudparpora |
| Kegiatan 4 : Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah | Terbangunnya kawasan seni dan budaya di Kabupaten Cirebon Jumlah Gedung dan Kawasan seni yang dibangun | Kegiatan | 2 | - | - | - | - | - | - | 12.000 | APBD, BANPROV, APBN | Disbudparpora |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|---|----------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|---------------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 5 : Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air | Jumlah kegiatan kajian nilai budaya melalui seminar dan lokakarya | BCB | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Disbudparpora |
| Kegiatan 6 : Pengembangan kebudayaan dan pariwisata | Jumlah kesenian yang dipergelarkan di luar daerah, Hari Jadi Kabupaten Cirebon dan PHBN | Kegiatan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN | Disbudparpora |
| Kegiatan 7 : Pengembangan nilai dan geografi sejarah | Jumlah situs yang dibangun | Situs | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3.00 | APBD, BANPROV, APBN | Disbudparpora |
| INDIKATOR : Jumlah Pekerja Pada Industri Pariwisata Dalam Proporsi Terhadap Total Pekerja | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Kemitraan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata | Terbangunnya sarpras pariwisata | ODTW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 900 | APBD, BANPROV, APBN | Disbudparpora |
| Kegiatan 2 : Pelaksanaan koordinasi pembangunan | Bertambahnya bentuk kerjasama pengembangan pariwisata | Orang | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 750 | APBD, BANPROV, APBN | Disbudparpora |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|---|----------------|------|------|------|------|------|--|------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | |
| kemitraan pariwisata | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3 : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah kegiatan MICE yang dilaksanakan Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200 | APBD, BANPROV, APBN Disbudparpora |
| INDIKATOR : Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Jumlah Devisa Sektor Pariwisata | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Kajian Pemetaan Data Objek Pajak Daerah | Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Kegiatan 2 : Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek PBB | Data Obyek dan Subyek PBB yang mutakhir Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Kegiatan 3 : Penyerahan SPTPD, SKPD dan Penagihan Pajak | Terwujudnya basis data obyek dan subyek PBB yang mutakhir Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Kegiatan 4 : Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah | Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |

| Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------|------|---|--|---------------------|-------------------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 5 : Pemutakhiran Data Pajak Daerah | Data Jenis Pajak Daerah Yang di Verifikasi | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Kegiatan 6 : Penyisiran dan Penjaringan Pajak Daerah | Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Kegiatan 7 : Pembinaan Penyusunan Pelaporan Pajak Daerah Bagi Petugas UPT Pajak dan Wajib Pajak | Meningkatnya Kemampuan Petugas UPT Pajak dan Wajib Pajak Dalam Penyusunan Pelaporan Pajak Daerah | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Kegiatan 8 : Pelatihan Teknis Perhitungan Pajak Daerah | Tercapainya Peningkatan Pemahaman Wajib Pajak dan Pengetahuan Petugas Pemungut Pajak | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | APBD, BANPROV, APBN | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |

Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

Lampiran III Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 4 Tahun 2019

Tanggal : 12 Februari 2019

Tentang : Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

MATRIK RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DARI PROGRAM/KEGIATAN NON PEMERINTA

| Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | INSTANSI PELAKSA |
|---|---|-----------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|---------------------------------------|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| TUJUAN 1: TANPA KEMISKINAN | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR: Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional. | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program Pemberdayaan Fakir Miskin | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Fasilitasi pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin | Keluarga Miskin yang mempunyai Keterampilan | Kepala Keluarga | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 360.000.000 | Ormas Filantropi dan Kemitraan | Aisyiyah Kabupaten Cirebon |
| Kegiatan 2: Pembinaan pengelolaan keuangan keluarga bagi keluarga miskin | Keluarga Miskin mempunyai kemampuan mengelola keuangan keluarga | Kepala Keluarga | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 18.000.000 | Bansos, ADD, Filantropi dan Kemitraan | Aisyiyah Kabupaten Cirebon |
| Kegiatan 3: Pendampingan usaha bagi keluarga miskin | Keluarga miskin meningkat kualitas hidupnya | Kepala Keluarga | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 72.000.000 | Bansos, Filantropi dan Kemitraan | Aisyiyah Kabupaten Cirebon |
| Kegiatan 4 : Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Eks Pekerja Migran Bermasalah Sosial | Eks Pekerja Migran Bermasalah Sosial Mempunyai Keterampilan Dan Memiliki KUBE | Orang | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 24 | kemitraan | Forum Warga Buruh Migran Indonesia (lokasi: pangenan, gebang, babakan, pabedilan) |
| Kegiatan 5: Pembentukan Kelompok Usaha Produktif Perempuan dari Keluarga Miskin | Perempuan memiliki keterampilan dalam menghasilkan sebuah produk | Kelompok | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 300.000.000 | Dana ZIS | BAZNAS Kabupaten Cirebon |

| Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | INSTANSI PELAKSA |
|--|---|----------|----------------|------|------|------|------|------|------|--|------------------|--------------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| Kegiatan 6: Pemberian Bantuan Modal Usaha Mikro | Orang miskin mendapat Pembiayaan Usaha Perorangan | Orang | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 250 | 700.000.000 | Dana ZIS | BAZNAS Kabupaten Cirebon |
| | penduduk miskin mendapat Pembiayaan Usaha Kelompok | Kelompok | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3.600.000.000 | Dana ZIS | BAZNAS Kabupaten Cirebon |
| Kegiatan 7: Satu Keluarga Dhuafa Satu Sarjana | Meningkatnya derajat pendidikan anak fakir miskin | Orang | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 240.000.000 | Dana ZIS | BAZNAS Kabupaten Cirebon |
| Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penanganan dan pemberian bantuan terhadap korban Bencana | Meringankan Beban Korban Bencana | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.200.000.000 | Dana ZIS | BAZNAS Kabupaten Cirebon |
| Kegiatan 2: Kegiatan Ketahanan Pangan | Bantuan Paket Sembako bagi fakir miskin | Orang | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300.000.000 | Dana ZIS | BAZNAS Kabupaten Cirebon |
| Kegiatan 3: Pemberian Santunan Yatim Dhuafa Jompo | Terlayannya/terbantuny anak Yatim, Dhuafa Jompo | Orang | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300.000.000 | Dana ZIS | BAZNAS Kabupaten Cirebon |
| INDIKATOR : Persentase Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | | | | | | | | | | | | |
| Program 1 : Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 Pelatihan Disabilitas | Penyandang disabilitas yang miskin memiliki keterampilan | Orang | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300.000.000 | Dana ZIS | BAZNAS Kabupaten Cirebon |
| Kegiatan 2: Pemberian Bantuan Penyandang Cacat | Penyandang disabilitas/cacat yang miskin terbantu untuk melaksanakan aktivitasnya | Orang | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180.000.000 | Dana ZIS | BAZNAS Kabupaten Cirebon |

| Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | INSTANSI PELAKSA | |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| INDIKATOR : Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Advokasi Peningkatan Layanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pendataan dan advokasi JKN PBI dan KIS bagi warga miskin yang memenuhi syarat penerima tapi tidak mendapatkan haknya | Warga miskin yang memenuhi persyaratan mendapatkan haknya atas layanan dasar | Orang | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 3.000.000 | Bansos, Filantropi dan Kemitraan | Aisyiyah Kabupaten Cirebon |
| Kegiatan 2: Pembinaan dan pendampingan kepada warga miskin penerima JKN PBI dan KIS | Peningkatan kualitas hidup warrga miskin penerima JKN PBI dan Kartu KIS | Orang | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 3.000.000 | Bansos, Filantropi dan Kemitraan | 'Aisyiyah Kabupaten Cirebon |
| Kegiatan 3 Pemberian bantuan biaya rawat jalan bagi pasien miskin | Pasien miskin mendapat pelayanan kesehatan dengan dibantu Biaya rawat jalannya | Orang | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120.000.000 | Dana ZIS | BAZNAS Kabupaten Cirebon |
| Kegiatan 4: Bantuan Pengobatan Gratis dan Pendirian Rumah Sehat | Pemberian Pelayanan kesehatan/ Pengobatan secara gratis bagi fakir miskin | Orang | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 15.000.000 | Dana ZIS | BAZNAS Kabupaten Cirebon |
| Kegiatan 5: Khitanan Massal | Anak fakir miskin mendapat bantuan khitanan massal | Orang | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600.000.000 | Dana ZIS | BAZNAS Kabupaten Cirebon |
| Kegiatan 6: Pemberian bantuan Ambulance Gratis | Pemberian Pelayanan kesehatan secara gratis bagi fakir miskin | Unit | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 200.000.000 | Dana ZIS | BAZNAS Kabupaten Cirebon |

| Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | INSTANSI PELAKS |
|--|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|------------------|--------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| INDIKATOR : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Proporsi populasi penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Bantuan Jamban Keluarga | Terpenuhinya kebutuhan sanitasi layak (jamban) bagi fakir miskin | Unit | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45.000.000 | Dana ZIS | BAZNAS Kabupaten Cirebon |
| Kegiatan 2: Operasional dan Sosialisasi Rumah Sehat | Adanya infrastruktur permukiman dan Pemberian Pelayanan kesehatan secara gratis bagi fakir miskin | Paket | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 960.000.000 | Dana ZIS | BAZNAS Kabupaten Cirebon |
| INDIKATOR : Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap Hunian yang layak dan terjangkau | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1 : Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Rehabilitasi RUTILAHU | Fakir miskin memiliki Rumah Layak Huni | Rumah | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 18.000.000.000 | Dana ZIS | BAZNAS Kabupaten Cirebon |
| INDIKATOR : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat | | | | | | | | | | | | |
| Program Pendidikan Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Stimulan Biaya pendidikan Siswa | Anak-anak dari fakir miskin dapat terus melanjutkan sekolah tingkat menengah | Orang | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.600.000.000 | Dana ZIS | BAZNAS Kabupaten Cirebon |
| Kegiatan 2 : Pembangunan RKB dan Asrama SMP BAZNAS | Anak-anak dari fakir miskin mendapat layanan pendidikan hingga sekolah tingkat menengah | Unit | - | - | 1 | | | | | 4.200.000.000 | Dana ZIS | BAZNAS Kabupaten Cirebon |
| Kegiatan 3: Operasional SMP BAZNAS | Anak-anak dari fakir miskin mendapat layanan pendidikan hingga sekolah tingkat menengah | Kelas | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 4 | 4.320.000.000 | Dana ZIS | BAZNAS Kabupaten Cirebon |

| Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | INSTANSI PELAKSA | |
|---|---|----------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| INDIKATOR: Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan. | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program Sosialisasi dan Pendampingan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Sosialisasi Kesehatan bagi Ibu Hamil | Peningkatan pengetahuan dan pemahaman ibu hamil tentang pelayanan antenatal ke empat (K4) | Orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 18.000.000 | Bansos, ADD, Filantropi Dan Kemitraan | Perguruan Tinggi Muhammadiyah, "Aisyiyah Cirebon |
| Kegiatan 2: Pendampingan Kesehatan Ibu Hamil | Peningkatan jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4) | Orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 18.000.000 | Bansos, ADD, Filantropi dan Kemitraan | Perguruan Tinggi Muhammadiyah, "Aisyiyah Cirebon |
| INDIKATOR: Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program Sosialisasi dan Pendampingan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Sosialisasi pada Pasangan Usia Subur yang memiliki Bayi dan balita | Peningkatan dan pemahaman Pasangan Usia Subur yang memiliki bayi dan balita tentang imunisasi dasar lengkap | Orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 18.000.000 | Bansos, Filantropi Dan Kemitraan | Perguruan Tinggi Muhammadiyah, "Aisyiyah Cirebon |
| Kegiatan 2: Pendampingan Pasangan Usia Subur yang memiliki bayi dan balita | Peningkatan jumlah pelayanan imunisasi pada bayidandanakdi bawah dua tahun | Orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 18.000.000 | Bansos, ADD, Filantropi dan Kemitraan | Perguruan Tinggi Muhammadiyah, "Aisyiyah Cirebon |
| INDIKATOR: Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program Pembinaan dan Pendampingan Pelayanan Kontrasepsi | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Sosialisasi KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) | Peningkatan pengetahuan PUS tentang berbagai macam metode KB dan dampaknya | Orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 18.000.000 | Bansos, ADD, Filantropi Dan Kemitraan | Perguruan Tinggi Muhammadiyah, "Aisyiyah Cirebon |

| Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | INSTANSI PELAKSA |
|--|---|--------|----------------|------|------|------|------|------|------|--|--|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| Kegiatan 2 : Pendampingan pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) | Peningkatan jumlah kepesertaan KB | Orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 18.000.000 | Bansos, Filantropi dan Kemitraan | Perguruan Tinggi Muhammadiyah, "Aisyiyah Cirebon |
| TUJUAN 2: TANPA KELAPARAN | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR:Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Prevalensi malnutrisi atau wasting (berat badan atau tinggi badan) pada anak usia kurang dari 5 tahun | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Prevalensi anemia pada ibu hamil | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR : Persentasi bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Pendirian dan pengelolaan Rumah Gizi Balai Sakinah 'Aisyiyah di desa | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Sosialisasi Gizi bagi remaja putri, ibu hamil, ibu dengan balita, ibu dengan anak stunting, gizi buruk dan gizi kurang. Juga bagi ayah dan nenek untuk dukungan nyata. | Peningkatan pengetahuan bagi remaja putri, ibu hamil dan keluarga, ibu dengan balita dan keluarga, ibu dengan anak stunting, anak gizi buruk, anak kurang gizi dan keluarga tentang gizi dan keutamaannya | Orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 18.000.000 | ADD, Filantropi (Infak dan Sodaqoh), dan Kemitraan | Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisyiyah Cirebon |
| Kegiatan 2 : Konseling Gizi dan Koseling Menyusui bagi masyarakat | Penurunan jumlah anak kurang gizi, jumlah stunting, jumlah malnutrisi, jumlah kasus anemia pada ibu hamil serta peningkatan jumlah bayi yang lulus ASI Eksklusif | orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 18.000.000 | ADD, Filantropi (Infak dan Sodaqoh), dan Kemitraan | Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisyiyah Cirebon |
| Kegiatan 3 : Pendampingan pengolahan makanan bergizi | Penurunan jumlah anak kurang gizi, jumlah stunting, jumlah malnutrisi, jumlah kasus anemia pada ibu hamil serta peningkatan | orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3000 | 18.000.000 | Filantropi (Infak dan Sodaqoh), Kemitraan | Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisyiyah Cirebon |

| Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | INSTANSI PELAKSA | |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------|------|--|------------------|---|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| | jumlah bayi yang lulus ASI Eksklusif | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 4 : Pemberian makanan tambahan secara berkala bagi bayi terindikasi gizi buruk dan kurang gizi | Penurunan jumlah anak kurang gizi, jumlah stunting, dan jumlah malnutrisi. | orang | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 14.400.000 | Filantropi (Infak dan Sodaqoh), Kemitraan | Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisy Cirebon |
| Kegiatan 5: Pengelolaan kebun gizi masyarakat | Penurunan jumlah anak kurang gizi, jumlah stunting, jumlah malnutrisi, jumlah kasus anemia pada ibu hamil serta peningkatan jumlah bayi yang lulus ASI Eksklusif | orang | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 18.000.000 | Filantropi (Infak dan Sodaqoh), dan Kemitraan | Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisy Cirebon |
| Kegiatan 6 : Pemeliharaan Sanitasi | Penurunan jumlah anak kurang gizi, jumlah stunting, dan jumlah malnutrisi. | orang | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 6.000.000 | Filantropi (Infak dan Sodaqoh), Kemitraan | Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisy Cirebon |

TUJUAN 3 : KESEHATAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN

INDIKATOR:Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

INDIKATOR:Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan

INDIKATOR:Angka Kematian Ibu (AKI)

INDIKATOR:Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup

INDIKATOR:Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup

INDIKATOR:Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

PROGRAM 1: Sosialisasi dan Pendampingan Layanan Kesehatan Reproduksi dan Pemenuhan gizi Keluarga

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|---|--|
| Kegiatan 1: Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan gizi bagi remaja putri dan ibu hamil | Peningkatan pengetahuan dan pemahaman remaja putri (yang akan mengalami kehamilan) dan ibu hamil tentang kesehatan reproduksi dan kecukupan gizi bagi ibu hamil | Orang | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 6.000.000 | Filantropi (Infak dan Sodaqoh), Kemitraan | Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisy Cirebon |
|--|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|---|--|

| Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | INSTANSI PELAKSANA |
|--|--|----------|----------------|------|------|------|------|------|------|--|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| Kegiatan 2: Pendampingan layanan Kesehatan Reproduksi dan pemenuhan gizi keluarga bagi ibu hamil | Ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang mencukupi dan mendapatkan pelayanan pemeriksaan sebelum, saat dan sesudah melahirkan dengan baik | Orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 6.000.000 | Filantropi (Infak dan Sodaqoh), dan Kemitraan | Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisy Cirebon |
| INDIKATOR:Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1:Programpenanggulangan penyakit tidak menular kanker serviks dan kanker payudara melalui Iva test dan sadarnis | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Sosialisasi kanker serviks dan kanker payudara serta deteksi dini Iva test dan sadarnis pada PUS | Peningkatan pengetahuan dan pemahaman PUS tentang penyakit tidak menular kanker serviks dan kanker payudara serta deteksi dini IVA test dan sadarnis | orang | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 18.000.000 | Filantropi (Infak dan Sodaqoh), dan Kemitraan | Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisy Cirebon |
| Kegiatan 2 : Pendampingan dan pelayanan pemeriksaan deteksi dini Iva test dan sadarnis bagi PUS | Jumlah PUS yang sudah melakukan pemeriksaan deteksi dini IVA test dan sadarnis | orang | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 12.000.000 | Filantropi (Infak dan Sodaqoh), dan Kemitraan | Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisy Cirebon |
| INDIKATOR:Prevalensi penyalahgunaan narkoba | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Sosialisasi tentang bahaya penggunaan Narkoba dan dampaknya bagi masa depan pengguna | Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar SMP dan SMA dan masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba dan dampaknya bagi masa depan pengguna | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.000.000 | Filantropi (Infak dan Sodaqoh), dan Kemitraan | Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisy Cirebon |
| TUJUAN : PENDIDIKAN BERKUALITAS | | | | | | | | | | | | |

| Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | INSTANSI PELAKSA | |
|--|--|-----------------|----------------|------|------|------|------|------|--|------------------|---|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2024 |
| INDIKATOR: Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR: Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program Pendidikan Anak Usia Dini | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pembangunan sarana bermain | Tersedianya alat permainan edukatif untuk PAUD | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.000.000 | Filantropi (Infak dan Sodaqoh), Kemitraan | 'Aisyiyah Cirebon Dikdasmen PDA |
| Kegiatan 2: Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini | Terlaksananya Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan TK ABA | PAUD dan TK ABA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 36.000.000 | Filantropi (Infak dan Sodaqoh), Kemitraan | 'Aisyiyah Cirebon, Dikdasmen PDA |
| TUJUAN : KESETARAAN GENDER | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR: Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Sosialisasi hak-hak perlindungan dari tindak kekerasan dalam berbagai bentuk dan dimensi | Peserta (masyarakat) perempuan memahami hak-hak perlindungan dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk dan dimensi | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.000.000 | Filantropi dan Kemitraan | Pusat Studi Wanita, 'Aisyiyah Cirebon |
| Kegiatan 2 : Pelatihan Kesadaran Hukum | Peserta (masyarakat) perempuan memahami hak-hak perlindungan dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk dan dimensi | orang | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 255.000 | Kemitraan | WCC Mawar Balqis |
| Kegiatan 3 Pengembangan system dan mekanisme memudahkan perempuan korban kekerasan mengakses hak-haknya | Peserta (masyarakat terutama kaum perempuan) memahami dan memiliki akses informasi melalui sistem informasi tentang hak-hak perlindungan dari tindakan kekerasan | orang | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 45.000 | Kemitraan | WCC Mawar Balqis |

| Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | INSTANSI PELAKSA | |
|--|---|----------------|------|------|------|------|------|------|--|------------------|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| | Peserta (masyarakat terumata kaum perempuan) memahami mekanisme pengaduan dan memiliki akses advokasi jika mengalami tindakan kekerasan | orang | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | 45.000 | Kemitraan | WCC Mawar Balqis |
| Kegiatan 4 Pendampingan korban kekerasan seksual | Korban kekerasan seksual mendapatkan layanan yang berkualitas | orang | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | 180.000 | kemitraan | WCC Mawar Balqis |
| Kegiatan 5 Pelatihan Tenaga Pendamping korban kekerasan seksual | Jumlah petugas yang pernah dilatih pendampingan dan pemulihan mental korban pelecehan atau kekerasan seksual | orang | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | 130.000 | Kemitraan | WCC Mawar Balqis |
| INDIKATOR:Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR:Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program pelatihan pengembangan kapasitas | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Pelatihan Kepemimpinan Perempuan | 1. Pemimpin dan kader organisasi perempuan yang berakhlak baik dan mampu melakukan advokasi isu-isu perempuan | Kegiatan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12.000.000 | Filantropi (Infak dan Sodaqoh), dan Kemitraan | Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisy Pusat, 'Aisyiyah Cirebon |
| | 2. Lahir kader-kader perempuan yang berkualitas | Kegiatan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12.000.000 | Filantropi (Infak dan Sodaqoh), Kemitraan | Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisy Pusat, 'Aisyiyah Cirebon |
| | 3 Pemimpin dan kader organisasi perempuan yang berakhlak baik dan mampu melakukan advokasi isu-isu perempuan | orang | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | 255.000 | Kemitraan | WCC Mawar Balqis |

| Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | INSTANSI PELAKSA | |
|---|---|----------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|------------------|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| INDIKATOR:Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR:Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR:Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR:Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR:Total Fertility Rate (TFR) | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Program Kesehatan Reproduksi Remaja | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Sosialisasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) | Jumlah remaja yang memahami KRR | Orang | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 7.200.000 | Filantropi (Infak dan Sodaqoh), Kemitraan | Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 'Aisyah Cirebon |
| INDIKATOR : Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan lokasi | | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Sosialisasi terkait dengan Kesetaraan Gender,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah kegiatan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.000.000 | Filantropi (Infak dan Sodaqoh), dan Kemitraan | Pusat Studi Wanita, 'Aisyiyah Wilayah, 'Aisyiyah Cirebon |
| Kegiatan 2 : Pembinaan organisasi perempuan | Terbentuknya kelompok perempuan dan bertambahnya anggota kelompok perempuan dalam pembangunan | orang | 100 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | | | 600 | kemitraan | TURC |
| | Jumlah kelompok perempuan dalam pembangunan | kelompok | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 103.500 | kemitraan | WCC Mawar Balqis |
| Kegiatan 3 Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera | Jumlah kelompok perempuan dalam pembangunan | kelompok | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 103.500 | kemitraan | WCC Mawar Balqis |

| Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | INSTANSI PELAKSA |
|---|--|-----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|--|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| Kegiatan 4 Pelaksanaan Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah kegiatan sosialisasi | Orang | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 45.000 | kemitraan | WCC Mawar Balqis |
| INDIKATOR : Jumlah kebijakan yang Responsif Gender mendukung pemberdayaan perempuan | | | | | | | | | | | | |
| Program 1: Perlindungan Anak dan pemberdayaan Perempuan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 Koordinasi lintas dinas dan Lembaga Layanan | Terkoordinasikannya penyelesaian masalah perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan | Jumlah kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 22.500 | kemitraan | WCC Mawar Balqis |
| Program 2 : Kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 Peningkatan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan | Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang disusun, direview, dikoreksi dan diharmonisasikan | Jumlah kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 85.000 | kemitraan | WCC Mawar Balqis |
| Kegiatan 2 Peningkatan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial | Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan dengan masalah sosial yang disusun, direview, dikoreksi dan diharmonisasikan | Jumlah kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 32.500 | kemitraan | WCC Mawar Balqis |
| Program 3 Program Cirebon Berkesetaraan Gender dan Anak Ceria | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan Pembinaan ketahanan Keluarga Berbasis Gender | Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas | orang | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | 43.750 | kemitraan | WCC Mawar Balqis |
| Program 4 : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 Seminar dan Sosialisasi Perlindungan Perempuan | Peserta (masyarakat) perempuan memahami hak-hak perlindungan dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk dan dimensi | orang | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | 45.000 | kemitraan | WCC Mawar Balqis |

| Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | INSTANSI PELAKSA |
|---|---|--------------------|----------------|------|------|------|------|------|--|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| Kegiatan 2 Diskusi Reguler Komunitas Dampungan | Meningkatnya peran masyarakat (komunitas) dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak | Frekuensi kegiatan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 103.500 | kemitraan | WCC Mawar Balq |
| Kegiatan 3 Kampanya penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (International Woman day & 16 hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan) | Bertambahnya pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak | orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 85.000 | kemitraan | WCC Mawar Balq |

TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

INDIKATOR : Upah rata-rata per Jam

Program 1 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|------|
| Kegiatan 1 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian perselisihan hubungan industrial | Pekerja perempuan mendapatkan haknya yang terampas dari adanya perselisihan hubungan industrial | orang | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 250 | 400 | kemitraan | TURC |
| Kegiatan 2 Peningkatan Pengawasan, perlindungan dan Penegakan hukum terhadap norma kerja | Menurunnya pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bagi pekerja perempuan | orang | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 250 | 400 | kemitraan | TURC |

INDIKATOR : Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3

Program Perlindungan pengembangan lembaga Ketenagakerjaan

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|------|
| Kegiatan 1 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan | Terlaksananya sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan | orang | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 250 | 600 | kemitraan | TURC |
|--|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|------|

| Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan | | Satuan | Target Tahunan | | | | | | Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta) | Sumber Pendanaan | INSTANSI PELAKSA | |
|---|---|--------|----------------|------|------|------|------|------|--|------------------|------------------|------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2024 |
| Kegiatan 2 Peningkatan Pengawasan perlindungan dan Penegakan hokum terhadap K3 | Terlaksananya pengawasan, perlindungan dan penegakan hokum terhadap K3 | orang | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 250 | | 500 | kemitraan | TURC |
| Kegiatan 3 Pembinaan Persyaratan kerja dan Kesejahteraan tenaga kerja | Terlaksananya pembinaan persyaratan kerja dan kesejahteraan melalui Bimtek seminar BPJS | orang | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 250 | | 600 | kemitraan | TURC, BPJS |

Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO